

DIALOG GLOBAL

11.2

3 edisi per tahun dalam berbagai bahasa

Membahas Sosiologi
dengan Dasten Julián

Johanna Sittel
Walid Ibrahim

Ketidaksetaraan Global
dan Pandemi

Karin Fischer
Kajal Bhardwaj
Camila Gianella
Christina Laskaridis
Luckystar Miyandazi
E. Venkat Ramnayya
Viha Emandi

Peran Baru
Negara?

Julie Froud
Andreas Novy
Richard Bärnthaler
Bob Jessop
Klaus Dörre
Walid Ibrahim
Daniel Mullis

Perspektif
Teoretis

Arthur Bueno

Sosiologi Bertemu Seni

Jenni Tischer

COVID-19:
Pandemi dan Krisis

Margaret Abraham
Karina Batthyány
Esteban Torres
Mahmoud Dhaouadi
Alejandro Pelfini

Seksi Terbuka

- › **Sosiolog dalam Arena Politik-Kewargaan**
- › **Kebungkaman di Sekitar Kekerasan Pasangan Intim di T&T**
- › **Tentang Kemampuan Memedulikan Dunia**
- › **Manusia sebagai *Homo Culturus***
- › **Serangan Teror Norwegia Juli 2011**

MAJALAH



International
Sociological
Association
isa

VOLUME 11 / EDISI 2 / AGUSTUS 2021
<https://globaldialogue.isa-sociology.org/>

DG

› Editorial

Dalam *Dialog Global* edisi ini, seksi 'Membahas Sosiologi' membicarakan perkembangan terkini di Cile. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Johanna Sittel dan Walid Ibrahim, Dasten Julián, seorang peneliti paling terkemuka yang bekerja dengan interseksi bidang-bidang sosiologi dan sejarah merefleksikan perkembangan-perkembangan politik, protes sosial dan pekerjaan yang rentan di negaranya, dan tentang hubungan antara ilmu sosial dan masyarakat.

Selama satu setengah tahun terakhir pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan sehari-hari serta krisis-krisis ekonomi, sosial dan politik baru. Sejak awal pecahnya bencana tersebut, *Dialog Global* telah berupaya untuk memberikan wawasan tentang perkembangan-perkembangan tersebut di seluruh dunia. Untuk edisi kali ini, Karin Fischer telah menyelenggarakan suatu simposium yang secara sistematis merefleksikan pandemi dan ketimpangan global melalui kontribusi-kontribusi dari India, Peru, Inggris, dan Afrika Selatan. Meskipun pandemi mempengaruhi penduduk dunia, "kita tidak semuanya berada di dalam perahu yang sama." Perkembangan, marketisasi, dan (kurangnya) ketersediaan vaksin, serta dampak-dampak pandemi dalam hal kesehatan atau pendidikan memperlihatkan dan meningkatkan ketimpangan global di antara negara-negara miskin dan kaya, Selatan Global dan Utara Global, kelompok-kelompok rentan yang sudah menderita krisis ekologi atau ekonomi dan kelompok-kelompok yang mampu melindungi diri mereka sendiri.

Simposium kedua kami membahas perubahan luar biasa yang terjadi dalam hubungan antara ekonomi dan negara. Para cendekiawan yang mempromosikan konsep Ekonomi Fundamental mengkritik liberalisasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, menganalisis batas-batas gagasan dominan tentang pertumbuhan, dan menuntut adanya cara-cara baru penyediaan [pelayanan] di bidang perawatan kesehatan, pendidikan, pangan, transfer publik, dll. yang dikombinasikan dengan infrastruktur-infrastruktur yang dibentuk dan dikendalikan

oleh institusi-institusi demokratis. Berkaca pada perubahan peran negara dalam menghadapi pandemi, para penulis membahas seberapa jauh hal ini dapat mempengaruhi hubungan ekonomi dan politik dalam jangka panjang, arahnya pada kecenderungan untuk menjadi otoriter atau demokratis, dan untuk sejauh mana sosiologi ditantang oleh intervensionisme negara baru.

Pada seksi teori, Arthur Bueno merekonstruksi era neo-liberal pada beberapa dekade terakhir yang menyebabkan krisis ekonomi dan sosial maupun krisis subjektivitas. Dengan berfokus pada isu depresi, ia membahas peralihan dari kewirausahaan-diri menjadi kelelahan, dan dari realisasi diri menjadi keterasingan, serta pengaruh gerakan-gerakan protes dan politik otoriter, dan perspektif masa depan.

Seniman Jenni Tischer berkontribusi pada debat publik tentang pekerjaan yang esensial di masa pandemi dengan menjelaskan dua dari karya kolase-kolasesnya yang bertujuan untuk membuat pekerjaan yang tidak tampak menjadi dapat lebih terlihat.

Seksi tentang COVID-19 menguraikan beberapa tantangan bagi sosiologi, dengan Margaret Abraham menganalisis bagaimana pandemi berjalan seiring dengan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, Karina Batthyány dan Esteban Torres mengangkat topik ketidaksetaraan sosial, dan Mahmoud Dhaouadi membahas meningkatnya pengaruh ujaran kebencian, sedangkan Alejandro Pelfini fokus pada proses pembelajaran masyarakat.

Yang terakhir tapi tidak kalah penting, 'Seksi Terbuka' menawarkan refleksi-refleksi teoretis, khususnya mengenai pergulatan konsepsi tentang kemanusiaan, serta diskusi tentang peristiwa-peristiwa terkini dan perkembangan-perkembangan kontemporer di berbagai negara mengenai kekerasan di satu sisi dan kepedulian di sisi lain. ■

Brigitte Aulenbacher dan **Klaus Dörre**,
editor *Dialog Global*

› ***Dialog Global* dapat dijumpai dalam berbagai Bahasa [ISA website](#).**

› **Naskah harap dikirim kepada globaldialogue.isa@gmail.com.**

ISA International
Sociological
Association

**GLOBAL
DIALOGUE**



> Dewan Redaksi

Editor: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

Asisten Editor: Johanna Grubner, Walid Ibrahim.

Rekan Editor: Aparna Sundar.

Editor Pelaksana: Lola Busuttill, August Bagà.

Konsultan: Michael Burawoy.

Konsultan Media: Juan Lejárraga.

Editor Konsultasi:

Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalón, Nazanin Shahrokni.

Editor Wilayah

Dunia Arab: (*Tunisia*) Mounir Saidani, Fatima Radhouani, Habib Haj Salem; (*Aljazair*) Souraya Mouloudji Garrouddji; (*Maroko*) Abdelhadi Al Halhouli, Saida Zine; (*Lebanon*) Sari Hanafi.

Argentina: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Martín Urtasun.

Bangladesh: Habibur Khondker, Khairul Chowdhury, Abdur Rashid, Ashis Kumer Banik, A.B.M. Najmus Sakib, Bijoy Krishna Banik, Eashrat Jahan Eyemoon, Ekramul Kabir Rana, Helal Uddin, Juwel Rana, M. Omar Faruque, Masudur Rahman, Md. Shahin Aktar, Mohammad Jasim Uddin, Mohammed Jahirul Islam, Ruma Parvin, Sabina Sharmin, Saleh Al Mamun, Sarker Soheli Rana, Sebak Kumar Saha, Shahidul Islam, Shamsul Arefin, Sharmin Akter Shapla, Syka Parvin, Yasmin Sultana.

Brasil: Gustavo Taniguti, Angelo Martins Junior, Andreza Galli, Dmitri Cerboncini Fernandes, Gustavo Dias, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes.

Prancis/Spanyol: Lola Busuttill.

India: Rashmi Jain, Nidhi Bansal, Manish Yadav, Sandeep Meel.

Indonesia: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriayati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

Iran: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Abbas Shahrabi, Sayyed Muhammad Mutallebi.

Kazakhstan: Aigul Zabirowa, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanyshtel, Almagul Mussina, Aknur Imankul, Madiyar Aldiyarov.

Polandia: Justyna Kościńska, Jonathan Scovil, Sara Herczyńska, Weronika Peek, Aleksandra Wagner, Aleksandra Biernacka, Jakub Barszczewski, Adam Müller, Zofia Penza-Gabler, Iwona Bojadzjewa.

Romania: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Iulian Gabor, Monica Georgescu, Ioana Ianuş, Bianca Mihăilă.

Rusia: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur.

Taiwan: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Tsung-Jen Hung, Yu-Chia Chen, Yu-Wen Liao, Po-Shung Hong, Kerk Zhi Hao, Yi-Shuo Huang.

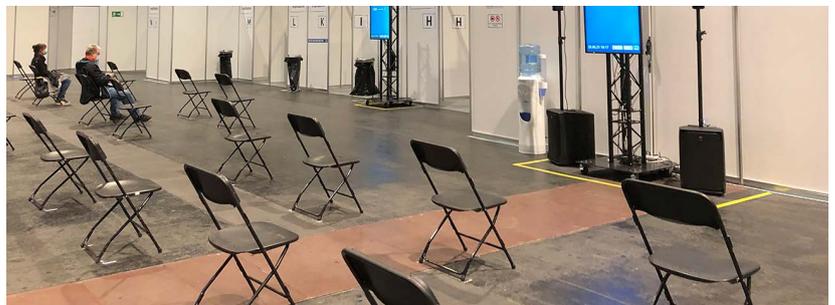
Turki: Gül Çorbacıoğlu, İrmak Evren.



Dalam wawancara dengan Dasten Julián, kami membahas protes massa baru-baru ini di Chile, proses selanjutnya dari penyusunan konstitusi yang baru, dan peran apa yang dapat dimainkan sosiolog yang terlibat di sini dalam menghadapi kerentanan yang telah berakar.



Pandemi COVID-19 telah mengungkapkan dan meningkatkan ketidaksetaraan kekayaan dan penghasilan, gender dan ras yang ada—dalam batas-batas nasional, dan lebih khusus lagi pada skala global. Perkembangan, marketisasi, dan (ketiadaan) ketersediaan vaksin, dan dampak pandemi dalam arti kesehatan atau pendidikan memperlihatkan dan meningkatkan ketidaksetaraan global antara negara-negara miskin dan kaya, Selatan Global dan Utara Global, kelompok-kelompok rentan yang sudah menderita krisis ekologi dan ekonomi serta kelompok-kelompok yang mampu melindungi diri mereka sendiri.



Simposium ini membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan antara negara dan ekonomi. Para penyaji membahas bagaimana respons masing-masing negara terhadap pandemi akan berpengaruh pula pada bentuk-bentuk pemerintahan di masa depan dan bagaimana bentuk-bentuk intervensionisme negara yang telah nampak dapat dipahami. Apakah ada bentuk baru intervensionisme negara yang sedang berkembang, dan bila demikian halnya, apakah bentuk tersebut nantinya akan akan berciri otoriter atau demokratis?



Global Dialogue dapat terselenggara berkat dana hibah dari **SAGE Publications**.

› Dalam Edisi Ini

Editorial **2**

› MEMBAHAS SOSIOLOGI

Sosiologi di Masa Krisis:
Wawancara dengan Dasten Julián
oleh Johanna Sittel dan Walid Ibrahim, Jerman **5**

› KETIDAKSETARAAN GLOBAL DAN PANDEMI

COVID-19 dan Ketidaksetaraan Global
oleh Karin Fischer, Austria **9**

Dahulukan Rakyat ketimbang Laba: Seruan dalam penanggulangan COVID-19
oleh Kajal Bhardwaj, India **11**

Vaksin COVID-19: Mengungkap Ketidaksetaraan Global
oleh Camila Gianella, Peru **14**

Melanggengkan Kesenjangan Antara Kreditur dan Debitur
oleh Christina Laskaridis, Inggris **16**

Tantangan Mengurangi Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Afrika
oleh Luckystar Miyandazi, Afrika Selatan **18**

Bencana Kembar di India—Agenda yang Belum Selesai
oleh E. Venkat Ramnaya dan Viha Emandi, India **20**

› PERAN BARU NEGARA?

Ekonomi Fundamental Sebagai Kunci Pembaruan Sosial
oleh Julie Froud, Inggris **22**

Ekonomi dan Negara yang Sesuai untuk Masa Depan
oleh Andreas Novy dan Richard Bärnthaler, Austria **24**

COVID-19: Artikulasi Baru Negara dan Ekonomi
oleh Bob Jessop, Inggris **26**

Leviathan Muncul Kembali! Negara Korona dan Sosiologi
oleh Klaus Dörre dan Walid Ibrahim, Jerman **28**

COVID-19: Membuat Tempat Tidak Aman di Jerman
oleh Daniel Mullis, Jerman **30**

› PERSPEKTIF TEORETIS

Setelah Depresi: Subjek Pasca-Neoliberal
oleh Arthur Bueno, Jerman **32**

› SOSIOLOGI BERTEMU SENI

Representasi Visual Karya Tak Kasatmata
oleh Jenni Tischer, Austria **35**

› COVID-19: PANDEMI DAN KRISIS

Kekerasan Domestik selama Pandemi Global
oleh Margaret Abraham, AS **37**

Krisis COVID-19: Sosiologi Baru dan Feminisme
oleh Karina Batthyány, Uruguay dan Esteban Torres, Argentina **40**

Dampak Global Menakutkan dari COVID-19
oleh Mahmoud Dhaouadi, Tunisia **42**

Skenario Pascapandemi, dari Adaptasi ke Pembelajaran Kolektif
oleh Alejandro Pelfini, Argentina **44**

› SEKSI TERBUKA

Sosiolog dalam Arena Politis-Kewargaan
oleh Fredy Aldo Macedo Huamán, Meksiko **46**

Kebungkaman di sekitar Kekerasan Pasangan Intim di Trinidad dan Tobago
oleh Amanda Chin Pang, Trinidad dan Tobago **48**

Tentang Kemampuan Memedulikan Dunia
oleh Francesco Laruffa, Swiss **50**

Manusia sebagai *Homo Culturus*
oleh Mahmoud Dhaouadi, Tunisia **52**

Serangan Teror Norwegia, 22 Juli 2011
oleh Pål Halvorsen, Norwegia **54**

“**Dalam banyak kasus ekonomi tumbuh melalui penderitaan manusia dan bencana lingkungan**”

Francesco Laruffa

› Sosiologi di Masa Krisis

Wawancara dengan Dasten Julián



Dasten Julián.

Dr. **Dasten Julián** adalah akademisi dan peneliti di Institut Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Austral Cile. Ia sekarang bekerja sebagai peneliti utama proyek “Kerentanan kerja di zona-makro selatan Cile: Persinggungan, wilayah dan perlawanan di Maule, ñuble, Biobío dan La Arucanía” (2020-2023) yang didanai oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Nasional Cile. Ia juga merupakan peneliti rekanan di Institut Masyarakat, Kerja dan Politik di Universitas Witwatersrand, Johannesburg (Afrika Selatan). Dasten Julián lulus dari Universitas-Friedrich-Schiller di Jena, Jerman dan menekuni topik seperti: kerentanan kerja dan hidup, strategi dan organisasi serikat, ekstrativisme, sosiologi publik maupun kerja di Selatan Global secara umum. Penelitiannya dilakukan dengan berkolaborasi secara intens bersama masyarakat sipil, serikat buruh dan organisasi nonpemerintah.

Di sini Dr. Julián diwawancara oleh **Johanna Sittel** dan **Walid Ibrahim**, peneliti rekanan di Departemen Sosiologi Industri dan Ekonomi Universitas-Friedrich-Schiller di Jena, Jerman.

Bagaimana gelombang unjuk rasa sosial 2019 terjadi di Cile? Gelombang unjuk rasa tersebut dipantik oleh kenaikan tarif transportasi publik. Apakah itu hanya hal kecil yang memicu peristiwa besar, atau adakah sesuatu yang lain di samping itu, karena situasi layanan publik serta konflik memberikan banyak indikasi tentang keadaan suatu masyarakat?

Gelombang unjuk rasa sosial ini memiliki asal-muasal sejarah dari Konstitusi yang dipaksakan oleh kediktatoran sipil-militer Augusto Pinochet (1973-1990), lewat penghilangan secara sistematis kekuatan-kekuatan demokrasi dan plebisit yang curang pada 1980. Di level Amerika Latin, Cile adalah satu-satunya negara yang mempertahankan konstitusi yang dirumuskan pada masa kediktatoran militer. Daya tahannya memiliki serangkaian ekspresi, tak lepas dari fakta bahwa ia mempersiapkan jalan untuk kemunculan kebijakan neoliberal secara brutal dan total. Dalam hal ini, sepanjang lima dekade masyarakat Cile sudah direntankan dan dirampas secara intens, melalui proses komodifikasi yang tidak terkira dan tanpa preseden.

Hal ini merupakan bagian dari konsensus politik di antara dua koalisi yang memerintah Cile sejak 1990, yang mempertahankan keutamaan rezim neoliberal di dua sisi: kepercayaan terhadap pasar sebagai entitas yang mengalokasikan kesejahteraan dan integrasi sosial, dan Konstitusi Pinochet sebagai halangan untuk demokratisasi dari sistem politik. Kurun ini (1990-2019) disebut »

sebagai “transisi demokratis,” yang mengisyaratkan proses demokratisasi berangsur-angsur untuk memulihkan basis-basis koeksistensi dan organisasi demokratis dari masyarakat. Sayangnya, sistem dan aktor politik institutional menyumbat jalur partisipasi dan pengambil keputusan aktif oleh mayoritas selagi model ekonomi mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Sebuah proses sistematis di mana sistem politik tidak dipercaya dan terkikis legitimasinya berangsur-angsur tumbuh dengan penjarakan yang melebar dari warga. Proses kolusi ekonomi, kasus pembiayaan kampanye yang tidak wajar, impunitas di pengadilan dari pengusaha dsb. adalah beberapa di antara gejala masyarakat yang terperangkap oleh jejaring kekuasaan yang diletakkan pada masa kediktatoran. Slogan “bangunlah Cile” memperlihatkan momen pengungkapan dan pemberontakan, momen kesadaran, identifikasi, dan kekuatan, seiring “pernyataan perang” oleh pemerintah, pelanggaran hak-hak asasi (8.827 laporan resmi di pengadilan) serta pemenjaraan para pengunjuk rasa (ada setidaknya 27.432 yang menjadi korban) menggabungkan suasana otoriter, konservatif, dan militer yang masih bertahan di tatanan politik formal.

Unjuk rasa di Cile juga merupakan gabungan dari subyektivitas dan daerah asal yang sangat majemuk. Anak-anak muda, perempuan, lanjut usia, masyarakat adat, migran, dll. mengembangkan repertoar-repertoar aliansi yang spontan dan terkoordinasi. Masa kini dan masa lalu melebur lewat perjumpaan memori politik antargenerasi di ruang privat dan publik, yang politis telah mengejutkan dirinya di ranah estetis, lewat kreativitas artistik, lewat musik, di jalanan, pedesaan sebagaimana juga pertemuan, percakapan, dan pendudukan ruang virtual, dsb. Sebagai sebuah masyarakat, kami telah mengalami perjumpaan mendalam kembali secara kultural, politis, dan simbolik, yang bertaut dengan “harga diri” sebagai tujuan, sebagai sebuah tradisi. Karenanya, apa yang terungkap dari perjumpaan ini adalah elemen orisinal dan mendasar dari masyarakat Cile, kontrak sosialnya, dasar-dasarnya, Konstitusinya.

Bagaimana proses elaborasi dari Konstitusi nampak terlihat pada saat ini? Adakah aktor yang menonjol di sana? Apakah ilmu-ilmu sosial memainkan peran ataukah kepakaran legal yang mendominasi?

Sebuah Plebisit Nasional digelar pada 26 April 2020, setahun silam. Lebih dari tujuh juta orang berpartisipasi. Lebih dari 78% pemilih, yakni sekitar 5,8 juta orang, meratifikasi perlunya Konstitusi baru maupun perlunya ia dirumuskan oleh orang-orang yang dipilih sebagai anggota suatu Dewan (Konvensi Konstituen), tanpa partisipasi dari anggota Kongres. Sekitar 50% dari pemilih terdaftar memberikan suara dalam proses tersebut, menorehkan tingkat partisipasi yang bersejarah lantaran kesukarelaan mereka dalam mengikutinya.

Pada saat ini, proses penyusunan konstitusi sedang berada di momen kunci, mengingat proses pemilihan mereka yang akan menjadi bagian dari perhimpunan konstituen akan dihelat pada 11 April¹. Penetapan komposisinya melibatkan serangkaian diskusi terkait kesetaraan gender dan partisipasi dari masyarakat adat, yang tak akan serta-merta ditetapkan lewat pemilihan umum melainkan dengan intervensi pemerintah dan lobi politik. Hal ini membutuhkan kesigapan konstan dari proses pengambilan keputusan kongresional. Kesigapan kolektif ini memperlihatkan pengambilalihan institutional lewat mana proses tersebut diambil, dan bahwa momen konstituen telah memperoleh pemaknaan politik yang baru: revitalisasi dari sistem kepartaian.

Kendati perlawanan bersangkutan memiliki nuansa anti-partai, difokuskan pada aksi massa, dan kritis terhadap sistem politik, pada akhirnya organ negaralah yang menyalurkan dan membentuk proses konstituen. Kekuatan independen dan para kandidatnya harus menghadapi serangkaian kesulitan dan ketidakadilan dibandingkan dengan para kandidat yang merupakan anggota dari partai politik, sebagaimana misalnya tercermin dalam halangan untuk mendaftarkan kandidat, pembiayaan, dan keikutsertaan di media. Hal ini telah menghalangi pengorganisasian dari kekuatan independen, yang sejak awal sudah tersebar dan terpecah belah.

Pandemi telah membatasi debat dan ruang pertemuan untuk diskusi dan elaborasi proposal-proposal. Ilmu-ilmu sosial sudah mempromosikan serangkaian refleksi dengan perspektif yang kritis dan reflektif dari proses ini, dengan sikap mengutuk dan kesadaran kolektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dsb., mengambil peran publik, meninggalkan habitus akademik dan membuka diri terhadap tantangan yang dihadapi. Namun, kebanyakan dari intervensi ini terbatas pada ruang virtual atau media tradisional berupa buku, artikel ilmiah dsb., yang telah menghalangi dampak serta ruang lingkup persebarannya. Akan tetapi, intervensi-intervensi tersebut telah menanamkan perasaan publik terkait hubungan di antara keterlibatan, ilmu(-ilmu), serta pengetahuan.

Bagian apa dari kerja ilmiah sosial Anda yang memainkan peran istimewa dalam pertikaian politik yang belakangan menandai Cile? Adakah area relevan atau persoalan dalam menggabungkan ilmu sosial yang terlibat dan kerja politik?

Kerja ilmiah saya menekankan pada penelitian tentang kerentanan kerja dan hidup. Saya telah mendedikasikan diri dalam menganalisis watak dari bekerja dan hidup di masyarakat Cile dan mempertimbangkan elemen kebudayaan, subyektif, ekonomi, serta teritorial yang hadir dalam persinggungan kekuasaan. Tujuan saya adalah mendirikan platform lokal-teritorial dengan organisasi sosial, lingkungan, dan serikat buruh, memobilisasi koneksi dengan jaringan penelitian global, serta memperkuat

persatuan dari komunitas ilmu sosial nasional dalam kajian-kajian perburuhan.

Lantaran saya telah menelusuri proses kerentanan sosial dan dunia kerja, saya dapat melihat bagaimana kerja, pekerjaan, dan pengangguran diidentifikasi sebagai situs yang penting bagi kondisi hidup orang-orang. Kualitas dari pekerjaan, gaji, otomatisasi, pendapatan, penggunaan platform serta kelemahan dari sistem hak sosial telah sangat menekan kehidupan orang-orang. Perasaan berhutang, pencarian kerja informal, atau lebih dari satu pekerjaan, merupakan bagian dari ketegangan antara harga diri dan kerentanan hidup. Banyak dari antara persoalan ini merupakan sebagian dari hal pokok yang hadir dalam pertikaian politik dan sosial di Chile, dan juga memperlihatkan kerentanan dari anak-anak muda, perempuan, migran, lanjut usia dsb.

Apakah ilmu sosial perlu mengambil tanggung jawab, khususnya ketika konflik mengemuka atau apakah ilmu pengetahuan bekerja dalam kerangka waktu yang berbeda, mungkin dalam jangka yang lebih panjang?

Terdapat beberapa orang dan kelompok kerja yang berusaha memperkuat jembatan antara ilmu sosial dan masyarakat, berusaha untuk mengasatmakan dan mempertegas pentingnya pengetahuan ilmiah dalam pengambilan keputusan, tindakan, serta deliberasi demokratis. Kesenjangan di antara dunia penelitian, ranah publik, dan, terutama, aktivitas gerakan sosial ini, merupakan hal yang perlu diatasi. Faktanya, banyak gerakan seperti gerakan feminis, lingkungan, dan lainnya sudah memberikan contoh dan menginspirasi kita tentang bagaimana artikulasi ini dimungkinkan.

Pada gilirannya, tanggung jawab ilmu-ilmu sosial justru menjadi semakin terang pada momen krisis. Konflik acap merupakan gejala dari krisis dan pada saat yang sama tanda-tanda perubahan. Proses ini kerap merupakan situs referensi dalam ilmu-ilmu sosial. Secara pribadi, praktik sosiologi saya adalah respons yang mendesak. Demikianlah perang yang dilancarkan kepada masyarakat, pemusnahan dan perentanan, sehingga saya harus bertindak dalam situasi saat ini juga, yang merupakan bagian dari kemungkinan temporalitas yang rentan, rawan, serta tidak pasti. Hal ini memiliki kontradiksi sertakses negatifnya, karena ia menghalangi gagasan mengenai masa depan (yang dapat mengerubungi keringnya utopia), tapi pada saat yang sama ia mengajarkan cara baru, lebih praktis serta aktif untuk menempa utopia dalam pengetahuan.

Apakah hasil penelitian Anda terpapar ke publik dan di luar ranah keilmuan, dan apakah aktor politik tertarik dengan hasil penelitian ilmu sosial?

Pengalaman saya memperlihatkan bahwa inilah kenyata-

annya. Namun saya percaya bahwa pertanyaan utamanya bukanlah bagaimana hasilnya dipersepsikan, melainkan adakah kerja untuk membangun jalur, jaringan, melalui mana pengetahuan dipertukarkan, didialogkan, dibagikan, dan diciptakan ulang. Terdapat komunikasi konstan dengan organisasi, asosiasi, serikat buruh, dsb. Kami berusaha untuk memobilisasi agenda penelitian kami dalam kaitan dengan persoalan yang kami tangkap dari kenyataan, didasarkan pada diagnosis yang berasal dari ruang dialog ini. Kami menyasar pendekatan yang harmonis terhadap tantangan keilmuan global serta persoalan publik di kawasan.

Beginilah proses bagaimana “Grupo de Estudios del Trabajo desde el Sur” (GETSUR) muncul. GETSUR merupakan platform lokal-teritorial, yang mengandalkan jaringan penelitian global serta berusaha untuk memperkuat ikatan organisasi sosial serta serikat buruh. Kami mempromosikan sinergi dan simbiosis dengan kebutuhan organisasi serikat buruh, yang bagi merekalah kami membuka perguruan tinggi, baik dalam hal infrastruktur dan logistik, maupun dalam hal kapasitas pengetahuan dan penelitian untuk menghadapi persoalan tertentu dalam pelatihan, informasi, dan/atau refleksi.

Perlawanan Oktober merupakan momen yang sangat berarti bagi ilmu-ilmu sosial. Sebagai ilmuwan kami menyaksikan kebangkitan kami sendiri, dan kemungkinan untuk hadir dan menjadi aktor dalam kebangkitan ini juga merupakan hal yang menyegarkan dan menghidupkan. Saya percaya bahwa konsep rentan dan kerentanan menawarkan satu dari antara berbagai kemungkinan yang memperkenankan kami berjalan dalam koridor ini.

Topik penelitian Anda adalah kerentanan, ketidakpastian pasar tenaga kerja, dan bagaimana keduanya berkontribusi terhadap reproduksi masyarakat. Namun, Anda juga berpartisipasi dalam proyek yang melibatkan lingkungan dan institusi pemerintahan Temuco dalam model daur ulang. Dapatkah Anda ceritakan sedikit kepada kami tentang pengalaman penelitian ini serta mengidentifikasi persoalan khusus dan tantangan dari penelitian sosiologis sejenis ini?

Tentu saja. Pengalaman-pengalaman ini muncul mengikuti jejak yang saya temukan seiring perjalanan, dan yang, di antara rasa penasaran, pedagogi serta kepekaan, mendorong saya untuk berkolaborasi dengan aktor lain di ruang lokal. Di antara pengalaman daur ulang, saya berkolaborasi dengan organisasi nonpemerintah Chile bernama Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), yang merupakan organisasi yang berkolaborasi dengan berbagai gerakan sosial, komunitas Mapuche, serta organisasi kewilayahan di kawasan La Arucanía dan Wallmapu. Mereka memiliki strategi dan rencana “No! Sampah” untuk manajemen serta pengendalian sampah di Kota Temuco, di mana mereka berhasil menawarkan proyek perlindungan lingkungan pada 2017 untuk didanai.



Kami memulai pengalaman ini mengikuti penutupan pada Desember 2016 dari tempat pembuangan sampah kota yang sudah beroperasi sejak 1992. Tempat pembuangan sampah tersebut telah runtuh dan mencemari air tanah di seputar kawasan. Tempat pembuangan sampah ini berada di tengah-tengah 22 komunitas Mapuche di bagian barat kota. Konsekuensinya bagi kesehatan orang-orang yang hidup di sekitarnya sudah dikonfirmasi oleh beberapa investigasi, dan pemerintah mengalokasikan dana ke sektor publik dan infrastruktur sebagai solusi untuk mengalihkan kesalahan atas konsekuensi dari bencana lingkungan ini. Pencemaran ini mempengaruhi ekonomi setempat, kondisi kehidupan serta lingkungan. Namun, dalam kerentanan ini banyak orang yang melihat tempat pembuangan sampah bersangkutan sebagai kesempatan untuk mencari nafkah dengan mendaur ulang dan menjual sampah.

Inilah awal mula bagaimana pada 2016 kami menggalang pendaur ulang informal, pemulung sampah di tempat pembuangan sampah ini. Sebelum penutupan tempat pembuangan sampah ini, saya berkolaborasi dalam pembentukan serikat pendaur ulang bersama dengan RADA. Serikat ini memiliki 62 anggota. Beberapa merupakan orang-orang Mapuche dari sektor bersangkutan, yang lainnya merupakan orang-orang dari distrik miskin Temuco. Kebanyakan dari mereka melihatnya sebagai pekerjaan keluarga. Dalam tugas ini saya didampingi oleh seorang mahasiswa sosiologi yang melakukan penelitian tentang proses penutupan dan pengembangan alternatif ekonomi dari daur ulang. Ketika kami dihadapkan dengan proposal serikat untuk mencari dan membentuk ruang ekonomi untuk bertahan hidup, kami memikirkan proposal perlindungan lingkungan dengan cara yang ekologis.

Dalam pandangan Anda, bagaimana kedua area penelitian tersebut—kerentanan dan inisiatif lingkungan lokal—bertautan satu sama lain?

Saya kira bagaimana mereka bertautan dapat dicontohkan dengan pengalaman yang baru saja saya ceritakan. Dalam pengalaman ini, kami mulai mengerjakan titik persinggungan pertama dari dua hal ini: kerentanan dari para pendaur ulang dalam kerja keseharian mereka dan kere-

ntan penduduk Mapuche yang bekerja di sektor ini dan menghadapi rasisme lingkungan di tempat pembuangan sampah. Kedua tipe kerentanan ini bersangkutan paut dengan cara memahami pembangunan, masyarakat, kerja, alam, dan kehidupan. Mereka hadir dalam sebuah konflik: tempat pembuangan sampah, pembangunannya, operasinya, serta penutupannya.

Sampah-sampahnya, sebagai produk dari suatu masyarakat yang terpusat pada konsumsi dan sebagai materialitas dari ketidaksinambungan ekologis, memperlihatkan kepada kita bagaimana kerentanan berlipatganda di sekitarnya. Pekerja yang hidup dari sampah. Orang-orang siap makan atau mencari makan dari sampah. Kemiskinan ekstrem dan pengabaian sosial. Inilah mengapa sebelum penutupan tempat pembuangan sampah, informalitas pekerjaan yang sejak lama ada dalam aktivitas daur ulang menjadi zona baru penyingkiran sosial, di mana semakin sulit untuk mengembangkan strategi bertahan hidup dan mencari nafkah. Pembentukan serikat buruh bukanlah jaminan kekuatan politik karena kerangka institusional menyebabkan kerawanan organisasi pekerja, namun pada saat yang sama memungkinkan kita untuk membayangkan tokoh asosiatif untuk merumuskan jalan keluar.

Serangkaian krisis mengancam eksistensi manusia dan karenanya penggandaan, bukan hanya risiko, melainkan juga kerentanan dari kehidupan. Saya percaya bahwa pertikaian politik saat ini telah menghadapkan kita kepada kemawasan politik, khususnya gerakan pengetahuan feminis, ekologis dan dekolonial, yang mengundang kita untuk memikirkan ulang rasa kemendesakan, krisis, dan komitmen di hadapan kapitalisme yang tamak, rakus, dan perang. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Dasten Julián <dasten@gmail.com>

1. Pemilihan ini diundur terkait pandemi. Ajang ini akan dilihat pada 15 dan 16 Mei 2021.

› COVID-19 dan Ketidaksetaraan Global

oleh **Karin Fischer**, Universitas Johannes Kepler, Austria

“COVID-19 adalah tantangan global. Namun, semakin membesar tantangannya, cakrawalanya menjadi semakin terbatas pada perspektif nasionalistis atau bahkan lebih sempit.”

Virus korona tidak mengecualikan siapa pun dan tidak mengenal batas negara. Menurut Program Pembangunan PBB, indeks pembangunan manusia—gabungan dari pengukuran taraf pendidikan, kesehatan, dan standar hidup—sedang menukik turun untuk pertama kalinya sejak tahun 1990. Penurunan ini diperkirakan terjadi di sebagian besar negara—baik negara kaya maupun miskin—di seluruh dunia.

Pengamatan ini tidak bermaksud memantikkan “imajinasi kesetaraan.” COVID-19 menguak tabir bahwa kita tidak semua duduk di kapal yang sama. “Saat kita semua mengarungi laut yang sama, jelas bahwa beberapa berada di kapal pesiar super, sementara yang lain terombang-ambing di puing-puing yang hanyut,” sebagaimana yang diungkapkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Pandemi telah mengungkap dan memperlebar ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan, gender dan ras yang ada—baik dalam batas-batas negara, maupun secara drastis dalam skala global.

Dampak pandemi yang sangat tidak setara dapat diamati di banyak skala, mulai dari rumah tangga hingga tingkat sub-nasional dan negara. Sumbangan dalam seksi khusus ini berfokus pada lebarnya perspektif ketidaksetaraan—antara lain kesenjangan antara Utara-Selatan. Terdapat tiga tema subjek ketidaksetaraan yang mengakar di antara negara kaya dan miskin: akses yang tidak setara pada vaksin, terapi, dan teknologi COVID-19; ketimpangan beban utang negara dengan berbagai institusi ke-

uangan global; dan ketidaksetaraan paparan perubahan iklim.

Artikel pertama oleh Kajal Bhardwaj menjelaskan Perjanjian TRIPS dari rezim perdagangan dunia yang menempatkan nilai lebih tinggi pada hak kekayaan intelektual dan keuntungan pribadi daripada hak asasi manusia atas kesehatan. Hak monopoli perusahaan memacu apa yang semakin dipandang sebagai “apartheid vaksin” atau “imperialisme vaksin”: perebutan vaksin COVID-19 yang tidak setara, tidak adil, dan meresahkan. Dalam kontribusinya, Camila Gianella mengunjungi Peru sebagai salah satu lokus pertempuran pengadaan vaksinasi global yang tidak setara. Pfizer menempatkan negara asal Gianella ini di bagian paling bawah daftar pasokan setelah tidak menerima beberapa klausul perjanjian pembelian vaksin—walaupun Peru adalah negara dengan tingkat kematian COVID-19 tertinggi di Amerika Latin.

Pandemi dan rangkaian resesi global yang diakibatkannya mendorong negara-negara ke dalam perangkap utang. Hal ini bukan masalah negara miskin saja. Menurut Global Sovereign Debt Monitor 2021, 132 dari 148 negara yang disurvei di Selatan Global terjerat utang cukup kritis. Christina Laskaridis menunjukkan geografi utang negara yang tidak setara dalam pandemi COVID-19. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tentang utang adalah permainan kekuatan global dengan dampak besar pada kondisi kehidupan. Luckystar Miyandazi menambahkan geografi profit global yang tidak merata ini: Aliran keuangan terlarang diambil dari negara-negara termiskin

di dunia dan berakhir di kantong-kantong individu, “mitra” dagang, markas besar perusahaan transnasional, dan surga pajak di Utara Global. Tiap tahun, Afrika kehilangan sebesar hampir sejumlah gabungan total arus masuk tahunan program bantuan pembangunan dan investasi asing, tulisnya. Itu berarti bahwa negara-negara ini tidak memiliki ruang fiskal untuk menuangkan uang tunai ke ekonomi mereka atau membiayai program perlindungan sosial khusus dalam menanggapi pandemi COVID-19. Kewajiban pembayaran utang dan arus keluar keuangan terlarang akan semakin mencekik ekonomi mereka dan menghambat pembangunan jangka panjang, seperti yang ditunjukkannya dengan contoh Zambia.

Yang terakhir, tapi tidak kalah penting, E. Venkat Ramnaya dan Viha Emandi menarik perhatian pada apa yang mereka sebut “bencana kembar,” karena virus korona dan kerentanan ekologi tumbuh secara eksponensial di beberapa wilayah di India. Mereka menunjukkan bahwa dampak sosial dan ekonomi

dari pandemi ini semakin diperburuk oleh bencana ekologis seperti masalah ketersediaan air bersih, banjir, atau angin topan. Sekali lagi, konsekuensi dari bencana lingkungan tidak merata dan terutama mempengaruhi mereka yang sudah menderita secara tidak proporsional dari pandemi.

COVID-19 adalah tantangan global. Namun, semakin dekat masalahnya dan semakin besar tantangannya, nampaknya semakin sempit pula cakupannya, menjadi perspektif nasionalistis atau bahkan lebih sempit lagi. Seruan para kontributor: Tidak seorangpun aman, sampai semua orang aman!

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Karin Fischer <Karin.fischer@jku.at>

› Dahulukan Rakyat ketimbang Laba: Seruan dalam penanggulangan COVID-19

oleh **Kajal Bhardwaj**, praktisi hukum, New Delhi



Kampanye proyeksi Global Justice Now dan The People's Vaccine untuk kesetaraan vaksin global di kantor Asosiasi Industri Farmasi Inggris, Westminster, London, 2021.
Kredit: Flickr: [Jess Hurd/Global Justice Now](#).

Pada tahun 2001 Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO) menghadapi dampak dari kewajiban penerapan kekayaan intelektual (*intellectual property*, IP) yang tercantum dalam perjanjian multilateralnya, yaitu Perjanjian TRIPS (TRIPS Agreement) mengenai upaya global untuk menanggulangi pandemi HIV. Pada waktu itu perusahaan-perusahaan farmasi multinasional menuntut Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang membuat ketentuan hukum untuk mengizinkan impor pengobatan generik HIV yang terjangkau. Perusahaan-perusahaan tersebut, yang merupakan pemegang hak paten atas pengobatan tersebut, menetapkan harga puluhan ribu dolar untuk obat-obatnya padahal obat generik HIV hanya seharga satu dolar per hari. Perusahaan-perusahaan tersebut menuduh bahwa tindakan-tindakan Afrika Selatan melanggar perjanjian TRIPS. Kemarahan global terhadap perusahaan-perusahaan farmasi yang telah mengangkat kasus tersebut berujung pada diterimanya Deklarasi Doha mengenai TRIPS dan Kesehatan Masyarakat (the Doha Declaration on TRIPS and Public Health) oleh semua anggota WTO. Perjanjian ini menegaskan bahwa negara-negara berhak menafsirkan Perjanjian TRIPS untuk mendukung hak mereka dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin akses obat bagi semua orang.

› COVID-19 dan hambatan TRIPS

Dua puluh tahun kemudian, ketika terjadi pandemi lain, COVID-19, dua per tiga dari anggota WTO menuntut agar kewajiban IP yang didasarkan pada Perjanjian TRIPS dikesampingkan. Keluwesan TRIPS yang dititikberatkan oleh Deklarasi Doha—lisensi wajib, impor pa-

ralel, atau standar paten yang ketat—dianggap telah membantu negara-negara untuk mengakses pengobatan HIV, Hepatitis C, kanker dan penyakit jantung yang terjangkau. Tetapi usulan yang diajukan saat ini oleh India dan Afrika Selatan berpendapat bahwa suatu penyakit menular yang bergerak dan bermutasi dengan cepat seperti COVID-19 menuntut dikesampingkannya secara penuh hambatan-hambatan IP agar negara-negara dan para pesaingnya bebas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan produksi teknologi kesehatan COVID-19—tanpa membuang waktu dengan perundingan lisensi yang kompleks, tanpa kekhawatiran atas tuntutan hukum bernilai jutaan dolar terhadap pelanggaran IP, dan tanpa kekhawatiran terhadap tekanan-tekanan perdagangan dari negara-negara kaya.

Negara-negara kaya, sebagaimana dapat diduga, berpendapat bahwa IP tidak menciptakan hambatan. Tetapi perjalanan satu tahun pandemi yang suram memberikan bukti sebaliknya. Bahkan di kala perhatian global tertuju pada apa yang semakin dipandang sebagai “apartheid vaksin” dalam perebutan vaksin COVID-19 yang tidak setara, tidak adil dan mengejutkan tersebut, ketidakadilan ini telah tampak sejak awal dalam memperoleh akses terhadap masker, diagnosis, peralatan, dan pengobatan.

Bagi publik yang lebih luas, kesadaran mengenai daya jangkau dan kekuatan dari perlindungan IP ini dirasakan ketika muncul berita bahwa para peneliti Italia yang sedang membuat cetakan 3D dari katup-katup ventilator dapat menghadapi tuntutan dari para pemegang IP. Seorang senator AS meminta 3M, suatu perusahaan yang memegang ratusan hak paten atas disain-disain masker yang dipertahankannya secara agresif, untuk melepaskan hak paten-patennya guna meningkatkan persediaan. Ancaman tuntutan hukum memaksa perusahaan farmasi Roche untuk mengungkapkan resepnya yang dipakai untuk melalui tes-tes COVID-19 yang dilaksanakannya di Belanda. Tes-tes COVID-19 oleh Cepheid selama 45 menit seharga USD 19,80 dapat diturunkan harganya menjadi USD 5 dan telah menuai kecaman dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. Perusahaan AS MNC Gilead menjual obat anti-virus Remdesivir dengan harga USD 2.340. Segelintir pemegang izinnya yang menyediakan bagi sejumlah kecil negara yang sedang berkembang memasang harga USD 320. Tetapi para peneliti di Universitas Liverpool memperkirakan bahwa dengan produksi massa harganya mungkin bisa kurang dari USD 6.

Di kala negara-negara kaya tiap detik melakukan vaksinasi terhadap setiap orang, sebagian besar negara-negara termiskin belum menjalankan vaksinasi terhadap seorangpun. Di Selatan Global dijumpai kapasitas

besar untuk manufaktur vaksin, namun bertebarannya ranjau perlindungan IP termasuk paten, rahasia dagang, dan eksklusivitas data menjadi penghambat. Data dari Kantor Paten Eropa menunjukkan adanya ratusan paten yang terkait dengan vaksin virus korona. Kajian-kajian mengindikasikan bahwa ruang lingkup paten vaksin cenderung sangat luas, mencakup bahan-bahan baku, teknologi proses, kelompok usia, dan tata cara dosis. Perlindungan rahasia dagang memungkinkan para produsen untuk menyembunyikan tata cara yang dapat membantu para perusahaan manufaktur lain untuk meningkatkan produksi dengan cepat, sedangkan eksklusivitas data dan pasar mungkin dapat menciptakan hambatan selanjutnya dalam pendaftarannya

› **Melebarnya kesenjangan pengobatan Utara-Selatan**

Vaksin Oxford-AstraZeneca seharusnya tersedia bagi produksi massal vaksin berdasarkan ikrar semula dari Universitas Oxford untuk lisensi IP non-eksklusif bagi teknologi COVID-19 mereka. Namun, alih-alih demikian, sebuah kesepakatan eksklusif dijalin dengan AstraZeneca, yang mengarah pada sub-lisensi rahasia dengan beberapa perusahaan manufaktur. Kapasitas produksi jelas tidak memadai ketika dosis-dosis dari India menetes ke beberapa negara yang sedang berkembang. Dan janji untuk menentukan harga nirlaba tidak ditepati karena negara-negara yang lebih miskin dilaporkan membayar antara USD 3 dan USD 8 per dosis.

Yang menarik, negara-negara kaya seperti Prancis, Jerman, dan Kanada termasuk di antara negara-negara pertama yang menerima ketentuan-ketentuan hukum untuk memfasilitasi lisensi wajib bagi COVID-19. Israel mengeluarkan suatu lisensi wajib bagi anti-virus Lopinavir/Ritonavir. Hongaria dan Rusia mengeluarkan lisensi wajib bagi Remdesivir. Tindakan pemerintah untuk mengesampingkan hambatan-hambatan sering mengakibatkan perusahaan-perusahaan untuk memodifikasi perilaku mereka untuk mengejar keuntungan yang terkait IP. Lisensi wajib Israel mengakibatkan AbbVie mengumumkan bahwa secara global mereka tidak akan menegakkan lagi paten mereka atas Lopinavir/Ritonavir. Kelompok-kelompok pasien di India, Thailand dan Argentina telah mengajukan tantangan terhadap paten atas Remdesivir and Favipiravir. Sebuah perusahaan manufaktur Kanada telah secara publik mengusahakan lisensi bagi vaksin Johnson & Johnson dan mungkin akan mengupayakan suatu lisensi wajib.

Negara-negara kaya telah mengucurkan sejumlah besar dana publik untuk pengembangan vaksin, tes, dan pengobatan COVID-19. Namun mereka membayar har-

ga yang mahal dan menghadapi gangguan persediaan. Alih-alih menggunakan langkah-langkah hukum untuk mengesampingkan hambatan IP, membuka diri untuk berbagi pengetahuan, dan meningkatkan produksi, mereka justru memborong persediaan yang ada dan memperkuat pembatasan ekspor. Lebih buruk lagi, tidak ada keharusan bagi perusahaan-perusahaan untuk bertindak transparan bagi kapasitas produksi mereka, harga-harga mereka, atau perjanjian-perjanjian mereka. Beberapa perundingan dikabarkan memuat tuntutan agar negara-negara memberikan ganti rugi kepada perusahaan-perusahaan karena memberikan reaksi yang merugikan, atau menjadikan aset negara seperti kedutaan besar sebagai jaminan. Di kala perusahaan-perusahaan mengabaikan mekanisme sukarela dengan cara menolak terlibat dengan akses teknologi WHO atau dengan tidak memprioritaskan persediaan bagi fasilitas Cofax yang ditujukan untuk pendistribusian vaksin COVID-19 secara adil, asosiasi-asosiasi farmasi justru meningkatkan lobi mereka melawan pemerintah-pemerintah dan badan-badan PBB yang berusaha mengatasi hambatan-hambatan IP. WHO dan badan-badan PBB telah secara vokal memberikan dukungan bagi dikesampingkannya TRIPS. Tetapi sekretariat WTO dengan tegas menolak untuk bertindak, dengan jalan secara gigih terus mendorong dilakukannya pendekatan-pendekatan sukarela. Namun walaupun posisi-posisi ini nampak semakin

mengakar, pada tanggal 5 Maret 2021, setelah adanya kampanye selama berbulan-bulan oleh para aktivis yang mendukung dikesampingkannya TRIPS, perwakilan Perdagangan AS secara mengejutkan mengumumkan untuk mendukung dikesampingkannya TRIPS walaupun terbatas pada vaksin COVID-19.

Walaupun tindakan AS tersebut semakin mendorong perundingan ke arah dikesampingkannya TRIPS, apa yang terlihat adalah bahwa tahun lalu kita telah membuang waktu dengan menunggu agar perusahaan-perusahaan mau menempuh langkah yang benar. Seruan bagi adanya “vaksin rakyat” (*people’s vaccine*) semakin keras. Di kala varian-varian baru bermunculan, negara-negara seperti negara saya secara berturut-turut diterpa gelombang demi gelombang yang meluluh-lantakkan, dan maut serta penyakit berkepanjangan karena COVID-19 menggerus para pasien, keluarga dan sistem-sistem kesehatan, kita tidak dapat membuang waktu lagi dengan mengarang peraturan-peraturan perdagangan yang kompleks yang lebih mengutamakan laba ketimbang rakyat. Dikesampingkannya TRIPS merupakan langkah pertama yang diperlukan agar dapat membuka jalan ke arah terjaminnya akses ke semua teknologi kesehatan COVID-19 bagi setiap orang di manapun mereka berada. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Kajal Bhardwaj <k0b0@yahoo.com>

› Vaksin COVID-19: Mengungkap Ketidaksetaraan Global

oleh **Camila Gianella**, Pontificia Universidad Católica del Perú-Cisepa, Peru



Distribusi vaksin mengikuti pola tidak setara yang sama seperti ketidaksetaraan global sebelum pandemi.

Kredit: FrankyDeMeyer /Getty Images/iStockphoto.

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan bencana ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Namun suatu pesan berbahaya yang muncul dari krisis global ini ialah bahwa kita menghadapi krisis yang sama di mana-mana (kita berada di sekoci yang sama), seakan-akan suatu pembatasan (*lockdown*) di Bergen, Norwegia, sama dengan menghadapi pembatasan di Lima, Peru; atau menghadapi pembatasan di suatu lingkungan hunian kaya di Lima sama dengan keharusan menghadapi tantangan besar pembatasan bagi keluarga-keluarga yang hidup di daerah kumuh di kota yang sama.

Penggambaran yang menyamaratakan ini telah memungkinkan terjadinya ketidaksetaraan dalam distribusi vaksin

COVID-19, meskipun [ada himbauan](#) untuk jaminan bagi akses setara di antara negara-negara. Kenyataannya ialah bahwa negara-negara kaya memenangkan lomba; mereka adalah yang pertama yang memiliki kapasitas untuk membeli vaksin dan, sebagai konsekuensinya, memulai vaksinasi penduduk mereka. Meskipun benar bahwa beberapa negara kaya [seperti Norwegia](#) telah berkomitmen untuk berbagi dosis vaksin dengan negara-negara lebih miskin, namun pada Januari 2021 akses ke vaksin ditentukan oleh kekayaan suatu negara

› **Privatisasi rezim inovasi obat**

Situasi yang kita hadapi dalam hal akses ke vaksin di seluruh dunia tidak (hanya) ditentukan oleh kekikiran negara-negara tertentu melainkan mencerminkan suatu rezim inovasi obat global yang bermasalah. Negara-negara kaya telah mengalokasikan dana publik untuk pengembangan vaksin. Bahkan dalam kasus Pfizer, yang telah menolak diikutsertakannya dana publik dalam pengembangan vaksinnya, [laporan-laporan](#) menunjukkan perusahaan-perusahaan mitranya, yang telah ikut serta mengembangkan vaksinnya, telah menerima dana publik. Keikutsertaan negara-negara kaya dalam pengembangan vaksin memungkinkan mereka untuk meminta “harga yang pantas”, tetapi tidak menolak hak perusahaan-perusahaan swasta untuk memperoleh laba dari vaksin. Sebagai konsekuensinya, dengan peraturan yang kini berlaku, dan walaupun terdapat kebutuhan mendesak untuk vaksinasi penduduk Afrika Selatan untuk menghentikan penyebaran penyakit tersebut serta varian-varian yang baru, Afrika Selatan telah diharuskan untuk [membayar ongkos hampir 2,5 kali lipat](#) lebih [mahal] ketimbang yang harus ditanggung oleh kebanyakan negara Eropa untuk harga dosis vaksin COVID-19 Oxford-AstraZeneca.

Partisipasi dana publik tidak menghalangi perusahaan manufaktur vaksin swasta untuk meminta klausul kerahasiaan usaha (*confidentiality clause*) dalam perjanjian maupun perubahan hukum untuk melindungi mereka dari tuntutan hukum bilamana suntikan COVID-19 mereka menyebabkan efek samping yang tak terduga. Kebutuhan vaksin dan ketiadaan kepemimpinan global untuk menerapkan beberapa persyaratan minimum terhadap perdagangan vaksin COVID-19 telah memberikan kekuasaan luar biasa kepada perusahaan manufaktur vaksin. Mereka menunda atau menghambat negosiasi dengan

negara-negara yang memerlukan vaksin, sehingga dengan demikian menunda akses terhadap vaksin dan pada akhirnya berkontribusi pada kematian yang lebih banyak dan perkembangan (dan penyebaran) varian-varian virus baru.

Suatu contoh ialah Peru dan keagalannya dalam bernegosiasi dengan Pfizer. Peru termasuk negara-negara dengan insidens dan mortalitas COVID-19 tertinggi di Amerika Latin, dan Karibia maupun di seluruh dunia. Pada bulan Januari 2021, di kala negara tersebut sedang mengalami awal gelombang kedua, sistem kesehatannya telah runtuh. Pada tahun 2020 Pemerintah Peru telah memulai negosiasi dengan Pfizer, tetapi menolak untuk menerima beberapa di antara klausul-klausul yang diterapkan oleh perusahaan tersebut yang menyangkut ketiadaan tanggung jawab (*non-liability*). Sebagai akibatnya, Pfizer menempatkan Peru di bagian terbawah daftar walaupun COVID-19 membawa dampak bencana bagi negara tersebut. Seperti pada kasus Afrika Selatan dan masalah harga vaksinnya, impunitas total telah dijalankan; para perusahaan manufaktur vaksin menerapkan aturan-aturan dan memutuskan siapa yang memperoleh akses dan dengan harga berapa, di tengah-tengah keadaan darurat global.

› **Akses terhadap vaksin dan hak atas kesehatan**

Akses terhadap obat-obat seperti vaksin merupakan salah satu elemen fundamental untuk mewujudkan secara penuh hak tiap orang memperoleh standar tertinggi dalam kesehatan fisik dan mental. Inovasi obat dan akses terhadap inovasi tersebut merupakan suatu elemen kunci dari akses terhadap obat-obat, dan, sebagai konsekuensinya, hukum serta regulasi yang mengatur akses terhadap inovasi obat merupakan elemen sentral dari kebijakan kesehatan negara. Pandemi COVID-19 telah menyingkapkan ketiadaan kepemimpinan global dan kelemahan dari negara-negara dalam menerapkan persyaratan terhadap para perusahaan manufaktur barang-barang berharga, maupun batas-batas dari skema inovasi obat yang berlaku. Alokasi dana publik kepada perusahaan-perusahaan swasta jelas tidak cukup untuk dapat menjamin akses universal ke obat. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Camila Gianella <gianella.c@puccp.edu.pe>

› Melanggengkan Kesenjangan Antara Kreditur dan Debitur

oleh **Christina Laskaridis**, The Open University, Inggris



| Ilustrasi oleh Arbu.

Negara-negara kaya memerangi kemerosotan ekonomi melalui pengeluaran yang dibiayai utang dan stimulus ekonomi, sementara negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di Selatan Global terjebak dalam perangkap utang yang membentang. Warisan kolonialisme dan geografi masa lalu dari utang pemerintah pusat (*sovereign debt*) di Selatan Global menjadi lebih kuat di masa COVID akibat pendekatan jangka panjang untuk pinjaman internasional yang mendorong kepentingan kreditur atas keringanan utang.

› Ketidaksetaraan Utara-Selatan dan keuangan utang global

David Graeber termasuk di antara mereka yang mengungkapkan bagaimana utang efektif untuk menutupi hubungan historis dari ketergantungan dan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Menurut pendapatnya, kejadian berulang kali telah memperlihatkan bahwa hubungan kekerasan yang dibingkai ulang dalam bahasa utang memiliki efek langsung yang menempatkan pihak yang lebih lemah sebagai pihak yang bersalah. Pinjaman internasional adalah bagian dari proyek kolonial, dan kesulitan pembayaran utang menghasilkan konflik antara kreditur dan debitur yang mengakibatkan mekanisme pengawasan asing secara langsung dan campur tangan militer, tetapi jarang debitur berhasil menagguhkan pembayaran dan mencegah penagihan utang. Belum lama berselang, ketidaksetaraan global dalam utang internasional telah dipelajari melalui kaca mata neo-kolonialisme dan fi-

nansialisasi. Finansialisasi subordinat mencirikan hubungan utang yang tidak setara, dengan kendala struktural terhadap pembangunan yang ditimbulkan oleh posisi subordinat terhadap (*vis-à-vis*) pihak lain yang berkedudukan lebih kokoh.

Salah satu aspek dari masalah ini berkaitan dengan sistem moneter dan finansial internasional. Sesuai dengan sikap Keynes, yang kemudian dianut oleh banyak orang pasca-Keynesian, preferensi likuiditas mengungkap adanya hirarki dalam aset finansial yang menjadi tampak paling jelas dalam ekonomi internasional selama berada dalam kondisi ketidakpastian dan ketidakstabilan. Peringatan akan terjadinya perangkap utang meningkat menjelang awal pandemi. Kebijakan moneter longgar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di AS, yang lahir dari respons terhadap krisis di Utara global yang menyertai langkah-langkah tindakan perusahaan-perusahaan finansial, menciptakan lonjakan pada likuiditas global dengan efek-efek kumulatif terhadap krisis utang di saat ini. Hal ini mengarah pada pencarian-keuntungan investasi global di seluruh dunia berkembang yang menyebabkan perubahan lanskap kreditur bagi banyak negara berpenghasilan menengah ke bawah, dengan akses dan biaya finansial yang sangat tidak setara untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini dibangun dengan kerentanan struktural terhadap “risiko pasar” di mana kemampuan suatu negara untuk membiayai dan membiayai-ulang dirinya menjadi sangat tergantung pada faktor-faktor di luar kendalinya yang menambah kekhawatiran jangka panjang terhadap ketidakseimbangan (*volatility*) devisa yang timbul dari ketergantungan komoditas.

Masalah pembayaran utang lebih disebabkan oleh kendala pembangunan dan struktur produksi global, yang merupakan produk dari masa lalu kolonial, ketimbang penjelasan yang sering terdengar tentang kesalahan pengelolaan finansial publik domestik. Aspek lain dari hal ini berkaitan dengan kegagalan kelembagaan yang telah berakar tentang caranya penanganan krisis utang. Ketika masalah pembayaran utang muncul, negara-negara menghadapi beraneka ragam forum kreditur, lingkungan hukum yang berbeda, pengucilan dari pasar modal, dan proses hukum kreditor berisiko, seraya dipaksa untuk meninggalkan rencana pembangunan. Hal ini sering terjadi bersamaan dengan program-program IMF yang mengalami kontraksi yang gagal memberikan solusi yang adil dan berjangka panjang untuk masalah utang, sehingga melemahkan kemampuan negara untuk melindungi kelompok penduduk yang rentan. Seperti yang diakui secara luas, krisis utang ditangani dengan cara-cara yang “serba terlalu sedikit, terlambat,” sehingga sering gagal untuk membangun kembali keberlanjutan utang, dan dengan biaya sosial yang besar bagi negara debitur.

› Dampak COVID-19 terhadap utang

Dengan dimulainya pandemi, ketidaksetaraan jangka panjang dalam ekonomi global menjadi terungkap dan diperparah. Di samping gangguan terhadap perdagangan yang diandalkan negara sebagai sumber devisa, dan penurunan harga komoditas utama yang ditentukan di pasar finansial, pembalikan aliran modal pada musim semi 2020 adalah yang terbesar yang pernah tercatat. Hal ini menyebabkan penurunan nilai mata uang negara, yang membuat beban pembayaran utang dengan valuta asing menjadi lebih besar. Kurangnya akses ke valuta asing yang stabil (*hard currency*) selama krisis mencerminkan integrasi yang tidak setara dan posisi subordinat dalam ekonomi internasional dan menciptakan kemampuan yang tidak setara untuk merespons. Meskipun hal ini nampak paling jelas dalam skala yang sangat berbeda dari langkah-langkah dukungan fiskal di seluruh kelompok pendapatan, akses asimetris ke likuiditas yang diperlukan diperkuat oleh tindakan yang diambil oleh aktor yang kuat.

Hanya beberapa negara terbesar yang memiliki akses ke garis swap dolar yang diperbesar yang diresmikan oleh Bank Federal Reserve AS, dan pengaturan pembiayaan regional sebagian besar tidak aktif, sehingga respons kebijakan utama terhadap masalah utang global diserahkan kepada G20 dan Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, terlepas dari estimasi \$ 2,5 triliun yang diperlukan dalam pembiayaan tanpa syarat dan bebas utang, bersama dengan perkiraan pembatalan utang \$ 1 triliun di seluruh kelompok pendapatan, dan perombakan arsitektur utang yang lama tertunda, respon tersebut telah mengandalkan pada peningkatan akses kepada pinjaman-pinjaman yang mahal di seluruh wilayah dan kelompok pendapatan, serta seringkali kepada negara-negara yang sudah menghadapi kesulitan pembayaran utang. Beberapa di antara negara-negara ini sudah menghabiskan sejumlah pendapatan publik untuk layanan utang yang jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan untuk perawatan kesehatan. Pinjaman IMF dan penundaan sementara layanan utang bilateral melalui Debt Service Suspension Initiative (DSSI), yang dibentuk oleh G20 pada bulan April 2020, memperburuk masalah utang yang ada dan diramalkan akan mengarah pada

penghematan anggaran selama bertahun-tahun di masa depan, sementara secara tidak langsung memungkinkan kreditor swasta dan multilateral yang tidak berpartisipasi untuk mendapatkan pembayaran kembali. Aspek sukarela dari DSSI berarti bahwa keringanan layanan utang bersifat parsial, dan menguntungkan bagi kreditor yang tidak berpartisipasi, dan pembayaran dengan persyaratan yang mahal dan jauh lebih sedikit daripada yang diperlukan. Kerangka Kerja Umum yang didirikan pada November 2020 untuk mengatasi restrukturisasi mencerminkan kegagalan kelembagaan yang sudah diketahui ini.

› Arsitektur utang internasional yang miring

Pandemi ini menyoroti ketidakmampuan arsitektur utang internasional yang ada yang sudah sejak lama diketahui, untuk mengelola keseluruhan kreditur, mencegah masalah tindakan kolektif, memastikan ekuitas antar-kreditor, dan yang paling penting, memastikan bahwa kesulitan pembayaran utang ditangani dengan cepat, transparan, independen, dan komprehensif dengan cara yang meminimalkan dampak pada penduduk-penduduk di negara-negara dalam krisis utang. Penting untuk diingat kembali bahwa pendekatan yang ada adalah hasil dari upaya terus-menerus oleh kreditor untuk mengelola krisis utang sesuai dengan kepentingan mereka, dengan berulang kali menolak usulan dan upaya untuk mengatasinya dengan cara yang diusulkan oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Elemen inti dari sistem ini adalah Bank Dunia dan program penghematan IMF yang sering mengakibatkan dampak negatif pada hak asasi manusia serta mengandalkan proses persetujuan pinjaman yang menggunakan label utang yang “berkelanjutan,” memperparah beban utang, meremehkan besarnya skala masalah, dan mengabaikan bantuan yang diperlukan. Sementara itu, ketika lonceng stimulus terus berdentang dengan keras di negara-negara berpenghasilan tinggi tertentu, respon terhadap masalah utang global didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan akan bangkit kembali ke tingkat pra-pandemi dan bahwa negara-negara akan merangkul pandemi penghematan fiskal setelah pengeluaran yang defisit selama transisi, meninggalkan investasi dan pengeluaran sosial yang dibutuhkan untuk membatasi pengeluaran pemerintah.

Kita tahu bahwa persyaratan dan penghematan IMF memperburuk prospek pertumbuhan, memiliki dampak yang menghancurkan kesehatan, ketidaksetaraan, dan kemiskinan, dan rekam jejak yang buruk tentang pembayaran utang. Meskipun ini mereproduksi infrastruktur sosial-ekonomi yang lemah dan kurang mendapat pendanaan, hal tersebut juga memperkuat kurangnya legitimasi yang dihadapi lembaga-lembaga ini. Respon tersebut telah terbukti sekali lagi bahwa proses-proses kelembagaan memperkuat elemen-elemen historis untuk berintegrasi dalam ekonomi internasional. Proses persetujuan pinjaman adalah gejala dari kekuatan yang timpang antara debitur dan kreditor, yang menyoroti politik pengetahuan tentang siapa yang memutuskan apa yang bisa dan tidak dapat dibayar. Hal ini memungkinkan kreditor untuk lebih memprioritaskan biaya restrukturisasi utang daripada merestrukturisasi utang untuk meringankan situasi debitur. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Christina Laskaridis <christina.laskaridis@open.ac.uk>

› Tantangan Mengurangi

Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Afrika

oleh **Luckystar Miyandazi**, Program Spesialis, Pengawas Pajak Non-Perbatasan, dan Koordinator untuk Afrika, Pusat Sektor Keuangan Afrika UNDP, Afrika Selatan

Sebelum pandemi penyakit virus korona melanda dunia pada Maret 2020, ketidaksetaraan global yang diukur dengan sebagian besar indikator telah meningkat selama beberapa dekade. Pandemi COVID-19 dan konsekuensinya yang belum pernah terjadi sebelumnya di hampir semua bidang kehidupan seperti yang kita ketahui hanya semakin memperburuk aspek multidimensi ketidaksetaraan ini karena berbagai perbedaan kebangsaan, usia, jenis kelamin, ras, asal kebangsaan atau etnis, agama, status ekonomi. dan dimensi-dimensi lainnya.

› Kemunduran dalam kemiskinan dan ketidaksetaraan

Meskipun prevalensi dan tingkat kematian COVID-19 masih rendah di Afrika, benua itu kini ditantang untuk pulih dari utang parah dan krisis keuangan yang diperburuk oleh pandemi. Ini terutama mengacaukan langkah-langkah Afrika sebelumnya untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di berbagai bidang seperti peningkatan kesehatan, akses kepada pangan, dan pendidikan. Lebih penting lagi, hal itu merusak pengakuan dalam SDGs yang diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, bahwa mengakhiri kemiskinan membutuhkan pengurangan ketidaksetaraan. Di tingkat benua, aspirasi-aspirasi Afrika dalam Agenda 2063, visi transformatif jangka panjang benua untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, juga memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dengan demikian, ketidaksetaraan yang berkaitan erat dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan telah menjadi isu kebijakan utama secara global.

Sayangnya, sebuah laporan PBB memperkirakan bahwa Afrika Sub-Sahara akan mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem terbesar pada tahun 2020, dengan tambahan 26 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan inter-

nasional akibat pandemi. Angka ini mengembalikan Afrika Sub-Sahara ke tingkat kemiskinan di tahun 2015, menyiratkan hilangnya kemajuan yang telah dicapai dalam 5 tahun di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sekarang, sangat penting bagi Afrika untuk fokus pada perbaikan kehidupan penduduk yang termiskin dan paling terpinggirkan melalui penciptaan masyarakat yang berkelanjutan, adil, dan setara dalam semua aspek kehidupan, lebih dari sebelumnya.

Bagi banyak negara Afrika, ketidaksetaraan ekonomi—distribusi pendapatan dan kesempatan yang timpang di antara berbagai kelompok dalam masyarakat—adalah yang paling memprihatinkan. Bahkan negara-negara Afrika dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi, seperti Nigeria, Afrika Selatan, Mesir, Aljazair, Maroko, dan Angola, mencatat beberapa tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan tertinggi.

Negara-negara Afrika menghadapi dua tantangan lebih lanjut dalam mencoba untuk mengurangi ketidaksetaraan dan berinvestasi dalam pertumbuhan dan pembangunan, yaitu: Aliran Keuangan Gelap (IFF) dan meningkatnya krisis utang.

› Aliran keuangan gelap

IFF adalah uang yang diperoleh, ditransfer, atau digunakan secara ilegal melalui aktivitas komersial tertentu seperti menyembunyikan pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan melalui perusahaan cangkang ilegal; kegiatan kriminal terorganisir seperti perburuan, narkoba, perdagangan senjata dan manusia, pencurian minyak dan mineral; dan praktik korupsi yang memainkan peran kunci dalam memfasilitasi arus-arus keluar ini. Perusahaan-perusahaan multinasional kaya, suaka-suaka pajak, dan individu-individu bertanggung jawab atas sebagian besar IFF dari negara-negara termiskin di dunia. Ada konsentrasi IFF yang lebih tinggi di sektor-sektor tertentu, terutama industri ekstraktif dan pertambangan, yang cenderung berakhir

“Aliran Keuangan Gelap bukanlah ‘kejahatan tanpa korban’—hal tersebut berbahaya bagi individu-individu dan masyarakat.”

di negara-negara maju yang kaya dan para mitra dagang Afrika. Melihat kembali pada dua dekade terakhir, skandal terkait pajak yang tak ada habisnya seperti Luanda Leaks, Mauritius Leaks, Lux Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers, dan Paradise Papers, antara lain, telah mengungkap isu IFF dan menimbulkan kekhawatiran publik dan politik dalam berurusan dengan mereka.

Informasi yang tersedia dari Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menunjukkan bahwa Afrika kehilangan sekitar \$88,6 miliar—setara dengan 3,7% dari PDB per tahun—melalui IFF. Arus keluar ini hampir sama dengan total arus masuk tahunan bantuan pembangunan resmi dan investasi asing langsung yang diterima oleh negara-negara Afrika. Ini menunjukkan potensi Afrika untuk melakukannya tanpa bantuan asing jika mampu mengembalikan uang yang hilang melalui IFF untuk diinvestasikan dalam pembangunan benua.

Ini adalah uang yang hilang untuk benua yang sudah menderita kekurangan pendapatan. Oleh karena itu, IFF bukanlah “kejahatan tanpa korban” – hal tersebut berbahaya bagi individu-individu dan masyarakat. Hal itu juga memiliki dampak yang mencolok terhadap pembangunan karena memainkan peran utama dalam meningkatkan tingkat ketidaksetaraan sosial ekonomi di Afrika dan secara global melalui pengambilan uang yang dibutuhkan untuk [sektor] kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta barang dan pelayanan publik lainnya.

› Utang yang meningkat

Afrika juga menghadapi krisis keuangan yang akan segera terjadi yang disebabkan oleh meningkatnya masalah utang akibat pinjaman dari kreditor eksternal publik dan swasta. Dengan COVID-19, beberapa negara Afrika telah meminta pembatalan utang dan keringanan utang untuk membantu mereka pulih dari dampak pandemi yang menghancurkan ekonomi dan kesehatan.

Namun, misalnya, untuk sebuah negara yang terkurung daratan dan kaya sumber daya seperti Zambia yang baru mencapai status berpenghasilan menengah ke bawah pada tahun 2011, beban utang luar negeri yang meningkat dan gagal bayar baru-baru ini dipersalahkan oleh sebagian warganya sebagai akibat salah urusnya para elit politik, korupsi, kurangnya transparansi, dan respons kebijakan yang buruk yang hanya akan memicu tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pada tahun 2020, Zambia menjadi negara Afrika pertama yang gagal membayar utang Eurobond senilai \$42,5 juta. Zambia telah berjuang untuk mempertahankan pembayaran utang luar ne-

gerinya kepada pemerintah lain seperti Tiongkok, kepada lembaga-lembaga multilateral, dan kepada para kreditor swasta eksternal, termasuk pinjaman-pinjaman dan obligasi-obligasi. COVID-19 telah memperburuk krisis kemanusiaan dan ekonomi dengan antara lain melanda sistem kesehatan. Sektor-sektor kunci ekonomi seperti pertambangan, pertanian, dan pariwisata telah terkena dampak buruk dari pandemi, yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Ruang fiskal untuk menerapkan langkah-langkah yang dapat mengarah pada lebih banyak investasi dalam jaring pengaman sosial terbatas karena utang dan berbagai insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan multinasional.

› Kebutuhan akan kebijakan pajak yang memihak kelompok miskin

Mobilisasi Sumber Daya Domestik melalui pajak dan kebijakan-kebijakan perpajakan nasional yang memihak kelompok miskin dapat memainkan peran kunci dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi di banyak masyarakat Afrika maupun secara global.

Perpajakan memainkan peran kunci dan dapat mempengaruhi kesetaraan, misalnya, dengan meningkatkan pendapatan yang kemudian dibelanjakan untuk menyediakan barang dan layanan publik yang sangat dibutuhkan seperti pendidikan dan perawatan kesehatan publik. Pajak progresif dapat digunakan sebagai sarana redistribusi pendapatan, kekayaan, dan memaksimalkan kesejahteraan sosial, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi. Pajak dapat menjadi instrumen sosial yang kuat yang memainkan peran penting dalam pengaturan pilihan dan perilaku yang berimplikasi pada hasil kesehatan, kesetaraan gender, dan lingkungan. Pajak juga merupakan alat yang penting untuk representasi dan akuntabilitas karena menerapkan alokasi pajak yang lebih baik untuk mendanai layanan publik khususnya dapat bermanfaat bagi kelompok miskin.

Jelas bahwa pajak merupakan sumber daya penting untuk pencapaian tujuan pembangunan dan dapat memainkan peran kunci dalam pengurangan ketidaksetaraan di Afrika dan global. Peran pajak tidak harus dipahami sebagai satu dimensi; itu lebih dari sekadar mendanai respons dan pemulihan dari pandemi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Luckystar Miyandazi <AzreeStar@gmail.com>

› Bencana Kembar di India

- Agenda yang Belum Selesai

oleh **E. Venkat Ramnaya** dan **Viha Emandi**, Youth For Action, India



Konsekuensi bencana lingkungan terutama berdampak pada mereka yang sudah menderita secara tidak berimbang karena pandemi. Rumah Sakit Umum Osmania di Hyderabad bagi pasien virus korona, misalnya, pada tahun 2020 terkena banjir akibat hujan lebat. Kredit: Twitter.

Jika dan ketika nanti pandemi berakhir, kehidupan akan berjalan jauh dari normal. Kerugian manusia, mata pencaharian, dan harta benda akan sangat besar seperti yang telah dibuktikan di India ketika orang-orang menghadapi bencana kembar COVID-19 dan banjir. Pada tahun 2020, di tengah merebaknya COVID-19, India menghadapi murka alam ketika hujan lebat dan angin topan terjadi di beberapa negara bagian India yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian, hasil panen, dan nyawa manusia. Ini melipatgandakan dampak pada jutaan migran yang kembali ke desa mereka setelah COVID-19 dan tidak dapat menopang diri mereka sendiri. Operasi bantuan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil tidak memadai untuk menangani bencana kembar yang dahsyat tersebut. Alam akhirnya menarik permadani dari bawah kaki kita. COVID-19 tidak diragukan lagi merupakan bencana kesehatan publik dan mensyaratkan peningkatan investasi untuk kesehatan publik. Namun, pada dasarnya, pandemi mencerminkan ketidakseimbangan ekologis. Bukti-bukti telah terkumpul bahwa hilangnya keanekaragaman hayati dan serangan manusia yang membabi buta kepada alam, telah memberikan kontribusi besar terhadap wabah dan penyebaran penyakit epidemi seperti COVID-19. Memahami ekologi dan mengevaluasi

perubahan lingkungan akan menjadi kunci untuk mengidentifikasi potensi pandemi di masa depan. COVID-19 juga memperkuat kebutuhan untuk memberikan perhatian yang jauh lebih besar pada ilmu-ilmu biologi yang menopang pertanian, kesehatan, dan lingkungan.

› Pembatasan pandemi dan migrasi terbalik

Di India, komunitas-komunitas migran yang rentan dan secara khusus perempuan dan anak-anak harus menghadapi berbagai jenis tekanan psikologis dan ekonomi. Seperti diketahui, mayoritas perempuan bekerja di sektor perekonomian informal; ketika migrasi terbalik (*reverse migration*) terjadi, sejumlah besar perempuan tidak dapat menemukan pekerjaan di desa mereka setelah mereka kembali dari kota karena adanya pembatasan (*lockdown*). Ini berkontribusi pada depresi, keputusasaan, dan ketidakpastian ekonomi pada perempuan. Selama periode yang sama, dilaporkan telah terjadi peningkatan 100% pengaduan kekerasan dalam rumah tangga, sementara perempuan tidak bisa mendapatkan bantuan sosial apa pun dari lembaga-lembaga sosial. Kontak yang terbatas dengan keluarga yang melahirkan mereka karena akses yang juga terbatas ke telepon pintar dan tidak tersedianya dukungan formal berkontribusi pada meningkatnya kecemasan dan

perilaku bunuh diri di kalangan perempuan. Sejumlah besar gadis remaja dan perempuan muda menelepon 1098, saluran pusat dukungan bantuan untuk perlindungan anak dari kekerasan fisik dan mental. Institusi kesehatan tidak dapat menangani masalah-masalah lain selain COVID-19 dan perempuan-perempuan miskin harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri, menghabiskan banyak uang untuk pengobatan COVID dan melahirkan sekaligus. Malnutrisi di antara perempuan dan anak-anak merajalela karena bantuan pemerintah tidak memadai dan penutupan sekolah menyebabkan anak-anak tidak menerima makan siang seperti di sekolah. Kelaparan sebagian (*partial starvation*) dalam keluarga-keluarga telah tampak, dengan ketiadaan pekerjaan menyebabkan menipisnya tabungan mereka yang sedikit untuk bertahan hidup.

› **Banjir**

Bahkan di daerah perkotaan seperti Hyderabad, penduduk yang rentan di daerah kumuh dan pemukiman kecil harus meninggalkan rumah mereka saat air banjir memasuki wilayah mereka. Banyak dari komunitas miskin ini telah kehilangan pekerjaan dan barang-barang rumah tangga mereka, dan harus pindah sementara ke lokasi baru dan mengalami tekanan fisik, psikologis, dan ekonomi yang mengesankan. Banjir adalah hasil dari perencanaan yang salah, dengan promosi pembangunan kanal drainase dan tangki-tangki air, yang telah semakin mengurangi daya dukung lingkungan perkotaan. Lebih lanjut, rangkaian angin topan dan banjir yang terjadi di India dari tahun 2014 dan seterusnya merupakan dampak dari dua hal sekaligus; emisi antropogenik tidak hanya di India tetapi juga bagian lain dunia, dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak direncanakan di negara tersebut. Sebagai contoh, banjir besar sungai Kosi yang melanda negara bagian Bihar bagian timur pada Agustus 2014 adalah akibat dari curah hujan yang tinggi di Nepal, di mana sungai tersebut berasal, dan pelepasan 2.8 juta kaki kubik air di sana. Banjir yang diakibatkan oleh tanggul Kosi mempengaruhi sekitar 225.000 orang, yang kehilangan mata pencaharian, nyawa, hasil panen, ternak, serta dan harta benda.

› **Pemerintah harus bertindak**

Waktunya telah tiba bagi para pembuat kebijakan untuk sadar akan situasi perubahan iklim dan secara kolektif bekerja menuju pemulihan ekologi dan lingkungan. Kami berharap AS akan memiliki komitmen baru untuk

ini di bawah kepemimpinan Presiden Biden. Pada pertemuan KTT G-20 kelima belas November 2020, Perdana Menteri India menyerukan indeks global baru untuk dunia pasca-COVID, yang akan memberikan penekanan kuat pada penghormatan pada alam dengan semangat perwalian terhadap “Ibu Pertiwi” (*trusteeship of “Mother Earth”*). Elemen lainnya adalah penciptaan kumpulan bakat yang luas, memastikan teknologi menjangkau semua segmen masyarakat dan yang lebih penting “transparansi dalam tata kelola.” Pembentukan Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) dengan 18 negara dan empat organisasi internasional sebagai anggotanya akan memberikan perhatian pada kerusakan infrastruktur akibat bencana alam yang selama ini belum tertangani. Adalah menjadi penting untuk menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian orang-orang di negara-negara miskin yang terkena dampak bencana secara tidak proporsional.

Kebijakan global mungkin membutuhkan waktu, tetapi langkah menuju masa depan di India harus dengan mendefinisikan kembali konsep “garis kemiskinan” dan bekerja untuk mencapai “indeks pemberdayaan.” Indeks pemberdayaan akan mencakup pemenuhan delapan kebutuhan dasar: kesehatan, sanitasi, perumahan, gizi dasar, energi bersih, pendidikan, air minum yang aman, dan jaminan sosial. Sektor korporasi harus mendukung pemerintah dalam mencapai kebutuhan dasar tersebut; daripada terburu-buru memenangkan kontrak untuk pengembangan vaksin, perusahaan harus bekerja menuju pembangunan berkelanjutan untuk menghasilkan keluaran kualitatif sehingga akses ke vaksin dapat menjadi “hak pertama” dari populasi yang rentan. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) harus digunakan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, akses ke vaksin, serta adopsi dan kegiatan mitigasi untuk COVID-19 dan perubahan iklim. Pemerintah India harus meningkatkan anggarannya dari 1% saat ini menjadi setidaknya 5% dari PDB untuk memenuhi tantangan kesehatan pasca-COVID-19. Seperti yang diucapkan oleh seorang anggota perempuan dari sebuah kelompok swadaya masyarakat yang bekerja dengan organisasi kami, pemerintah harus memberikan kepada mereka “tempat yang aman untuk tinggal, akses yang lebih baik untuk kebutuhan dasar, dan inisiasi tindakan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang mendesak.” ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
 E. Venkat Ramnaya <vedvon@yahoo.co.in>
 Viha Emandi <viha.emandi@gmail.com>

› Ekonomi Fundamental

Sebagai Kunci Pembaruan Sosial

oleh **Julie Froud**, Universitas Manchester, Inggris, untuk Ekonomi Fundamental Kolektif



Rasa terima kasih terhadap apa yang dinamakan “pekerja esensial” sering diungkapkan selama krisis korona, ketika jelas bahwa kebanyakan di antara mereka sebenarnya digaji rendah dan bekerja dalam situasi rentan, maupun terpapar risiko baru dari COVID-19 terkait pekerjaan mereka.

Kredit: [Flickr/Creative Commons](#).

Pandemi saat ini memberikan pengingat jitu mengenai pentingnya ekonomi fundamental (*foundational economy*)—barang dan jasa yang dikonsumsi sehari-hari yang memungkinkan kehidupan yang aman dan beradab. Termasuk di dalamnya infrastruktur jaringan pipa dan kabel yang menyediakan utilitas, komunikasi, transport, dan pasokan makanan, serta layanan penyediaan (*providential*)¹ kesehatan, perawatan, pendidikan dan dukungan pendapatan². Ada kecenderungan untuk menganggapnya sebagai hal yang sudah seharusnya demikian, meremehkan baik layanan maupun para pekerja yang menyediakan layanan tersebut, sampai terjadi disrupsi serius yang menciptakan ketidaknyamanan dan ancaman besar. Selama COVID-19, banyak warga telah menyadari bahwa sistem distribusi makanan rentan, sebagaimana halnya gangguan terhadap ketersediaan listrik atau musim kemarau mengingatkan kita akan ketergantungan kita pada listrik atau air. Pandemi telah memberikan pada kita istilah “pekerja kunci” atau “pekerja esensial”, yaitu orang-orang yang harus tetap “pergi bekerja” di saat krisis untuk memastikan bahwa infrastruktur sehari-hari terpelihara. Pada waktu yang sama, jelas terlihat bahwa pekerja esensial ini dibayar dengan buruk dan berada dalam situasi rentan, maupun terekspos risiko kerja baru yang ditimbulkan COVID-19.

Di luar pengingat yang tepat mengenai sifat kritis dari ekonomi fundamental, krisis tersebut menggarisbawahi pentingnya organisasi kolektif, ketetapan, dan dalam beberapa kasus konsumsi. Bahkan mereka dengan pendapatan yang tinggi masih tergantung pada kualitas sistem transportasi atau pelayanan intensif di rumah sakit; pendapatan pribadi yang tinggi tidak bisa menjamin sinyal Wi-Fi yang baik, atau udara bersih atau taman publik berkualitas baik. Dalam hal yang sama, keamanan individual kita tergantung pada kualitas dan perluasan pelayanan perawatan kesehatan di seluruh dunia pada saat pandemi

ini. Ini semua memperkuat batas dari ukuran standar pertumbuhan ekonomi (seperti GDP per kapita), yang gagal menangkap rentang perbedaan nilai yang berkontribusi pada kehidupan yang baik, dan seringkali tidak memberikan penghargaan yang sesuai kepada mereka yang melakukan pekerjaan pokok.

› Pembaruan layanan dan infrastruktur

Pengakuan akan pentingnya pelayanan material dan penyediaan ini membutuhkan pemikiran jernih mengenai kesempatan yang disediakan oleh momen saat ini. Pendeknya, ada tantangan ganda untuk mengamankan kesejahteraan yang terus meningkat bagi generasi saat ini dan generasi ke depan melalui fokus kebijakan dan politik pada ekonomi fundamental. Kekurangan pada layanan fundamental telah terlihat bahkan sebelum COVID-19 menyerang, melalui berbagai kombinasi investasi yang tidak memadai (*underinvestment*), privatisasi, marketisasi, dan finansialisasi. Infrastruktur yang benar-benar runtuh, pelayanan dengan dana tidak memadai dalam masyarakat yang menua, “kekeringan makanan” di mana masyarakat sulit mengakses makanan segar berkualitas baik: ini semua adalah contoh dari kegagalan penyediaan fundamental, di mana kemajuan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam banyak kasus, pembaruan fundamental bagi kesejahteraan generasi saat ini mensyaratkan sumber dana tambahan baik kapital maupun pendanaan pendapatan. Bahkan di negara dengan penghasilan tinggi seperti Jerman, kerusakan infrastruktur transportasi dan pendidikan telah menjadi bahan [perdebatan sengit](#). Tetapi, investasi itu sendiri tidak akan mengatasi masalah yang juga merupakan bentuk konsekuensi dari bagaimana pelayanan diatur dan disediakan, dalam arti bahwa pembaruan juga perlu mencakup reformasi dari model bisnis yang sering bersifat disfungsi. Sebagai contoh, sistem perawatan yang kurang didanai membutuhkan lebih banyak sumberdaya untuk bisa memenuhi kebutuhan kesehatan dan kelompok sosial lanjut usia yang terus bertambah atau orang-orang yang rentan. Namun bilamana penyedia perawatan dimiliki oleh ekuitas swasta atau bentuk kepemilikan ekstraktif lain, sumberdaya tambahan mungkin akan diarahkan pada keuntungan yang lebih besar dan tidak pada penambahan jumlah tenaga kerja atau untuk peningkatan pelayanan perawatan. Atau, jika perawatan diorganisir oleh birokrasi besar dengan sedikit masukan dari penerima perawatan, sumberdaya tambahan harus dikombinasikan dengan reformasi untuk melokalisasi provisi dan memberi suara yang lebih besar pada pemangku kepentingan.

Ketika pelayanan kepada warga negara ditingkatkan melalui pembangunan ulang infrastruktur dan jasa, tantangan politik dari pembaruan fundamental ini termasuk menyoal krisis iklim dan alam yang juga mempengaruhi kesejah-

taan generasi mendatang³. Sebagai contoh, pemenuhan target emisi nol akan mensyaratkan kontribusi signifikan dari aktivitas ekonomi fundamental, seperti perumahan, transportasi, dan pangan⁴. Karena ini esensial, penguangan emisi akan dihasilkan tidak dari pembatasan (*abstention*) melainkan dari perubahan dalam produksi dan konsumsi, didorong oleh peraturan-peraturan baru dan perubahan perilaku. Ini bisa mencakup teknik konstruksi yang berbeda dan penguatan bangunan yang sudah ada untuk membuat mereka lebih efisien energi, perubahan dalam komposisi konsumsi makanan, dan penggantian kendaraan pribadi dengan perjalanan dan transportasi publik yang aktif.

› Peran nyata negara

Ada peran nyata negara dalam proses pembaruan ini. Bukan hanya dalam kondisi di mana banyak pelayanan fundamental disediakan atau dibiayai oleh negara, namun dalam hal kewargaan sosial yang dimungkinkan melalui akses pada infrastruktur sehari-hari, syarat negara yang akuntabel dan responsif juga diperlukan. Banyak dari infrastruktur fundamental asli seperti air dan sistem pembuangan air, jaringan listrik, atau rumah sakit umum diatur melalui perencanaan dan rekayasa yang bersifat *top-down*. Pembaruan dan penyediaan infrastruktur baru juga perlu menyediakan peran yang lebih kuat bagi partisipasi warga, terutama jika terjadi kompromi (sebagaimana halnya dalam penanganan perubahan iklim atau kerja dalam batas anggaran) atau ketika keahlian dalam komunitas dan organisasi di level lokal telah paham bagaimana cara meningkatkan hasil sosial, seperti dalam kesehatan publik.

Pembaruan pada ekonomi fundamental juga menjadi prasyarat penting bagi kebijakan lain yang mempromosikan pendapatan dasar universal atau jasa dasar universal. Hanya memberi bantuan tunai pada warga tidak akan menjamin kesejahteraan karena kualitas hidup tergantung pada akses untuk secara kolektif menyediakan jasa seperti pelayanan kesehatan, jaringan internet, perumahan sosial, transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau, dan ruang hijau. Jika harus ada warisan bermakna dari pandemi, hal itu harus mencakup pembaruan dari ekonomi fundamental, yang secara sosial dan ekologis berkelanjutan meningkatkan daya hidup di waktu ini. ■

Semua korespondensi ditujukan kepada Julie Froud
<julie.froud@manchester.ac.uk>

1. Istilah *providential* di sini dipakai dalam arti penyediaan, untuk menyediakan kebutuhan di masa yang akan datang. Istilah ini mengikuti konsep masyarakat penyediaan (*providential societies*), yang didirikan untuk memungkinkan masyarakat menabung untuk membayar biaya saat sakit, dsb di masa yang akan datang. Istilah ini mencakup pelayanan publik dan kesejahteraan..
2. Untuk informasi lebih lengkap, lihat: <https://foundationaleconomy.com/introduction/>.
3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: <https://foundationaleconomy.com.files.wordpress.com/2021/01/fe-wp8-meeting-social-needs-on-a-damaged-planet.pdf>.
4. Sebagai contoh, Institut Stockholm memperkirakan bahwa 59% jejak ekologis di Wales dapat dikaitkan dengan konsumsi makanan (28%), perumahan (20%), dan transport (11%) <https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/ecological-and-carbon-footprint-of-wales-report.pdf>.

› Ekonomi dan Negara yang Sesuai untuk Masa Depan

oleh **Andreas Novy** dan **Richard Bärnthaler**, Universitas Ekonomi dan Bisnis Wina, Austria

Ada pengakuan yang luas bahwa kita saat ini hidup di masa kekacauan yang mendalam. Pertanyaannya bukan lagi *apakah* perubahan besar akan terjadi di abad kedua puluh satu, tetapi *bagaimana* transformasi ini akan terjadi—dengan jalan yang kacau-balau, seperti yang kita alami saat ini dalam menghadapi pandemi, atau dibentuk secara kolektif. Cara yang terakhir itu tergantung pada dua prasyarat: memikirkan kembali ilmu ekonomi, dan memperkuat institusi-institusi publik dan demokrasi.

› Batas-batas pemikiran tentang ekonomi di abad XX

Selama beberapa dasawarsa terakhir, pemikiran pasar-liberal, yang sudah dominan di abad kesembilan belas, telah mengalami kebangkitan. Sering dikritik dengan sebutan neoliberalisme, pemikiran itu telah merembes ke dalam pemikiran politik dan bertindak jauh melampaui pembuatan kebijakan sayap kanan. Kekuatan pasar dalam meningkatkan (eko-)efisiensi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya yang langka telah menjadi dogma, dan mendisiplinkan arus utama yang ada di UE dan AS. Namun, mengoptimalkan pasar tidak akan cukup untuk melindungi kehidupan kita di dalam ruang lingkup planet ini—bukan hanya karena pertumbuhan hijau [pertumbuhan yang ramah lingkungan] (yang nyatanya tidak hijau samasekali karena tidak adanya pemisahan mutlak antara pertumbuhan ekonomi dan tekanan lingkungan sehingga cenderung mengimbangi keuntungan efisiensi dengan peningkatan konsumsi), tetapi juga karena liberalisme pasar mengabaikan rutinitas, praktik, dan kebiasaan yang tidak berkelanjutan. Liberalisme pasar ini memegang keyakinan yang hampir menyerupai agama pada kekuatan konsumen yang berpengetahuan luas dan rasional untuk “mengatasi” krisis iklim melalui pilihan pasar yang bersifat perorangan. Prioritas yang diberikan pada solusi pasar ini tidak hanya memperkuat akses konsumsi yang tidak merata, tetapi juga merupakan ancaman bagi demokrasi. Dalam liberalisme pasar, negara tidak lemah atau terbatas pada *laissez-faire*, tetapi memiliki mandat yang kuat untuk menegakkan kontrak dan melindungi hak milik pribadi. Namun, di dunia di mana hak milik terkonsentrasi pada korporasi-korporasi bisnis, negara pasar-liberal telah melahirkan struktur kekuasaan baru, tidak demokratis, dan sangat tidak setara. Perusahaan-perusahaan multinasional telah menjadi pembuat peraturan dan keputusan global, mampu mengeksternalisasikan biayanya kepada masyarakat dan lingkungan serta menerjemahkan eksternalisasi ini ke dalam nilai pemegang saham yang diprivatisasi.

Setelah Perang Dunia II, baik di Utara Global maupun ne-

gara-negara berkembang di Selatan Global, muncul sebuah “konsensus pasca-perang” yang didasarkan pada kapitalisme kesejahteraan. Penyediaan infrastruktur dianggap sebagai tugas mendasar bagi otoritas publik: dari akses kepada kesehatan dan pendidikan hingga pengalihan yang signifikan kepemilikan swasta kepada pemerintah daerah (*municipalization*) atau nasionalisasi atas penyediaan energi, perumahan, dan mobilitas. Suatu repertoar instrumen yang lebih besar—seperti intervensi makroekonomi, batasan ruang lingkup pasar, dan langkah-langkah redistributif—menghasilkan institusi-institusi ekonomi yang bersifat plural, yang memungkinkan munculnya kemakmuran di Eropa Barat dan Amerika Utara serta pembangunan nasional di Global Selatan. Sementara pada akhir abad kedua puluh konsensus ekonomi ini mengalami kemunduran parah di kalangan akademisi dan pembuatan kebijakan, [model ekonomi] itu memperoleh kembali pengaruhnya setelah terjadinya Krisis Keuangan Hebat tahun 2008. Kapitalisme kesejahteraan versi abad kedua puluh satu mencerminkan pendekatan pragmatis terhadap transformasi sosial-ekologis, mempromosikan modernisasi ekologis dan mengakui peran yang lebih aktif bagi negara dalam inovasi dan kebijakan industri, tetapi mengabaikan bagaimana hal-hal yang memaksa dari laba dan pertumbuhan serta konsumerisme mengatur cara-cara kita dalam memproduksi dan hidup. Akibatnya, ketimpangan tetap tinggi dan bencana iklim meningkat. Terlebih lagi, efektivitas dari “negara kesejahteraan dan peraturan” yang diatur secara teritorial telah dilemahkan oleh ekonomi yang semakin ter-deteritorialisasi, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk dapat menghindari undang-undang nasional dan memusatkan kekayaan.

› Kemunculan sebuah kerangka

Mengingat krisis-krisis yang semakin meningkat, aliran pemikiran ekonomi ketiga baru mulai muncul. Aliran ini mengangkat wawasan dari Marx, Keynes, Braudel, ekonomi feminis, dan *Foundational Economy Collective* [perkumpulan akademisi Eropa untuk ekonomi fundamental] untuk membedakan antara: (i) zona ekonomi fundamental dari kegiatan sehari-hari, termasuk penyediaan eksistensial [infrastruktur] dan lokal serta pekerjaan perawatan tidak berbayar; (ii) ekonomi pasar yang menghasilkan nilai, termasuk penyediaan lokal yang tidak esensial dan kegiatan-kegiatan berorientasi ekspor; serta (iii) ekonomi rentier [ekonomi yang dibangun dari penyewaan sumber daya] yang mengambil nilai. Pemahaman Karl Polanyi tentang ekonomi sebagai suatu sistem yang mengatur mata pencaharian paling cocok digunakan untuk menghadapi tantangan transformasi sosial-ekologis, menyoroti kebutuhan untuk memperluas dan memperkuat ekonomi kebutuhan dasar (prioritas utama) serta penyediaan

“Strategi-strategi yang efektif untuk memperkuat ekonomi yang sesuai di masa depan perlu mengejar bentuk-bentuk penentuan nasib sendiri yang saling berhubungan secara teritorial dengan pemberdayaan keragaman dari ruang-ruang kebijakan yang saling terkait tetapi tepat, melalui deglobalisasi ekonomi selektif”

lokal yang tidak penting (prioritas kedua), mengubah ekonomi pasar berorientasi ekspor, dan mengecilkan ekonomi rentier.

Meskipun mengakui bahwa kehidupan yang baik untuk semua pihak di dalam ruang lingkup planet hanya dapat diwujudkan melalui transisi menuju moda-moda produksi dan kehidupan pasca-kapitalis, pendekatan ini kurang mempunyai strategi mengenai bagaimana cara memperkenalkan perubahan yang diperlukan dengan cara yang demokratis. Beberapa pendukung cenderung menolak negara dan mengistimewakan gerakan-gerakan akar rumput dan aktivisme masyarakat sipil, yang dengan demikian memperkuat anti-statisme pasar-liberal dan fatalisme politik serta menggabungkan pembuatan kebijakan pasca-politik arus utama pada beberapa dasawarsa terakhir dengan badan negara secara umum. Bagaimanapun, munculnya berbagai pemerintahan otoriter menunjukkan potensi kekuatan lembaga-lembaga negara. Meskipun tidak satu pun di antara mereka, baik Tiongkok, India, atau Brasil di masa sekarang ini menjadi model panutan, mereka menunjukkan potensi yang inheren di dalam diri negara sebagai entitas dengan yurisdiksi yang terbatas, dengan kedaulatan teritorial: baik itu sebagai *negara-kota*, *negara-bangsa* atau *negara-Eropa*. Mengabaikan potensi yang terletak pada monopoli negara atas pembuatan aturan yang sah tidak hanya naif dan berbahaya, tetapi, di atas segalanya, tetap terjebak dalam permainan khusus dengan mengorbankan proyek-proyek kontra-hegemonik potensial.

› Kebutuhan akan lembaga negara non-kapitalis

Strategi-strategi yang efektif untuk memperkuat ekonomi yang sesuai di masa depan perlu mengejar bentuk-bentuk penentuan nasib sendiri yang saling berhubungan secara teritorial dengan pemberdayaan keragaman dari ruang-ruang kebijakan yang saling terkait tetapi tepat, melalui deglobalisasi ekonomi selektif—misalnya, kota, wilayah, bangsa, dan seterusnya. Negara-negara, yang mengatur wilayah melalui lembaga publik dan demokrasi, tidak boleh direduksi menjadi *negara-bangsa*, atau menjadi birokrasi terpusat. Bentuk negara yang inovatif harus lebih terdesentralisasi, memberdayakan dan melindungi lembaga-lembaga perantara serta lingkungan kerja dan hidup yang tidak terkomodifikasi yang dikelola sendiri. Namun, [pendekatan] ekonomi politik kritis yang telah menekankan batas-batas lembaga negara progresif seperti itu dalam kapitalisme, bersikeras bahwa negara dalam kapitalisme adalah negara kapitalis.

Kami setuju bahwa lembaga-lembaga negara publik dan demokratis hanya dapat berkembang dalam sistem ekonomi di luar kapitalisme. Namun, karena zona-zona non-kapitalis selalu ada di dalam kapitalisme, institusi-institusi negara non-kapitalis juga dapat bertahan di dalam kapitalisme: baik itu menjadi koperasi, perusahaan kota, atau sistem pensiun publik. Dan karena kapitalisme bergantung pada zona-zona ekonomi kebutuhan dasar (terutama perawatan dan infrastruktur), lembaga-lembaga negara non-kapitalis menopang legitimasi dan efektivitas kapitalisme. Karena keberadaan kapitalisme bergantung pada negasinya sendiri, badan negara dapat memperkuat zona ekonomi kebutuhan dasar yang memungkinkan kehidupan beradab bagi semua penduduk. Akses inklusif ke sistem-sistem penyediaan kolektif yang terjangkau (perawatan, kesehatan, pendidikan, perumahan, mobilitas) dapat dikombinasikan dengan menyisihkan pilihan-pilihan yang tidak berkelanjutan (misalnya, larangan penerbangan jarak pendek) dan mengarahkan investasi ke dalam kegiatan ekonomi berkelanjutan (misalnya, melalui subsidi, investasi langsung, perpajakan, lisensi sosial, program pelatihan ulang) untuk memastikan universalisabilitas sosial-ekologis. Dalam jangka pendek, ini adalah strategi yang layak untuk bergerak melampaui neoliberalisme, memperkuat bentuk-bentuk negara hijau dan non-kapitalis di dalam kapitalisme.

Namun, dalam jangka panjang, moda produksi kapitalis tetap tidak sesuai dengan kehidupan yang baik untuk semua orang dalam ruang lingkup planet. Oleh karena itu, untuk bergerak melampaui kapitalisme, bentuk-bentuk baru negara harus berkembang di seputar pertumbuhan bidang-bidang kehidupan yang terdekomodifikasi di luar fungsinya untuk reproduksi kapital. Ini dapat merupakan hubungan masyarakat sipil-negara yang bertransformasi di mana investasi-investasi serta pengoperasian penyediaan infrastruktur menjadi lebih tersosialisasi dan ketergantungan pada pendapatan yang diperoleh dari pasar kerja berkurang. Mempromosikan kesejahteraan (*well-being*) akan menghasilkan lebih banyak waktu luang ketimbang upah yang meningkat, mengakses barang publik akan lebih disukai daripada memiliki barang pribadi, mengurangi biaya hidup (misalnya, infrastruktur publik dan perumahan yang terjangkau) akan diprioritaskan daripada meningkatkan daya beli. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Andreas Novy <Andreas.novy@wu.ac.at>
Richard Bärnthaler <richard.baernthaler@wu.ac.at>

› COVID-19: Artikulasi Baru Negara dan Ekonomi

oleh **Bob Jessop**, Universitas Lancaster, Inggris

Signifikansi pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Sampai virus ini bisa dikontrol, atau dihilangkan, kita tidak akan sepenuhnya tahu respons seperti apa yang benar-benar tepat. Tetapi, telah cukup jelas bahwa beberapa negara lebih berhasil dalam mengontrol kasus dan mengurangi angka kematian dari apapun penyebabnya. Juga telah jelas bahwa pandemi telah menghasilkan alasan baru bagi intervensi negara yang diorientasikan pada bantuan timbal balik maupun dukungan pada bisnis swasta. Artikel ini membahas aspek ini dari pandemi.

Pandemi bisa dianggap sebagai krisis global. Krisis cenderung mengganggu pandangan mengenai dunia yang telah diterima dan bagaimana caranya untuk tetap bisa berlanjut di dalamnya, dengan mempertanyakan paradigma kebijakan dan teoretis maupun rutinitas sehari-hari. Meskipun pandemi telah lama diakui sebagai ancaman potensial, krisis COVID-19 pada awalnya secara umum ditafsirkan sebagai guncangan dari luar yang tak terduga yang mengancam manusia. Ini tercermin dalam wacana biopolitik mengenai keamanan untuk melindungi penduduk dan dalam wacana militan yang ditujukan terhadap ancaman internal (misalnya pekerja migran, populasi Roma). Bertentangan dengan itu, krisis pandemi bisa ditelusuri dari pertanian yang terkapitalisasi yang menyerbu kehidupan alam dan menciptakan kondisi yang memungkinkan penyakit menyeberang dari hewan ke manusia. Penyebaran COVID-19 juga mencerminkan perdagangan global dan perjalanan internasional, yang memudahkannya untuk berpindah antar negara dan benua. Namun insiden pandemi tetap saja tidak merata: rejim politik yang berbeda menafsirkannya secara berbeda, memprioritaskan keamanan biopolitik, pertahanan melawan musuh dari dalam, atau lebih memilih ekonomi daripada kesehatan.

› Menjelaskan respons buruk Inggris

Artikel ini berfokus pada Eropa dan Amerika Utara, di mana buruknya kinerja mungkin bersumber dari strategi untuk

mensubordinasi pemerintahan secara lebih langsung dan lebih lama pada “keharusan globalisasi” sebagaimana yang dikembangkan oleh wacana neoliberal. Strategi ini mendorong kerentanan (*precarity*) dalam masyarakat sebagai alat pendisiplinan untuk menunjang finansialisasi kehidupan sehari-hari, dengan tumbuhnya ketidaksetaraan dalam hal kesejahteraan dan stratifikasi yang lebih besar di dalam kelas-kelas. Hal ini juga mempercepat perubahan dari negara kesejahteraan dengan pembagian hak-hak warga negara, menuju rezim dunia kerja yang koersif, dan, terutama di Amerika Serikat, peluang untuk dipenjarakan. Neoliberalisme memberi privilese pada kekuatan pasar dan menggunakan negara untuk memperluas pasar itu. Sebaliknya, COVID-19 mengandalkan negara sebagai aktor kunci, kemitraan antara publik dan swasta, dan solidaritas tanpa syarat (saling membantu) serta menghidupkan kembali masyarakat yang saling peduli.

Inggris merupakan suatu rezim politik neoliberal yang tidak siap dalam menghadapi pandemi dalam arti pengorganisasiannya yang terpecah, terdesentralisasi, serta seperangkat entitas publik dan swastanya yang terkoordinasi dengan buruk. Perhatian Pemerintah juga dikacaukan oleh kebutuhan untuk menerapkan Brexit, dengan seorang Perdana Menteri baru yang berorientasi pada peringkat opini publik. Bagaimanapun juga, sistem kesehatan Inggris tidak siap dalam menghadapi pandemi. Pengeluaran untuk pelayanan kesehatan per orang dari tahun 2009 hingga 2018 dikurangi menjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 1,2% yang tidak sebanding dengan penambahan kebutuhan pelayanan kesehatan. Terdapat kekurangan sekitar 40.000 perawat, 2.500 dokter umum, dan 9.000 dokter rumah sakit, maupun kekurangan dalam peralatan perawatan intensif.

Pemerintah-pemerintah terdahulu telah menyiapkan strategi pandemi yang merupakan cetak biru teknokratis yang tidak mencerminkan kondisi buruk infrastruktur pelayanan kesehatan dan sosial, termasuk ventilator dan peralatan pengaman pribadi, serta kerentanan pekerja

“Pandemi telah menghasilkan alasan baru bagi intervensi negara yang berorientasi pada bantuan timbal balik maupun dukungan pada bisnis swasta”

dan kelompok marginal. Bercermin pada Strategi Kesiapan Pandemi Influenza tahun 2011, kebijakan pemerintah Inggris “mengikuti ilmu” sebagaimana yang ditampilkan oleh Kelompok Penasehat Ilmu untuk Kedaruratan. Ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada analogi menyesatkan tentang epidemi influenza, yang mencerminkan perhitungan bahwa virus akan menyebabkan ekstra kematian sebesar 250.000 yang akan ditangani berdasar tingkat kegawatan (lanjut usia dibiarkan meninggal, yang sakit disebar ke panti perawatan). Ketika opini publik menolak hal ini, Pemerintah berusaha meratakan kurva peningkatan infeksi untuk menunda penyebaran virus dan kemudian memberlakukan strategi nasional dengan beberapa pelimpahan kewenangan. Hal ini diikuti dengan penegakan kebijakan pembatasan (*lockdown*) yang seringkali terlalu sedikit dan terlambat. Memang, rendahnya tingkat upah bagi mereka yang sakit mempunyai arti bahwa mereka yang secara finansial tidak terjamin akan terus bekerja, meskipun mereka sedang tidak sehat. Hal ini telah berkontribusi pada meningkatnya angka infeksi dan kematian.

Pemerintah telah gagal membangun sistem tes-rekam jejak-isolasi yang seharusnya berfungsi dan, karena obsesinya pada sektor swasta, tidak menghubungkan antara pelayanan lokal dan agensi nasional untuk memberikan respons yang koheren. Tidak ada tindak lanjut yang sistematis bagi orang-orang yang diisolasi atau dikarantina, kecuali bagi pendatang yang baru tiba dari negara-negara tertentu. Test virus korona yang dilakukan di komunitas Inggris diberikan di luar struktur NHS (Layanan Kesehatan Nasional) yang lazim, tanpa pengawasan medis yang baik seperti di tempat lain (misalnya Jerman, Irlandia, atau Korea Selatan). Namun kebijakan vaksinasi telah ditangani dengan baik melalui pelayanan kesehatan.

Dalam responsnya terhadap COVID-19 Inggris lebih memprioritaskan kesejahteraan daripada kesehatan, dan itu malah menjadi bumerang. Sesungguhnya, melindungi kesehatan lebih efektif daripada mempertahankan ekonomi. Di AS, Inggris, Swedia, dan Brasil, pemerintah pada

awalnya menolak untuk mengakui sifat mematikan COVID-19 dan untuk melindungi kehidupan. Menjaga bisnis (besar) dianggap lebih penting. Hal ini menyebabkan pembatasan dan tindakan isolasi sosial yang terlambat, kemudian menghasilkan pembatasan “ringan” yang tidak menekan virus; serta kemudian relaksasi yang terlalu dini, yang menjadikan pandemi justru kembali muncul.

› Suksesnya aksi negara kuat

Namun meskipun COVID-19 adalah pandemi global, hanya ada sedikit koordinasi antara politisi dan ilmuwan dalam meresponsnya. Sebaliknya, dalam masyarakat kapitalis yang maju dijumpai solusi nasionalis terhadap pandemi dan vaksin dan sedikit usaha atau uang digunakan untuk koordinasi kampanye vaksinasi global. Hal ini khususnya terlihat jelas di Utara Global, di mana pandemi diduga akan mempengaruhi Selatan Global. Tetapi, tidak peduli apakah suatu negara itu demokratis atau otoriter, di kepulauan ataupun benua, Kong Hu Cu atau Buddhis, komunitarian atau individualistis, jika negara itu Asia Timur, Asia Tenggara, atau Australasia, mereka memiliki kecenderungan untuk mengelola COVID-19 dengan cara lebih baik daripada negara Eropa ataupun Amerika Utara. Kebijakan nol-COVID seperti di Selandia Baru, Singapura, Vietnam atau Australia, di mana aksi negara kuat dan langkah kesehatan publik berfungsi, lebih baik daripada kebijakan imunitas komunitas (*herd immunity*) yang membiarkan kematian dalam jumlah yang bisa ditoleransi, secara bertahap meningkatkan imunitas, dan/atau kebijakan vaksinasi yang menyeluruh. Kita bisa berharap bahwa penelitian pasca COVID-19 akan mengkritik respons neoliberal dan merekomendasikan investasi yang baik bagi infrastruktur kesehatan publik dan perawatan dengan yang memadai dengan dukungan kuat bagi tindakan negara yang efektif. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Bob Jessop
<b.jessop@lancaster.ac.uk>

› Leviathan Muncul Kembali!

Negara Korona dan Sosiologi

oleh **Klaus Dörre** dan **Walid Ibrahim**, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jerman



Pusat vaksinasi di Erfurt, Jerman. Sisi kepedulian dari “Negara Korona,” atau suatu langkah yang diperlukan bagi pemulihan ekonomi?
Kredit: Walid Ibrahim.

Leviathan muncul kembali! Ini adalah ungkapan yang dapat merangkul apa yang saat ini terjadi di berbagai belahan dunia akibat pandemi Korona. Dalam karya utamanya, “Leviathan, atau Perikara, Bentuk, dan Kuasa atas sebuah Kesejahteraan Umum Gereja dan Keadaban” (*Leviathan, or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil*), Thomas Hobbes memilih analogi monster laut untuk mengekspresikan sifat kontradiktif dari negara modern. Selama era neoliberalisme, Leviathan tampak sedang mengambil langkah mundur. Namun tentu saja hal tidak pernah benar-benar terjadi, sebab di Cile saja hanya suatu negara tirani yang dapat muncul sebagai eksperimen radikal dari pasar bentukan dari Chicago Boys. Meskipun demikian, kritik sosial sosiologis, di atas segalanya, merupakan kritik terhadap pasar. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Karl Polanyi menjadi saksi akademik utama mengenai suatu gerakan ganda yang pada awalnya merupakan penghancuran pasar yang berdampak luas. Sejak pandemi Korona, pendulum berayun balik. Leviathan melakukan intervensi—sebagai keadaan darurat untuk memerangi pandemi dan *pada saat yang bersamaan* sebagai negara intervensionis ekonomi yang menginvestasikan triliunan dolar di

negara dan kawasan yang mampu untuk melindungi dan, jika perlu, membangun kembali ekonomi.

› Asesmen Negara Korona

Bagaimana asesmen terhadap negara semacam ini? Para ahli teori sistem merasa kesal karena mereka telah mengesampingkan kemungkinan adanya aktor negara yang mengintervensi secara efektif dalam setiap subsistem sosial. Para ekonom Keynesian bersukacita karena utang pemerintah saat ini merupakan sarana pilihan untuk merangsang ekonomi. Jurnalis liberal, di sisi lain, khawatir tentang hak-hak dasar yang akan ditanggihkan oleh “Negara Korona” selama karantina wilayah (*lockdown dan shutdown*). Jadi, bagaimana *seharusnya* asesmen kita terhadap intervensionisme negara (*state interventionism*) baru ini? Sebagai jawaban awal, kami mengajukan tesis bahwa intervensionisme negara dapat menjadi bidan dari “kapitalisme dengan wajah baru.” Namun, Negara Korona adalah hibrida, karena merespons pandemi dan resesi dengan dua varian aktivitas negara yang berbeda secara fundamental dan keduanya hanya bertautan satu sama lain secara longgar. COVID-19 sedang ditangani oleh

keadaan darurat yang, di satu sisi, beroperasi dalam kerangka konstitusional, dan di sisi lain, mengesampingkan konstitusi dengan menangguk sementara hak-hak dasar. Satu-satunya cara untuk mengabsahkan pengecualian adalah adanya perang melawan pandemi. Negara memberlakukan aturan yang mengikat mengenai jarak sosial untuk mencegah cepatnya penyebaran penyakit tersebut. Dengan melakukan hal itu, ia menanggapi bencana medis; namun, ketika pandemi menjadi lebih mudah dikelola, aturan tersebut akan kehilangan keabsahannya. Semua kewajiban—seperti perlambatan kehidupan sehari-hari, penurunan konsumsi, penghindaran perjalanan, meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri dan orang lain—hanya akan dapat dipertahankan secara sukarela setelah pandemi berakhir. Dorongan yang dapat dikenali untuk memulihkan normalitas pra-COVID-19 memberikan firasat betapa terpisahnya analisis semacam itu dari kenyataan.

Terhadap negara intervensionis ekonomi harus dilaksanakan asesmen yang berbeda. Langkah bertahap untuk menjauhi penghematan fiskal, anggaran berimbang, “Schwarze Null”¹ dan—yang sejauh ini hanya disinggung—peningkatan pajak terhadap aset besar dan pendapatan tinggi, merupakan kemajuan bila dibandingkan dengan radikalisme pasar di masa-masa sebelumnya. Namun demikian, Negara Korona tidak menjamin transformasi sosial-ekologis yang memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Social Development Goals*). Dalam istilah politik-ekonomi, langkah-langkah tersebut merupakan sebuah pijakan yang lemah, karena bagi negara-negara yang kaya pun utang publik yang terlalu tinggi hanya berfungsi selama bank sentral dan pasar keuangan bermain bersama dan menjamin kebijakan suku bunga rendah. Hal ini membuat masalahnya lebih serius karena aparat negara yang bertanggung jawab sering kali minim imajinasi dalam merangkai kebijakan ekonomi dan industri. Disapah dari intervensionisme yang hati-hati, mereka sebetulnya hanya tahu sedikit tentang apa yang harus dilakukan dengan hasil keuntungan dari program investasi dan rekonstruksi.

› Batas-batas intervensi ekonomi

Karena alasan ini juga, seseorang tidak boleh menaruh harapan tinggi pada efek ekologis berkelanjutan dari Negara Korona. Negara ekonomi intervensionis bertujuan untuk secara langsung melawan kontraksi kegiatan ekonomi. Keabsahan program rekonstruksi yang dibiayai utang diukur dari keberhasilan pertumbuhan. Dalam hal ini, Negara Korona adalah entitas yang ambivalen. Negara intervensionis ekonomi akan menyantap asupan yang telah dibuat oleh kembarannya yang tidak setara—negara darurat pandemi. Dalam prosesnya, tujuan ekologis yang keberlanjutan tidak akan bisa bertahan.

Perubahan iklim menawarkan sebuah pelajaran. Hanya sekilas saja COVID-19 tampak bermanfaat secara ekologis. Seperti halnya keruntuhan [finansial global] tahun 2007, *lockdown* dan krisis ekonomi menyebabkan “mundurnya pertumbuhan (*degrowth*) karena bencana.” Memang benar bahwa mobilitas terbatas dan keruntuhan industri sementara telah mengurangi emisi karbon dioksida ke tingkatan yang belum pernah terlihat dalam beberapa dekade. Tetapi, dengan kebangkitan kembali ekonomi, emisi telah meningkat lebih

cepat daripada yang diharapkan. Perhitungan oleh Badan Energi Internasional (IEA) mengkonfirmasi penurunan 5,8% pada emisi di seluruh dunia dalam tiga bulan pertama tahun 2020; yang setara dengan emisi seluruh Uni Eropa. Namun sejak April 2020, emisi global telah meningkat kembali; pada bulan Desember, angkanya sudah berada di atas level bulan Desember dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai skenario pemanasan global 1,5- derajat yang menurut Panel Antar-pemerintah mengenai Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change) masih dapat dikendalikan, emisi gas rumah kaca global harus dikurangi rata-rata 7,6% per tahun—tetapi ini harus dilakukan terus menerus dan bukan sebagai akibat dari *lockdown* sementara. IEA [Badan Energi Internasional] khawatir bahwa peluang bersejarah dunia untuk mencapai puncak emisi global pada 2019 sedang disia-siakan. Kesulitan dalam perjuangan distribusi kemakmuran, yang dihadapi semua masyarakat sebagai akibat dari tingginya tingkat utang dan penurunan pendapatan pajak, dapat semakin memperburuk tren ini.

Akhirnya, kita harus mencatat bahwa meskipun negara intervensionis adalah sebuah Leviathan, monster ini mungkin memiliki efek yang menguntungkan. Leviathan melindungi warga nasionalnya sendiri dengan menempatkan kehidupan manusia di atas kepentingan ekonomi. Sisi lain dari hal ini, dengan sendirinya, ialah bahwa ia menjadikan pandemi sebagai sebuah sasaran persaingan antara kekuatan-kekuatan besar. Hanya negara yang memiliki cukup vaksin dan dapat dengan cepat menjalankan kampanye vaksinasinya melalui tindakan akan memiliki peluang lebih tinggi untuk pemulihan ekonomi secara cepat. Akibatnya, ancaman kesehatan global sedang diperangi dengan nasionalisme vaksin. Terlepas dari semua ekspresi solidaritas, pada musim semi 2021, 10 negara telah mendapatkan 76% dari vaksin yang tersedia. Sebanyak 85 negara berpenghasilan rendah mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mulai mengimunisasi populasi mereka. Hal ini meningkatkan risiko mutasi yang terbukti resistan terhadap vaksin. Negara-negara dengan sistem kapitalis yang dominan tidak mampu memperlakukan vaksin sebagai barang publik dan dengan cara demikian membantu tercapainya tujuan keberlanjutan perlindungan kesehatan untuk semua (SDG 3). Oleh karena itu, dalam bentuknya yang dominan, Negara Korona bukanlah penjamin kemajuan dalam konteks keberlanjutan sosial dan lingkungan. Analisis dan kritik sosiologis ini menyiratkan bahwa kita harus mendefinisikan kembali pokok bahasan kita. Negara harus menjadi fokus lagi dari keahlian sosiologi. Untuk benar-benar melakukan asesmen terhadap apa itu Negara Korona dan bagaimana cara kerjanya, kita membutuhkan program penelitian antardisiplin yang besar dan terfokus secara global. Sudah waktunya bagi komunitas sosiologi internasional untuk menangani tugas-tugas ini dengan cepat dan tegas. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Klaus Dörre <klaus.doerre@uni-jena.de>
Walid Ibrahim <walid.ibrahim@uni-jena.de>

1. “Nol Hitam,” merujuk pada anggaran berimbang [istilah di Jerman].

› COVID-19: Membuat Tempat Tidak Aman di Jerman

oleh **Daniel Mullis**, Institut Penelitian Perdamaian Frankfurt (PRIF), Jerman



| Ruang produksi yang telah ditinggalkan. Kredit: Daniel Mullis

Menurut Rosemary-Claire Collard, “justru kehidupan siapa atau kehidupan macam apa yang dapat diawasi atau dibuat aman” yang menjelaskan perhitungan biopolitik. Biopolitik, mengikuti Michel Foucault, adalah politik yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk. Hal tersebut adalah kemampuan untuk menentukan “membiarkan hidup” dan “membiarkan mati.” Matthew Hannah, Jan Simon Hutta, dan Christoph Schemann berpendapat bahwa tanggapan negara terhadap COVID-19 “telah dibenarkan dalam artian biopolitik melalui ‘biologisasi ulang’ populasi, dan suatu persepsi mengenai keharusan menyeluruh untuk sedapat mungkin membiarkan sebanyak mungkin orang tetap hidup.” Namun demikian, jelas bahwa beberapa nyawa dianggap lebih berharga daripada yang lain. Pada skala global, ketidaksetaraan perhatian terhadap populasi yang beraneka ragam terbukti dalam jumlah korban maupun dalam tingkat akses ke vaksin. Di seputar Amerika Utara dan Eropa, tingkat infeksi COVID-19 naik seiring dengan marginalisasi kelas, ras, dan gender. Pandemi memiliki geografi yang sangat khas, yang menyoroti segmen masyarakat yang terabaikan, tempat-tempat yang oleh negara tidak dianggap layak untuk diamankan. Saya akan menguraikan argumen ini dengan secara khusus merujuk pada Jerman.

› Peminggiran

“Di mana virus terkonsentrasi, Anda menemukan pinggiran (*the peripheral*), di kota dan masyarakat” ujar Samantha Biglieri, Lorenzo De Vidovich, dan Roger Keil. Dalam pembicaraan awal Januari 2021, Roger Keil mengidentifikasi tiga pola peminggiran (*peripheralization*): *Peminggiran spasial* melibatkan tempat-tempat yang tidak sentral dalam masyarakat kontemporer; *peminggiran kelembagaan* muncul dari praktik yang dipimpin negara yang mengorganisir masyarakat dengan cara yang mendorong kelompok masyarakat tertentu ke tepi; dan *peminggiran sosial* membahas pembagian rasial masyarakat—sebuah perspektif yang ingin saya perluas dengan menambahkan dimensi kelas dan gender.

Terkait dengan geografi COVID-19, Institut Robert Koch telah menunjukkan bahwa pada musim dingin 2020/21, angka

kematian di wilayah Jerman dengan deprivasi sosial ekonomi adalah sekitar 50% hingga 70% lebih tinggi daripada di kawasan dengan deprivasi sosioekonomi yang rendah. Data dari daerah perkotaan menunjukkan bahwa pandemi terparah melanda distrik-distrik di mana kepadatan penduduknya tinggi, orang-orangnya memiliki pendapatan rata-rata yang lebih rendah, dan tingkat kemiskinan lebih tinggi. Ketika membahas (non-)intervensi negara dalam konteks ini, *peminggiran kelembagaan* merupakan pola paling nyata di antara tiga pola peminggiran tersebut. Dua pola lainnya, misalnya, tampak dalam produksi kemiskinan maupun produksi peminggiran spasial.

Terkait pola pertama, kemiskinan telah menjadi lebih parah setelah diterapkannya reformasi sistem kesejahteraan Jerman yang disebut Agenda 2010. Antara lain: sektor upah rendah diterapkan dan bantuan sosial dasar ditata ulang. Kemiskinan tidak terjadi secara alami: kemiskinan diproduksi/reproduksi oleh sistem ekonomi yang tidak adil, dan dibantu oleh hukum dan kekuasaan negara. Konsekuensinya jelas. Angka-angka menunjukkan bahwa orang-orang yang bergantung pada bantuan sosial dasar jauh lebih terpapar oleh COVID-19 daripada bagian masyarakat yang lebih kaya. Mereka yang mengganggu untuk jangka panjang hampir dua kali lebih sering dirawat inap di rumah sakit daripada golongan orang bekerja. Orang-orang yang kurang memiliki sumber daya ekonomi hidup dalam permukiman yang terlalu padat atau berimpitan, yang sering terpinggirkan di perumahan sosial; mereka bekerja dalam kondisi rentan; dan mereka terputus dari infrastruktur digital, yang membuat sekolah rumah (*homeschooling*) yang layak menjadi tidak mungkin. Semua aspek ini menghasilkan kerentanan yang lebih tinggi dan berkembangnya kesenjangan sosial. Selama pandemi, yang kurang kaya telah kehilangan pendapatan, sementara kelas menengah telah mempertahankan statusnya, dan yang kaya menjadi makin kaya.

Pola kedua yang dibahas—peminggiran spasial—adalah proses politik yang diterapkan dari pusat masyarakat. Di satu sisi, keputusan politik di bawah prinsip-prinsip kenegaraan kapitalis menciptakan lanskap sentralitas dan pinggiran. Produk pola ini memunculkan pola pengucilan dalam perumahan sosial, kamp pengungsi, tempat penampungan untuk tunawisma, dan panti jompo, tetapi juga penciptaan kondisi kerja yang rentan. Selama pandemi, semua pengaturan sosial tersebut telah menjadi pusat penyebaran COVID-19. Pada saat yang sama, pusat permukiman dan distrik perkotaan telah secara khusus digambarkan dalam wacana politik sebagai tempat yang berbahaya untuk memisahkan pandemi dari masyarakat arus utama. Strategi ini sudah dikenal dalam wacana mengenai permukiman kumuh (*ghetto*). Pada langkah pertama, pandemi dikaitkan dengan ruang (*spatialized*), kemudian bagian dari ruang tersebut diberi label sebagai “migran”, “miskin”, “liar”, dll., yang mengarah pada kesimpulan bahwa ruang-ruang tersebut, bersama dengan penghuninya merupakan masalah yang sebenarnya.

› Sentralitas

Suatu hal yang menjadi jelas ialah bahwa penamaan suatu tempat sebagai tempat yang aman/tidak aman adalah suatu proses politik yang diterapkan oleh penguasa. Foucault berpendapat bahwa dalam perjalanan neoliberalisasi, ekonomi politik menjadi alasan yang menentukan bagi keputusan pemerintah. Wendy Brown menambahkan bahwa “tujuan negara adalah untuk memfasilitasi perekonomian, dan legitimasi negara terkait dengan pertumbuhan ekonomi.” Langkah-langkah Jerman yang bertujuan untuk membatasi penyebaran COVID-19 menganut prinsip tersebut. Menurut data yang tersedia, dari total nilai tambah bruto, hanya 12,8% yang secara langsung dipengaruhi oleh pembatasan yang terkait dengan pandemi: dampak tersebut paling terasa pada sektor eceran, katering, pendidikan, industri perjalanan dan rekreasi, dan budaya. Yang 87,2% dari ekonomi lainnya tetap dapat melanjutkan operasi nyaris tanpa dampak. Tidak pernah ada upaya untuk menutup ekonomi untuk melindungi angkatan kerja yang rentan terhadap penularan.

Oleh sebab itu, wabah massal di ruang yang terpinggirkan mengindikasikan adanya sentralitas. Ini terbukti dari tingginya angka infeksi di rumah pemotongan hewan, pusat logistik, dan sekolah. Di Jerman, industri daging merupakan sektor penting yang berorientasi pada ekspor dan produksinya tidak boleh terhenti. Dalam kasus pusat logistik, Agnieszka Mróz, seorang pekerja Amazon dari Poznan, Polandia, secara tajam merujuk pada poin ini tatkala ia menyatakan bahwa dia dan rekan-rekan kerjanya bukanlah korban, melainkan bekerja di pusat kapitalisme global, yang sangat penting untuk menjamin kelancaran arus komoditas. Dalam kasus sekolah, jelas bahwa anak-anak tidak pernah berarti banyak selama pandemi, terlepas dari banyaknya pembicaraan tentang hak-hak anak. Sekolah secara dibuka kembali terutama agar para orang tua tersedia bagi angkatan kerja, dan bukan demi keadilan pendidikan.

› Pola (non-)intervensionisme negara

COVID-19 menandai pola berbagai peminggiran spasial, kelembagaan, dan sosial; ruang-ruang inilah yang menjadi ruang utama di mana virus dan konsekuensi sosial memiliki efek samping terbesar. Deprivasi hak sosial ekonomi menghadapi khalayak pada risiko yang mematikan dan memiskinkan. Mengenai intervensiisme negara, sangat penting untuk menyoroti jalur otoriter dan berorientasi pada keamanan yang telah dipilih oleh sebagian besar pemerintahan di dunia dalam menghadapi virus ini, alih-alih melibatkan rakyat dalam suatu proses demokrasi berupa pembatasan kebebasan atas dasar solidaritas dan keadilan. Namun penting juga untuk menganalisis secara lebih hati-hati di mana negara telah memilih untuk tidak mengambil tindakan dan tidak membuat ruang-ruang menjadi aman. Dan di mana, sebaliknya, keputusan politik telah memperdalam pola eksternalisasi, marginalisasi, dan peminggiran di sepanjang dimensi kelas, ras, dan gender, untuk melindungi dan memisahkan rakyat dari mereka yang telah terpinggirkan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Daniel Mullis <mullis@hsfk.de>

› Setelah Depresi: Subjek Pasca-Neoliberal

oleh **Arthur Bueno**, Universitas Frankfurt, Jerman dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Analisis Konsepsi dan Terminologi (RC35)



Peralihan ke abad kedua puluh satu untuk sebagian besar ditandai ciri-ciri depresi, yang terutama berwujud perasaan lelah, kekosongan, dan ketidakmampuan bertindak. Kredit: Ehimetalor Akhere Unuabona di Unsplash.

Kita sedang hidup di era transformasi besar. Dari keruntuhan finansial 2008 hingga gelombang protes politik yang muncul di tahun-tahun berikutnya, dari bangkitnya gerakan-gerakan kanan ekstrem baru hingga dampak-dampak pandemi saat ini, rangkaian peristiwa itu menandakan bahwa kita sedang berada di persimpangan sejarah: satu dunia sedang sekarat sementara dunia yang lain belum lahir. Proses-proses ini mengajukan tantangan-tantangan baru bukan hanya untuk lembaga-lembaga yang sudah mapan, melainkan juga untuk sesuatu yang begitu dekat dengan kita: semua itu menunjukkan habisnya cara kita merasa, berpikir, dan bertindak yang selama beberapa dekade ini berlaku. Krisis kita juga merupakan krisis dari sebetulnya subjektivitas. Tanpa menimbang struktur subjektivitas dan perubahan-perubahannya, kita tidak akan bisa mengukur secara tepat bahaya maupun potensi situasi saat ini. Tetapi bagaimana kita bisa memahami subjek ini yang kini sedang mengalami krisis?

› Subjek entrepreneurial-depresif

Pergantian menuju abad dua puluh satu secara umum terjadi dalam rupa tanda depresi. Penderitaan psikologis saat itu tampaknya tidak lagi kelihatan dalam gejala-gejala neurotik klasik dari zaman Freud, melainkan dalam perasaan kele-

lahan, kekosongan, dan ketidakmampuan untuk bertindak. Neurosis Freudian tampil dalam sakit akibat *rasa bersalah*, yaitu saat subjek merasa terombang-ambing antara yang di-bolehkan dan yang dilarang, antara kuasa hukum dan kekuatan naluri yang direpresi. Karena itu depresi dapat digambarkan sebagai penyakit *ketidakcukupan (inadequacy)* yaitu saat semuanya tampak di-bolehkan tapi orang merasa tidak mampu meraih sepenuhnya semua kemungkinan yang tersedia. Orang mengalami depresi karena harus menanggung beban ilusi bahwa segalanya bisa diraih: keterbelahan antara yang mungkin dan yang tidak mungkin, antara yang tersedia tak habis-habisnya dan apa yang sungguh-sungguh bisa dilakukan, orang yang depresi adalah sosok yang “kehabisan bensin.”

Perubahan dari neurosis ke depresi semacam itu dalam diagnosis klinis bukan hanya menyangkut pengalaman penderitaan tertentu. Hal itu bisa dibaca secara lebih luas sebagai tanda munculnya tatanan sosial baru sejak 1960an: yaitu tatanan di mana individu-individu ditatapkan pada menguatnya tuntutan akan tanggung jawab pribadi dan pencarian diri dalam konteks melemahnya dukungan sosial dan melebarnya ketimpangan, menguatnya kompetisi, dan meningkatnya kerentanan. Sebagai akibat dari suatu “kedekatan elektif” (*elective affinity*) antara perkembangan rezim akumulasi pasca-Fordis dan melemahnya cita-cita Romantik tentang

otentisitas pribadi, suatu subjek baru muncul: “entrepreneur diri” (*entrepreneur of the self*) neoliberal yang diharapkan sukses secara ekonomi dengan cara menjawab tuntutan untuk “menjadi diri sendiri” atau, seperti digembar-gemborkan oleh sebuah buku *self-help* populer, *Best Self: Be You, Only Better*. Yang dituntut dari diri entrepreneurial ini bukanlah ketaatan disiplin, melainkan kelangsungan hidup pribadi yang dicari sendiri dan dipupuk secara eksperimental, yang komunikatif secara emosional, dan disesuaikan secara lentur dengan situasi pasar yang terus berubah.

Individu yang depresi menandai titik di mana tuntutan untuk menjadi entrepreneur diri tersebut menjadi problematik secara subjektif: ketika prospek perwujudan diri yang otentik berubah menjadi kekosongan dan kelelahan, ketika pencarian kehendak pribadi yang otonom berakhir dengan alienasi. Lebih dari sekadar diagnosis klinis, depresi dengan demikian telah menjadi kata kunci bagi berbagai kegagalan subjektif dalam hal ekspektasi normatif yang dilembagakan sepanjang beberapa dekade terakhir di abad ke dua puluh.

› Krisis dan politik kelelahan

Keadaan sosial seperti ini—yang bisa kita namai secara kiasan sebagai *masyarakat depresif*—dipenuhi dengan ketegangan yang meningkat, namun masih bisa cukup stabil dalam beberapa dekade terakhir. Sedemikian rupa sampai-sampai di peralihan abad ke dua puluh satu, tatanan kelembagaan ini sepertinya menghalangi artikulasi gejala-gejala depresi dalam hal klaim-klaim politik yang terang-terangan dan perlawanan sosial yang terorganisir. Saat ini tekanan tatanan ini semakin kuat sampai pada titik di mana kelangsungan sistem itu tampak benar-benar dalam bahaya: kelelahan depresif sudah sendirinya sampai pada titik leleh. Dalam hal inilah saya berpendapat bahwa kita hendaknya bicara tentang suatu *konstelasi pasca-depresif*: sebuah situasi di mana ketegangan sosial-psikologis dari tatanan depresif itu telah sampai puncak, berbuntut segala jenis reaksi dan perlawanan tetapi belum sampai pembentukan konsensus baru dan kerangka kelembagaan yang stabil.

Penjelasan seperti itu, menurut saya, didasarkan pada kenyataan bahwa bentuk-bentuk perlawanan politik yang banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini bisa ditafsirkan sebagai reaksi terhadap dua ketegangan utama yang ada dalam individualitas entrepreneurial-depresif neoliberal.

Dalam hal *otonomi*, subjektivitas bentuk ini menjanjikan bahwa orang bisa meraih kedaulatan diri melalui inisiatif wirausaha (*entrepreneurial*): dengan menawarkan suatu produk inovatif dalam salah satu di antara pasar-pasar yang membentuk kehidupan bersama saat ini, orang akan meninggalkan jejak yang personal pada produk dan mengubahnya sesuai gambar dan citra dirinya. Akan tetapi kegagalan terus-menerus dalam memenuhi janji ini menciptakan kesan kuat bahwa orang tunduk pada seperangkat hukum baku yang sering sulit dimengerti dan diubah: “Tidak Ada Alternatif.” Tidak mengejutkan memang bahwa beberapa gerakan di

zaman kita menyatakan ketidaksukaan terhadap elite berkuasa dan menuntut partisipasi lebih: gerakan-gerakan itu dapat dibaca sebagai bagian dari reaksi terhadap *fatalisme* dari bentuk-bentuk regulasi bersama yang marak.

Subjektivitas neoliberal juga ditandai oleh ketegangan kedua, kali ini mengenai *otentisitas*: ketegangan antara janji koneksi afektif dengan orang lain dan strukturasi kehidupan bersama sebagai kompetisi ala pasar di antara individu-individu yang mengalami atomisasi (lagi-lagi digambarkan dengan salah satu slogan Thatcher: “Tidak ada yang namanya masyarakat”). Meskipun demikian, tuntutan agar tiap individu itu swadaya telah mengakibatkan tumbuhnya perasaan terisolasi dan keretakan dalam masyarakat. Tidak mengejutkan memang bahwa beberapa gerakan politik di masa kita menyerukan keinginan untuk mengalami paguyuban yang afektif: gerakan-gerakan itu bisa dipandang sebagai bagian dari reaksi terhadap bentuk-bentuk *disintegrasi* sosial yang marak.

Akan tetapi, situasi pasca-depresif tersebut tidak bisa dilukiskan hanya dalam satu bentuk tindakan atau organisasi politik yang utuh. Kita sedang menghadapi bukan hanya se-bentuk tatanan baru melainkan juga suatu konstelasi baru, seperangkat reaksi dan cakrawala politik yang berbeda. Berikut ini, saya akan mengangkat dua posisi politik yang telah menjadi jamak dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi hendaknya tidak ditangkap sebagai satu-satunya yang muncul dalam krisis saat ini. Masa kini kita dibingkai oleh satu pertanyaan pokok—apa yang terjadi setelah depresi?—dan belum ada jawabannya.

› Keriuhan pasca-depresif

Banyak protes politik dari periode 2010-an—dari Arab Spring sampai Occupy Wall Street, sejak Juni 2013 di Brasil hingga rompi kuning (*gilets jaunes*) di Prancis — yang pada momen-momen yang menentukan dicirikan oleh pengalaman keterlibatan afektif dalam suatu kumpulan yang tidak terlalu terstruktur dan tidak punya tujuan yang jelas. Dua ciri tersebut penting untuk memahami mengapa gerakan-gerakan tersebut dilihat sebagai ekspresi situasi pasca-depresif.

Kekaburan normatif dan afektif dalam gerakan-gerakan tersebut, yang sering jadi sasaran kritik, juga membuat orang tertarik: kekaburan itu justru menimbulkan rasa guyub berdasarkan keikutsertaan dalam suasana yang sama, persepsi bahwa perbedaan sosial dan politik bukannya tidak bisa didamaikan, melainkan justru mengawali tumbuhnya kesatuan afektif yang dibangun dari keragaman. Ini penting untuk memahami daya hentak gerakan-gerakan tersebut. Berbeda dari ciri swadaya dari diri-entrepreneur dan isolasi yang dialami subjek depresif, pengalaman mencari diri di jalanan bersama macam-macam orang dirasakan banyak orang sebagai pengalaman yang membebaskan secara afektif atau “katartik”.

Kini, jelaslah bahwa rasa kebersamaan afektif (yang tidak amat jelas) ini berhubungan dengan konfrontasi melawan satu musuh bersama (yang juga digambarkan secara umum



saja): sistem politik, lembaga-lembaga yang ada, “semua yang ada di sana.” Pengalaman keriuhan kolektif ini diperdalam oleh kaitannya dengan perlawanan radikal, meskipun sesaat, terhadap norma-norma yang mapan. Konfrontasi dengan polisi, blokade jalanan, pendudukan kantor-kantor publik: secara mendadak, hidup ini kelihatannya tak lagi dikekang oleh perangkat hukum yang kaku, fatal. Berbeda dari adaptasi diri-entrepreneur terhadap norma dan perasaan tak berdaya subjek depresif, pengalaman menantang tatanan yang mapan bisa membuat orang merasa kembali mendapatkan kemampuan untuk *penentuan diri* kolektif yang efektif.

Kesempatan semacam itu, sayangnya, secara inheren tidak stabil. Akan segera muncul persepsi bahwa kebersamaan ini terjadi dari elemen-elemen heterogen yang tidak mudah disatukan; tak lama, mereka yang terlibat akan sadar bahwa posisi normatif mereka bisa menghasilkan tatanan-tatanan politik yang sangat berbeda. Seperangkat ketegangan baru muncul justru dari kekaburan normatif dan ketidakjelasan afektif dalam gerakan-gerakan ini. Ketegangan-ketegangan itu menandai awal mula dari perlawanan mengenai makna politis dan artikulasi kelembagaan dari pengalaman kolektif yang ambivalen tersebut—yang darinya muncul, antara lain, gelombang baru gerakan-gerakan sayap kanan ekstrem.

› **Otoritarianisme pasca-depresif**

Maraknya persepsi mengenai perpecahan masyarakat bisa menjelaskan mengapa kebangkitan kaum sayap kanan, mirip dengan yang terjadi dalam gerakan-gerakan di era 2010-an, ditandai oleh harapan yang tinggi terhadap paguyuban afektif. Akan tetapi, pengalaman tercebur dalam kerumunan yang heterogen, sekelompok “orang banyak” yang tak jelas, berubah menjadi konsep paguyuban (nasional) yang lebih seragam dan eksklusif—seperti dalam slogan Trump “Make America Great Again” atau slogan [Presiden Brasil] Bolsonaro “Brasil Di Atas Segalanya, Tuhan Di Atas Semua Orang.”

Sikap politik ini bisa dibaca sebagai reaksi *defensif* yang agresif terhadap disintegrasi sosial: ia menganggap kebersamaan afektif hanya bisa diperoleh lewat penyingkiran, atau bahkan pemusnahan, elemen-elemen luar yang dianggap merusak—bisa “komunis” (disamakan dengan kaum kiri), “penjahat” (disamakan dengan kaum miskin kulit berwarna), “musuh keluarga” (disamakan dengan gerakan feminis dan LGBTQI+), dan lain-lain.

Akan tetapi kaum sayap kanan ekstrem yang baru tidak hanya bereaksi terhadap persepsi mengenai perpecahan yang mendalam dengan menggelar kampanye moral yang berbeda; mereka juga bereaksi secara khusus terhadap suasana delegitimasi normatif yang muncul akibat krisis 2008 dan protes-protes politik dari 2010an. Dalam hal ini, yang dirasakan problematik tentang lembaga-lembaga sosial bukanlah bagaimana mereka tampil sebagai perwujudan “hukum alam” yang mutlak (seperti dalam tatanan depresif) melainkan bagaimana kita akan hidup di dunia di mana norma-norma “alamiah” telah kehilangan daya. Daripada terhadap situasi

fatalisme, subjek otoriter lebih banyak bereaksi terhadap anggapan tentang situasi *anomie*, yaitu perasaan bahwa bentuk-bentuk peraturan yang membuat relasi sosial tertata dan stabil tidak lagi berlaku.

Ini menjelaskan mengapa pandangan politik semacam itu tidak bertujuan menghentikan norma-norma yang berlaku, seperti pada pengalaman kebangkitan kolektif yang lalu, melainkan untuk menegakkan suatu tatanan represif. Sebagai reaksi terhadap masyarakat yang dianggap tercerai-berai dan tak punya aturan, kaum otoriter mendaku sebuah komunitas politik yang dapat memusnahkan sampai tuntas elemen-elemen pemecah belah dan menegakkan norma-norma yang cukup keras agar efektif.

Meskipun demikian, selain berciri otoriter, kaum sayap kanan ekstrem yang baru ini juga sering (terutama dalam kasus Brasil) ditandai oleh kampanye untuk melakukan radikalisasi proyek neoliberal lebih jauh lagi. Inilah paradoks dari otoritarianisme pasca-depresif: meskipun bereaksi terhadap krisis subjektivitas neoliberal dan menimba tenaga perlawanannya dari situ, gerakan ini dengan segala cara berupaya untuk melanjutkan, dan bahkan meradikalkan, bentuk subjektivitas yang sama tersebut. Persis pada struktur paradoksal ini—usaha melampaui depresi dengan menerapkan kembali kondisi depresi—terletak salah satu sumber potensi destruktifnya yang luar biasa.

Otoritarianisme dan neoliberalisme radikal dengan demikian bercampur di sini secara unik (mungkin bisa kita katakan: pasca-depresif). Aliansi politik keduanya, di satu pihak, mengarah pada gagasan bahwa suatu paguyuban yang mendalam dapat dibangun atas dasar penyingkiran, atau pemusnahan, setiap orang yang menolak cita-cita entrepreneur diri yang katanya sempurna: “warganegara yang baik.” Di lain pihak, aliansi itu juga mengarah pada gagasan bahwa suatu tatanan normatif yang kohesif hanya bisa dicapai dengan menegakkan secara tegas dan kalau perlu keras “hukum pasar”: tidak akan ada alternatif.

› **Melampaui depresi?**

Tentu menyesatkan kalau kita menganggap kombinasi Otoritarianisme baru dan neoliberalisme radikal itu sebagai satu-satunya wawasan yang diciptakan oleh situasi saat ini. Sebuah analisis yang lebih komprehensif, yang tidak dapat saya lakukan di sini, harus menimbang cara-cara yang dipakai oleh proyek-proyek politik untuk menanggapi krisis subjektivitas entrepreneurial-depresif—yang ketegangan inherennya bisa dianggap menguat setelah meledaknya pandemi. Meski demikian, langkah apa pun yang akan kita ambil secara kolektif tentang hal ini hanya bisa muncul dari ketegangan-ketegangan dan perlawanan-perlawanan yang diciptakan oleh konstelasi tersebut. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Arthur Bueno <oliveira@normativeorders.net>

› Representasi Visual

Karya Tak Kasat mata

oleh **Jenni Tischer**, Universitas Seni Terapan, Wina, Austria

Sebagai hasil dari langkah-langkah yang diperkenalkan untuk mengatasi COVID-19, beberapa dari kita mengalami jarak sosial, pembelajaran jarak jauh, pemisahan, dan isolasi di sejumlah lingkungan. Sepintas, sepertinya seseorang dapat berbicara tentang “kami”, “kita”, bahkan pengalaman kolektif, atau melangkah lebih jauh dan memikirkan kolektif global. Namun, berdasarkan pengalaman saya sebagai dosen di Universitas Seni Terapan di Wina, saya tidak sepenuhnya setuju bahwa hal tersebut mungkin dilakukan. Pada saat pembatasan drastis terhadap kebebasan bergerak individu di ruang publik, berbagai pilihan politik dan sosial yang sangat besar untuk menghadapi situasi luar biasa ini menjadi semakin jelas.

Ruang belajar dan pengalaman kolektif seperti sekolah dan universitas, serta ruang publik seperti taman dan fasilitas bermain anak, masih hanya dapat diakses untuk sebagian sehingga fokus kehidupan otomatis beralih ke ruang privat. Ketika pekerjaan hilang dan anak-anak tidak dapat lagi dititipkan ke fasilitas penitipan anak—tanpa pilihan berupa rumah akhir pekan dengan taman—orang-orang menjadi terbatas pada ruang kecil di rumah mereka. Statistik menunjukkan bahwa telah terjadi lonjakan kekerasan psikologis dan domestik dalam rumah tangga, dan isu pembagian kerja berdasarkan gender (kembali) menjadi agenda. COVID-19 pada dasarnya menunjukkan jenis pekerjaan yang diandalkan masyarakat kita: tenaga kerja yang relevan dengan sistem dan reproduksi. Kita semua bergantung pada jasa perawatan, baik yang dibayar dan tidak dibayar. Tiap tubuh dan lingkungannya perlu dipelihara, dirawat, dibersihkan, diberi makan, dicintai, diasuh, dipegang, diperhatikan, disembuhkan, diregenerasi. Saya ingin menunjukkan di sini bahwa gagasan “relevan dengan sistem” pada khususnya bersifat kontroversial, karena menyiratkan bahwa pekerjaan tertentu tidak (sedemikian) relevan dengan “sistem.”

Seperti yang telah kita semua alami, meningkatnya perhatian media terhadap pekerjaan-pekerjaan yang menjamin kebutuhan dasar dan eksistensial kita, seperti halnya kehadiran karyawan di pasar swalayan, menyebabkan orang melakukan hal-hal seperti bertepuk tangan sebagai tanda penghargaan. Salah satu mahasiswa saya, Nora Licka, menulis makalah tentang perbedaan antara gerak-

an yang dilakukan secara kolektif di depan umum dengan solidaritas sebagai tindakan politik. Kesimpulannya adalah bahwa tindakan apresiasi yang dilakukan secara kolektif di depan umum adalah isyarat kuat yang dapat mengubah cara orang berpikir dan memberi mereka harapan dan kekuatan untuk bertahan. Namun, pada akhirnya, hal itu tidak akan berkontribusi pada kondisi kerja yang lebih baik dan lebih aman bagi pekerja di pasar swalayan, rumah sakit, pusat penitipan anak, dan sebagainya, atau pada penjaminan upah yang setara dan lebih baik serta jam kerja yang lebih sedikit dalam jangka panjang. Terlebih lagi, ketika kita kembali ke pertanyaan tentang apa yang terutama diklasifikasikan sebagai relevan dengan sistem, kita menjadi sadar bahwa pekerjaan tak kasatmata (dan tidak dibayar) ada karena berada di ranah privat, domestik, atau karena memang dilakukan pada malam hari.

Dengan latar belakang ini, saya ingin memperkenalkan dan mendiskusikan dua kolase saya dari tahun 2020 yang menyertai teks ini: “Nightcleaners” (Pembersih malam) dan “Service” (Layanan). Dalam kolase “Nightcleaners,” Anda dapat melihat gambar yang dipotong dan digandakan, diambil dari film dokumenter eksperimental *Nightcleaners* (1972-75) oleh The Berwick Street Film Collective, dan dua patung marmer berbaring yang dipotong dari gambar dokumentasi *Hartford Wash: Washing/Tracks/Maintenance: Inside* (1973), pertunjukan oleh seniman Mierle Laderman Ukeles yang berlangsung di Wadsworth Atheneum Museum di Hartford. Ide awal Berwick Street Film Collective adalah mengajak sekelompok perempuan imigran dan kelas pekerja untuk bergabung dengan sekelompok aktivis feminis dalam upaya membentuk serikat pekerja. Salah seorang seniman, Mary Kelly, adalah bagian dari tim film dan juga terlibat dalam kampanye pembersih malam sebagai aktivis feminis. Salah satu konsep pertama adalah pembuatan suatu cuplikan film dokumenter bayangan waktu nyata (*real-time*) sebagai film berdurasi sekitar delapan jam yang hanya menampilkan pembersihan toilet. Menyinggung poster film *Nightcleaners* yang menggambarkan urutan seorang wanita membersihkan toilet, gambar diam dalam kolase mewakili aktivitas berulang yang berpotensi tak berujung membersihkan sisa-sisa pekerja kantor di malam hari. Di kaki wanita itu kita melihat gambar ganda dari patung marmer putih seorang wanita tergeletak di tanah, ditangkap dalam pose yang tampak santai.



Jenni Tischer, "Nightcleaners," kolase di atas kertas, 30 x 40 cm.

Patung ini dapat dilihat di latar belakang foto yang diambil untuk mendokumentasikan pertunjukan seni seniman Amerika Mierle Laderman Ukeles saat ia membersihkan lantai museum. *Manifesto for Maintenance of Art* (Manifesto untuk Pemeliharaan Seni) yang ditulis sang seniman pada tahun 1969 dan karyanya secara keseluruhan membahas bidang-bidang pekerjaan rumah tangga, pekerjaan reproduksi, dan sanitasi yang tidak diakui dan tidak dihargai. Dengan memindahkan pekerjaan rumah tangga dari ranah privat ke ranah publik, hal itu menjadi terlihat. Dan dengan menyatakan karya ini sebagai seni ["Saya kerja keras mencuci, membersihkan, memasak, memperbaiki, mendukung, melestarikan, dll. Juga, (sampai sekarang, secara terpisah) saya 'melakukan' Seni. Saya akan senantiasa melakukan kegiatan ini sehari-hari, dan menyiramnya ke kesadaran, memamerkannya, sebagai Seni."] serta menampilkannya sebagai peristiwa berkesenian, Laderman Ukeles tidak hanya menyodorkan pertanyaan tentang visibilitas dan nilai kerja reproduksi, tetapi juga menunjukkan bagaimana substrat sistemik dukungan material (bahkan ketika didefinisikan sebagai seni) pasti terjerat dengan produksi nilai, terutama jika prosesnya tampaknya tidak material. Konstruksi terbalik representasi dalam kolase mempertanyakan hierarki kulit putih yang diwakili



Jenni Tischer, "Service," kolase di atas kertas, 30 x 40 cm.

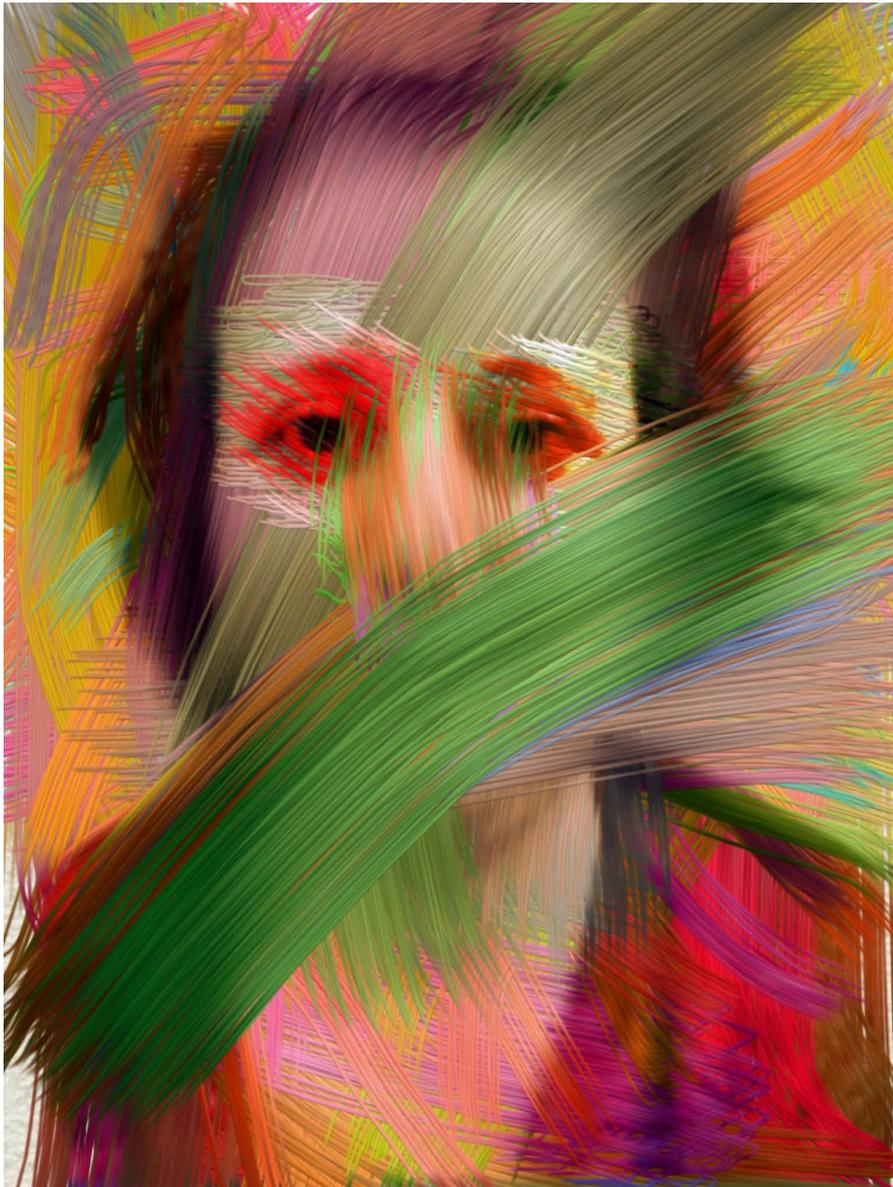
oleh ikonografi bergaya Klasisisme yang mengabaikan *polychromy* apa pun dalam seni pahat, membangun ideologi rasisme berdasarkan *monochromy* murni dan warna putih murni (*pure whiteness*) yang belum pernah ada di dunia kuno sebelumnya.

"Service" adalah kolase yang terbuat dari salinan gambar di sebuah koran, menampilkan seorang wanita sedang bersih-bersih di depan poster yang menggambarkan seorang wanita dengan *headset*. Wanita yang sedang membersihkan lantai ditampilkan dari belakang dan mengenakan seragam biru. Sebaliknya, wanita di poster itu tersenyum ke arah kita dan digambarkan mewakili operator layanan telepon yang menyenangkan dan ramah. Kolase tersebut menyorot bahwa meskipun peralatan teknis dapat berubah—seperti halnya kemoceng dan robot pengisap debu bersatu pada kolase—tidak mungkin hal tersebut dengan begitu saja merekonstruksi penghargaan kita pada tenaga kerja di sektor jasa dengan menggunakan gambaran (*image*) atau perlengkapan yang berbeda. Kesalingterkaitan antara representasi, penghargaan, dan pekerjaan tak kasatmata masih perlu disorot dan diurai untuk menjawab struktur tersembunyi dalam pendefinisian "pekerjaan kotor" yang sering kali dipisahkan oleh garis kelas, ras, dan gender. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Jenni Tischer <jenni.tischer@uni-ak.ac.at>

› Kekerasan Domestik selama Pandemi Global

oleh **Margaret Abraham**, Universitas Hofstra, AS, mantan Presiden ISA (2014-18) dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Rasisme, Nasionalisme, Masyarakat Adat dan Etnisitas (RC05), Sosiologi Migrasi (RC31), Perempuan, Gender dan Masyarakat (RC32), Hak-hak Asasi Manusia dan Keadilan Global (TG03) dan Kekerasan dan Masyarakat (TG11)



| Kredit: [Flickr/Jane Fox](#).

namun hal ini telah mengakibatkan apa yang oleh beberapa orang namakan “pandemi bayangan” (*shadow pandemic*) berupa kekerasan domestik. Kebijakan-kebijakan isolasi dan menjaga jarak, yang vital bagi kesehatan masyarakat dan keamanan, secara ironis telah berarti kurangnya keamanan bagi mereka yang berada dalam hubungan yang bersifat disfungsi dan menindas (*abusive*). Kondisi tekanan finansial dan mental, yang juga disebabkan oleh pandemi, di beberapa keluarga telah mengakibatkan penindasan (*abuse*) yang sebelumnya tidak ada. Bagi mereka yang sudah mengalami penindasan, kondisi tersebut telah memperparah dan memperburuk kekerasan, yang dalam beberapa kasus telah mengakibatkan kematian.

Kekerasan domestik menyangkut kekuasaan dan pengendalian yang diterapkan seorang individu terhadap individu lain dan dapat diwujudkan dengan berbagai cara: fisik, emosional, lisan, seksual, psikologis, dan ekonomis. Namun meskipun kekerasan domestik terjadi di semua komunitas, hal tersebut tidak dapat digeneralisasikan. Setiap kejadian dan hubungan memiliki konteks perbedaan kekuasaan, privilese, dan pengendalian. Pun terdapat persamaan dan perbedaan pengalaman yang kompleks yang didasarkan pada interseksi ras, etnisitas, kelas, gender, orientasi seksual,

Fakta mengenai terjadinya peningkatan pada kekerasan domestik di masa-masa krisis dan ketidakpastian telah terdokumentasi dengan sangat baik. Pandemi global COVID-19 pun tidak terkecuali. Sejak Maret 2020, virus korona telah mengakibatkan perintah “karan-

tina wilayah” (*lockdown*), “tinggal di rumah” (*stay-at-home*), dan “berlindung di tempat” (*shelter-in-place*) yang mendunia, yang menempatkan pembatasan-pembatasan pemerintah terhadap gerak masyarakat. Meskipun hal ini telah terbukti menjadi langkah yang diperlukan dalam memperlambat penyebaran virus,

kasta, budaya, usia, wilayah, dan status imigran. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan domestik mempunyai dampak tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok termarginalisasi pada jenjang mikro, meso, dan makro. Pandemi COVID-19 telah membuktikan kebenaran hal ini, karena kelompok-kelompok termarginalisasi memikul beban lebih berat dalam arti hilangnya pekerjaan, kesulitan finansial, dan infeksi (misalnya lebih terpapar karena menyandang pekerjaan penting di bidang pelayanan, dan/atau akses lebih terbatas ke pelayanan kesehatan).

› **Kondisi pandemi**

Sejak Maret 2020, laporan dari berbagai negara menunjukkan bahwa karantina wilayah dan berbagai pembatasan yang telah diterapkan telah meningkatkan dan mengintensifkan kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Ketidakmampuan dan berkurangnya peluang bagi mereka yang mengalami penindasan untuk melarikan diri dan meninggalkan kungkungan tempat tinggal mereka telah mengakibatkan isolasi dari teman, kerabat, tempat kerja, dan jejaring pendukung lainnya. Hal ini kemudian menciptakan kondisi di mana para penindas telah menerapkan peningkatan pengawasan dan pengendalian secara terus-menerus terhadap para korban mereka, dan dapat memantau dan membatasi perilaku mereka melalui pembatasan akses ke makanan, pakaian, layanan kesehatan, dan produk sanitasi. Pandemi, secara tidak disengaja, telah pula menciptakan hambatan pada ketersediaan sumber daya komunitas dan kesehatan mental yang sangat diperlukan. Bukan hanya rasa takut, tetapi ketiadaan pilihan aman yang tersedia telah memaksa pula para korban penindasan untuk tetap berada bersama para penindas mereka.

Kondisi-kondisi yang diciptakan virus korona telah mengurangi banyak bentuk dukungan institusional dan sosial bagi kita semua. Sementara kekuasaan dan pengendalian terus merupakan inti dari kekerasan domestik, faktor-faktor penyebab telah meningkat melalui tekanan-tekanan dan penderitaan yang terkait dengan pandemi termasuk ketiadaan keamanan pangan, pengangguran, ketakutan dan kecemasan, frustrasi, depresi, alienasi, dan kesedihan. Penutupan sekolah dan fasilitas pengasuhan anak dalam banyak kasus telah menambah ketegangan ini dan membebani sumber daya keluarga pada berbagai tingkatan; hal tersebut juga meningkatkan kerentanan anak-anak dalam rumah tangga yang bersifat menindas. Berkomunikasi dan mencari pertolongan di dalam kungkungan tempat tinggal menjadi lebih sukar, khususnya di kala langkah-langkah kesehatan masyarakat dan keamanan mengharuskan organisasi-organisasi untuk secara fisik menutup kantor-kantor dan beralih ke jaringan (*online*). Namun COVID-19 telah mendorong pula beberapa organisasi untuk mulai berpikir kreatif mengenai cara-cara baru untuk menjangkau dan memberikan jasa dukungan yang sangat diperlukan.

Pada awal pandemi sudah ada kesadaran mengenai adanya masalah ini. António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menghimbau pemerintah-pemerintah untuk mengambil langkah untuk mengatasi “peningkatan global secara mengerikan dalam kekerasan domestik” dan untuk mengatasi keselamatan kaum perempuan, di kala mereka menanggapi pandemi. Organisasi-organisasi berbasis kelompok dan komunitas serta organisasi-organisasi anti-kekerasan telah menanggapi dengan berbagai cara untuk membantu orang-orang yang mengalami kekerasan domestik. Di AS, Hotline Nasional Kekerasan Domes-

tik melaporkan adanya peningkatan 9.5% dalam jumlah panggilan [telepon] yang diterima antara 16 Maret dan 16 Mei 2020 dibandingkan dengan periode sama di tahun 2019. Mereka juga mendokumentasikan bagaimana para penindas menggunakan COVID-19 untuk melanjutkan pengendalian dan penindasan. Perwujudan perilaku penindasan dan pengendalian oleh para pelaku kini mencakup penolakan memberi makanan maupun sarana kesehatan dan keamanan penting seperti sabun, disinfektan, dan masker pelindung. Di beberapa negara tindakan para penindas telah ditingkatkan di kala akses ke sistem hukum dan sistem dukungan lain seperti polisi, tempat perlindungan, dan pengadilan jumlahnya terbatas, dan kasus-kasus ditunda. Bagi para imigran hal ini diperparah dengan ketakutan deportasi. Peran negara dan kebijakan serta praktik pemerintah di seputar migrasi intern dan ekstern selama pandemi telah membawa implikasi yang sering terabaikan bagi mereka yang mengalami kekerasan berbasis domestik dan gender.

Di kala organisasi-organisasi yang menangani kekerasan domestik menerapkan protokol keamanan selama pandemi, mereka harus mengubah cara kerja mereka dalam mendukung para penyintas. Kavita Mehra, Direktur Eksekutif *Sakhi for South Asian Women* [suatu organisasi anti kekerasan domestik] di New York, menjelaskannya sebagai berikut:

Selama bulan-bulan Maret dan April, di saat perintah berlidung-di-tempat diberlakukan di kota New York, Sakhi for South Asian Women sedang melayani suatu komunitas yang hidup di episentrum dari episentrum. Dari percakapan tim kami dengan para penyintas, khususnya mereka yang tinggal di Brooklyn, Queens dan Bronx, mereka sedang menyaksikan bahwa bentuk-bentuk

kekerasan meningkat dan menjadi semakin ekstrem. Secara bersamaan, mereka sedang mengelola dampak yang tak terduga dari pandemi, yang mengakibatkan angka ketidapastian perumahan, makanan dan utilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dukungan terbatas dari paket federal berperan sebagai suatu bantuan bagi penyintas tertentu; para penyintas yang tidak memiliki dokumen dan/atau masih memiliki akun bank bersama para penindasnya tidak terlindungi. Untuk mendukung komunitas kami, Sakhi membagikan lebih dari \$130.000 dalam bentuk bantuan darurat dan hampir 16.000 pound makanan dari bulan Maret hingga Oktober 2020.

Beberapa organisasi kekerasan domestik tidak menerima sedemikian banyak panggilan karena tantangan, rasa takut, dan ketiadaan privasi yang dihadapi orang-orang yang berada dalam jeratan dan pembatasan tempat tinggal.

› Apa yang dapat dilakukan oleh para sosiolog?

Penanganan kekerasan domestik tidak dapat menunggu berakhirnya pandemi. Sebagai sosiolog, kita harus bersandar pada sosiologi global yang kontekstual dan berhimpun bersama para ilmuwan, ilmuwan sosial, perumus kebijakan, aktivis, dan pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan suatu agenda untuk mengakhiri kekerasan yang terkait dengan gender dan mendorong perubahan struktural. Kita memerlukan metode pengumpulan dan pelaporan data yang lebih baik. Kita perlu memahami dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak pada pengalaman kekerasan domestik selama COVID-19, dan kita harus menggunakan pemahaman tersebut untuk mendorong tindakan sosial. Apa yang menghalangi dan membantu kaum perempuan dan anak-anak untuk melepaskan diri dari hubungan penindasan selama bencana, dan

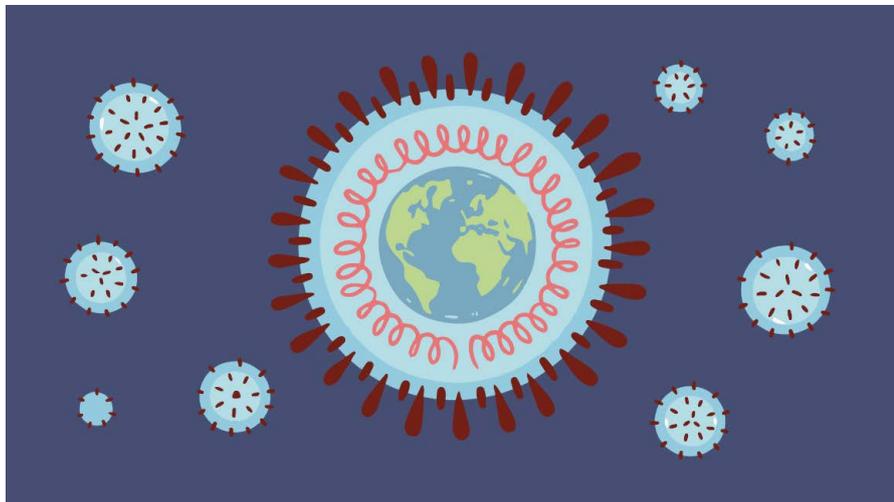
apa tantangan dan keberhasilan yang pernah kita saksikan? Dengan menggunakan suatu pendekatan interseksional, kita harus menggunakan pengetahuan, teori, dan analisis, untuk menyoroti, bertindak, dan melakukan intervensi. Kita perlu mendukung organisasi-organisasi dan inisiatif-inisiatif yang menemukan cara-cara kreatif untuk menghadapi realitas baru ini. Kita sendiri harus melakukan imajinasi dan rekonfigurasi ulang bagaimana kita akan mengatasi kekerasan domestik, dan segala bentuk kekerasan berbasis gender, selama periode ini dalam sejarah manusia. Kaum perempuan dan anak-anak dalam karantina wilayah, di tempat tinggal bersama para penindas mereka, tidak dapat menunggu. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Margaret Abraham <Margaret.Abraham@Hofstra.edu>

› Krisis COVID-19:

Sosiologi Baru dan Feminisme

oleh **Karina Batthyány**, Sekretaris Eksekutif CLACSO, Uruguay dan **Esteban Torres**, Universidad Nacional de Córdoba-CONICET, Argentina



| Kredit: Creative Commons.

duksi pengetahuan ditransformasikan bukannya sepenuhnya tak diketahui sama sekali. Perubahan sosial biasanya mengedepan dengan sendirinya di sepanjang dua aksioma. Pertama, peristiwa dan proses sejarah menentukan pedoman produksi pengetahuan dalam ilmu-ilmu sosial, dan bukan sebaliknya. Penularan COVID-19 muncul sebagai peristiwa “eksternal” dan objektif yang sepenuhnya berdampak pada ranah sosial-ilmiah. Empat dasawarsa sebelumnya, peristiwa lain “di luar” bidang regional, seperti dimulainya mesin pemusnah kediktatoran militer di Amerika Selatan, menghancurkan basis-basis yang asli dari sosiologi, mengganggu gerak globalisasi yang telah dilangsungkannya dengan kecepatan tinggi sejak tahun 1960-an.

Kedua, akal sehat berada di depan sains, hanya untuk kemudian ditelan olehnya. Di sini muncul persepsi baru mengenai kepemilikan global dalam keadaan embrionik, tanpa mampu mengkode ulang dirinya sendiri dengan instrumen teoretis dan analitis baru serta tindakan praktis. Jika kita memutuskan untuk menganggap serius fenomena COVID-19, jika kita membenamkan diri di dalamnya dengan perhatian penuh, kita harus membiarkannya menyapu kita sepenuhnya. Sebagai ilmuwan sosial, kita biasanya bersedia untuk mengasumsikan dengan ketenangan tertentu premis bahwa kebenaran

Bagi ilmu-ilmu sosial, kebaruan utama yang dihasilkan oleh mega-krisis terkait dengan perluasan COVID-19 adalah pengakuan bahwa kita tidak mungkin mengabaikan bahwa kita hidup dalam masyarakat teritorial yang semakin saling tergantung secara global. Jika sebelum tahun 2020, studi sosial masih mampu mengembangkan pembenaran untuk mengesampingkan kerangka global bagi pengamatan, hal ini sudah tidak berlaku. Pandemi memulai proses perhatian yang tidak dapat diubah, yang cepat atau lambat akan mempengaruhi semua objek penelitian, dan dari sana tidak ada jalan untuk kembali.

Sudah tidak mungkin lagi menghilangkan keberadaan masyarakat global tanpa jatuh ke dalam anakronisme yang serius. Jika di masa navigasi ma-

ritim, penaklukan Amerika mengawali globalisasi material, kemungkinan serangan yang ditimbulkan oleh representasi COVID-19 di layar digital kita akan sekali dan untuk selamanya mengganggu globalisasi sebagai kedangkalan intelektual. Jadi, alih-alih memperluas proses globalisasi material, pemrosesan kolektif reinkarnasi (*avatar*) dari COVID-19 adalah memperluas proses globalisasi mental. Kita tidak menyaksikan penurunan kepekaan mikro-sosial dan singularisasi subjektif, melainkan akhir yang vertikal, tiba-tiba, tak terpicirkan dari proses panjang ketidaktahuan dan penyangkalan sejarah terhadap kekuatan gravitasi dinamika dunia terhadap masyarakat.

› Mekanisme produksi pengetahuan ilmu sosial

Mekanisme bagaimana agenda pro-

“Krisis dunia COVID-19 memberi kita kesempatan untuk maju dalam penciptaan teori-teori baru mengenai masyarakat dunia untuk semua sosiologi, untuk menghadapi globalisasi yang berkembang dari ketidaksetaraan sosial, gender, dan ekonomi dengan cara yang lebih baik, dari setiap lokasi historis”

bersifat sementara, tetapi bukan konsekuensi praktis yang lebih buruk yang dibawa oleh penegasan semacam itu: bahwa setiap perspektif dan ide yang diciptakan perlu dihancurkan secara sistematis atau perlu menghancurkan dirinya untuk diciptakan kembali. Ini adalah satu-satunya metode yang dilakukan sejauh ini untuk menghindari hidup nyaman dalam kepalsuan.

› **Teori baru mengenai masyarakat dunia**

Sama seperti masyarakat dunia yang bukan merupakan produk dari satu lokasi, teori masyarakat dunia juga tidak seperti itu. Masyarakat dunia dapat menyerupai jaringan tatanan yang lebih tinggi, yang membedakan, mengintegrasikan, dan menghubungkan seluruh lingkup sosial nasional, regional, dan global. Kita dapat berasumsi bahwa setiap titik lokasi sosial di dunia adalah kondensasi unik, langsung dan tidak langsung dari ketiga lingkungan yang saling berinteraksi ini. Masyarakat global Jerman jelas tidak sama dengan masyarakat global Argentina, Uruguay, Meksiko, Chili, atau Tiongkok. Tetapi kesemuanya, berdasarkan interaksi mereka satu sama lain, membentuk masyarakat dunia. Juga tidak ada yang namanya sistem patriarki tunggal atau kapitalisme global: yang ada adalah mode patriarki yang konkret, serta dinamika penundukan yang berbeda antara kapitalisme pusat dan periferi dalam masyarakat dunia.

Pengakuan prinsip diferensiasi yang tidak dapat direduksi ini tidak menghilangkan kemungkinan untuk menemukan keteraturan universal, tetapi kita meminimalkan kemungkinan bahwa hubungan dan proses struktural dapat menghasilkan modalitas identik di lokasi yang berbeda. Mengakui bahwa bagian lapisan (*substratum*) masyara-

kat bersifat duniawi menyiratkan bahwa materialitas ilmu-ilmu sosial dan sosiologi juga bersifat duniawi. Sejak tahun 1960-an, sosiologi Amerika Latin tidak lagi menjadi “Liyan” dari sosiologi, atau hanya reproduksinya yang terasing, menjadi suatu arus yang aktif dari sosiologi dunia. Dalam pengertian ini, kami berasumsi bahwa teori tentang masyarakat dunia yang kita bangun menuntut pengetahuan tentang jaringan total dari lokasi-lokasi antara, menyeimbangkan sudut pandang seseorang tentang totalitas berbeda-beda ini dengan sudut pandang dari lokasi masing-masing, dan berdasarkan praktik yang diperluas ini mengaktifkan latihan antropologis untuk mencoba “menempatkan diri di tempat Orang Lain.” Dari asumsi awal ini, dunia tidak akan ditaklukkan dengan mengumpulkan semua pengetahuan yang ada, tetapi dengan menciptakan dialog global baru, yang mampu menghasilkan sintesis baru dari pandangan dunia yang dihasilkan dan diproyeksikan dari setiap titik lokasi historis.

Krisis dunia COVID-19 memberi kita kesempatan untuk maju dalam penciptaan teori-teori baru mengenai masyarakat dunia untuk semua sosiologi. Visi global baru akan memungkinkan kita untuk menghadapi globalisasi yang berkembang dari ketidaksetaraan sosial, gender, dan ekonomi dunia dengan cara yang lebih baik, dari setiap lokasi historis. Dalam kasus perspektif feminis kritis, cukup jelas bagaimana globalisasi yang lebih besar dari visi mereka dapat meningkatkan program transformasi sosial struktural mereka. Hal ini akan menjadi proses penyesuaian intelektual terhadap penyebaran materi gerakan politik, yang pada dasarnya bersifat global.

Dengan sosiologi kritis modern pertanyaannya lebih rumit. Globalisasi lebih lanjut terhadap perspektifnya ini tidak selalu mengarah pada pengembangan

ilmu yang terlibat secara sosial. Hal tersebut bahkan kurang mengarah pada sosiologi yang berpotensi transformatif. Penting untuk mempersoalkan lebih lanjut gagasan komitmen politik dalam sosiologi kritis modern untuk memahami mengapa hal itu tidak menghasilkan efek politik ekstra-akademik selama beberapa dekade. Kami percaya bahwa perlu untuk menempatkan praktik-praktik semacam itu demi kebijakan umum perubahan sosial. Perkembangan sosiologi kritis modern, yang terlibat secara politik, menuntut semacam hubungan baru dengan politik gerakan dan partai nasional. Ini adalah masalah meninggalkan ruang akademis yang nyaman, dengan cara yang sama seperti yang dilakukan arus sosiologis hingga tahun 1970-an—setidaknya di Amerika Latin—dan yang dilakukan oleh pemikiran kritis feminis saat ini. Pendekatan politik nasional menuntut integrasi prinsip realitas yang merupakan penangkal terbaik terhadap proto-radikalisme kritik sebagai tujuan, dan melawan utopianisme maksimalis yang tidak dapat secara konkret menjelaskan bagaimana kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih baik untuk semua. Pada gilirannya, transformasi politik sosiologi kritis modern ini merupakan kondisi yang diperlukan untuk memasuki dialog yang kuat dan konstruktif dengan feminisme.

Hal tersebut akan tergantung pada kita, pada kapasitas kita untuk membangun komunitas intelektual, ilmiah, dan politik, untuk menempatkan inisiatif kolektif dengan kekuatan yang cukup untuk mempercepat perubahan struktural yang dapat mengubah arah masyarakat kita saat ini dalam masa historis yang membingungkan ini. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Karina Batthyány <kbatthyany@clacso.edu.ar>
Esteban Torres <esteban.torres@unc.edu.ar>

› Dampak Global Menakutkan dari COVID-19

oleh **Mahmoud Dhaouadi**, Universitas Tunis, Tunisia dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Sejarah Sosiologi (RC08), Sosiologi Agama (RC22), dan Bahasa dan Masyarakat (RC25)



Pandemi COVID-19 telah memukul parameter sosial yang paling mendasar dari eksistensi kolektif manusia: interaksi sosial. Bagaimanakah penjarakan sosial akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita di masa mendatang?

Kredit: [Wikimedia Commons](#).

Sebagaimana diketahui, pandemi virus korona adalah peristiwa bencana dunia yang sangat tidak lazim. Ini telah menyeret para spesialis kesehatan maju ke garis depan demi mengurangi angka kematian dan jumlah pasien yang tertular, terutama di masyarakat-masyarakat maju. Beberapa dari masyarakat ini dan lainnya telah dipaksa lebih dari satu kali untuk me-

lakukan pembatasan sosial secara luas selama berminggu-minggu. AS dan Inggris adalah contoh-contoh yang mengemuka. Konsekuensinya, krisis tersebut harus menjadi perhatian prioritas bagi para ilmuwan sosial yang harus dianalisis tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga melalui perspektif kualitatif. Analisis semacam itu mungkin sangat penting untuk memperbaiki keadaan planet Bumi sekarang dan di masa depan.



› **Ilmu-ilmu sosial harus memperhatikan diri**

Pandemi COVID-19 telah menghantam parameter sosial paling dasar dari keberadaan kolektif manusia, yaitu interaksi sosial. Slogan “tinggal di rumah” telah menjadi pesan utama di sebagian besar negara. Interaksi sosial yang normal telah tertahan secara global. Interaksi-interaksi sosial biasa di dalam dan antar masyarakat tidak sama [lagi] dan gelombang korona di masa depan hampir tidak dapat disingkirkan. Kehadirannya saat ini secara global dan potensi kesinambungannya untuk tahun-tahun mendatang dapat menjadi bagian dari arus utama pola kehidupan orang-orang dan berbagai masyarakat.

Ada masalah khusus yang dihasilkan oleh pandemi COVID-19. Secara sosiologis, situasi pandemi yang mengkhawatirkan tersebut menghadirkan suatu masalah sosial global baru di mana ilmu-ilmu sosial harus menemukan konsep-konsep baru dan memahami alat-alat baru yang berbeda, misalnya, konsep-konsep dari mendingang sosiolog Erving Goffman (1922-82). Bersumber pada Interaksionisme Simbolik, ia menyediakan sebuah kamus konsep-konsep sosiologis baru yang memfasilitasi pemahaman mengenai catatan pengamatan rinci dari interaksi-interaksi tatap muka. Di dalam pandemi global yang sedang berlangsung, konsep-konsep sosiologis baru yang potensial perlu ditemukan untuk menganalisis konsekuensi-konsekuensi selanjutnya dari pandemi ini bagi manusia, seperti ketidakpastian hidup, kehilangan kendali yang signifikan atas peristiwa-peristiwa, perhatian yang terpusat hanya pada kekinian. Sosiologi kualitatif mungkin lebih siap untuk menangani fitur-fitur baru ini. Namun, tugas ilmu-ilmu sosial sebenarnya ada dua:

Pertama, kita perlu mempelajari dampak sosial dan psikologis pandemi COVID-19 saat ini terhadap perilaku masyarakat dan dinamika berbeda dari masyarakat yang telah mengalami krisis sejak Desember 2019. Majalah *Scientific American* pada edisi Juni dan Juli 2020 telah menaruh fokusnya pada dampak sosial dan psikologis pandemi korona kepada setiap orang: apa yang telah diajarkan

pandemi kepada kita tentang bagaimana orang merespons kesulitan? Edisi Juni tersebut telah menggarisbawahi tekanan yang dihadapi oleh dokter dan perawat di rumah sakit publik maupun swasta serta klinik-klinik. Namun dalam edisi Agustus 2020 majalah ini menggunakan nada yang agak menenangkan mengenai virus korona dengan menunjukkan bahwa jarak sosial adalah fenomena alami di antara para hewan yang berusaha menghindari penularan dari hewan-hewan yang sedang sakit. Meskipun ini mungkin benar, jelas jarak sosial tetap bermasalah dalam jangka panjang untuk interaksi sosial *manusia* yang normal.

Kedua, masyarakat saat ini harus mencermati suasana-suasana kehidupan sosial di dunia yang ada jika tidak ada langkah tindakan radikal yang dijumpai dalam beberapa bulan atau beberapa tahun mendatang. Untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi pandemi, temuan-temuan dari kedua jenis studi tersebut sebagian akan menginovasi ilmu-ilmu sosial baru yang berbeda dari arus utama yang ada saat ini. Ciri-ciri utama lain dari pandemi korona juga memperlihatkan dalam arti dampaknya terhadap solidaritas sosial di masyarakat. Masyarakat maju Barat digambarkan sebagai individualistis, dan jaringan media sosial disebut-sebut telah mengeraskan inti individualisme itu. Etika dan praktik jarak sosial serta langkah-langkah anti-korona lainnya yang mendukung isolasi sosial ditunjukkan untuk memperkuat individualisme dan kesendirian yang tidak hanya terjadi di masyarakat-masyarakat ini tetapi juga di masyarakat non-Barat. Dengan demikian, kerusakan global yang terjadi pada interaksi sosial yang normal antara individu, kelompok, kolektivitas, dan masyarakat terlihat sangat jelas.

› **Perubahan iklim dan ujaran kebencian**

Dua masalah besar terkait pandemi COVID-19 patut digarisbawahi, yaitu perubahan iklim dan ujaran kebencian. Pandemi virus korona dijelaskan oleh beberapa analis sebagai akibat dari perilaku manusia di bumi yang telah menyebabkan pencemaran dunia. Polusi pada gilirannya berdampak negatif pada perubahan iklim dan kemungkinan munculnya virus-virus

baru yang berbahaya seperti yang ditunjukkan oleh beberapa teori saat ini. Mereka mengambil kota Wuhan di Tiongkok tempat virus korona awalnya muncul sebagai contoh. Apa pun penyebabnya, penularan virus korona yang mengglobal merupakan tantangan yang membingungkan sekaligus menakutkan yang mengundang para ilmuwan modern untuk lebih rendah hati dan tidak sesumbar dalam menjalankan disiplin-disiplin ilmu mereka. Etika ilmiah mereka pertama-tama harus sangat serius dalam meminimalkan berbagai potensi masalah yang mungkin timbul dari karya ilmiah mereka.

Adapun fenomena ujaran kebencian global di seluruh dunia, kemungkinan akan meningkat selama dan setelah pandemi COVID-19. Ujaran kebencian adalah perilaku yang merendahkan, brutal, dan mengucilkan orang serta mendiskriminasi mereka atas dasar agama, warna kulit, gender, dan etnis. Sumbernya biasanya adalah perasaan atau sikap yang tidak menyenangkan atau bermusuhan terhadap seseorang, kelompok, atau seluruh masyarakat atau peradaban. Virus korona diperkirakan akan ditambahkan ke dalam daftar penyebab ujaran kebencian. Warga dari negara-negara yang sangat terdampak oleh virus korona menghadapi dan akan menghadapi peningkatan diskriminasi dan ujaran kebencian saat mereka bepergian ke luar negara mereka. Dengan demikian, industri pariwisata di seluruh dunia sedang terpukul sangat keras dan akan terus terpukul, sekarang dan dalam beberapa bulan dan tahun mendatang, seperti yang diproyeksikan WHO pada bulan Agustus 2020. Ada sebuah paradoks di sini. Pandemi global COVID-19 seharusnya menyatukan masyarakat saat ini, tetapi dampaknya terhadap diskriminasi dan ujaran kebencian hampir tidak positif. Dengan demikian, industri pariwisata global kemungkinan akan menderita saat ini dan mendatang, bukan hanya karena kendala mobilitas tetapi juga karena potensi peningkatan global dalam ujaran kebencian dan diskriminasi. ■

Seluruh korespondensi ditujukan Mahmoud Dhaouadi <m.thawad43@gmail.com>

› Skenario Pascapandemi, dari Adaptasi ke Pembelajaran Kolektif

oleh **Alejandro Pelfini**, Universidad del Salvador, Buenos Aires, dan FLACSO Argentina, Argentina



| Kredit: Creative Commons.

Walaupun kita masih di tengah pandemi COVID-19 dan efek serta kerusakannya sulit diperhitungkan, seperti perkiraan tanggal di mana pandemi akan dapat dikendalikan, ilmu-ilmu sosial tidak berhenti merefleksikan skenario-skenario yang mungkin terjadi di dunia pasca-pandemi. Kedalaman krisis global, demikian juga efek pandemi yang belum pernah terjadi terhadap kehidupan sehari-hari serta terhadap fungsi kapitalisme secara umum adalah sedemikian dramatis sehingga refleksi ini melampaui spekulasi tentang ketersediaan vaksin, rekomposisi sistem kesehatan publik, dan kerja sama internasional dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebagai gantinya, dan dengan mempertimbangkan bahwa pandemi adalah tantangan peradaban besar,

refleksi ini berfokus pada kapasitas untuk pembelajaran nyata dalam situasi ekstrem dan untuk ketahanan seluruh masyarakat dalam menghadapi situasi traumatis di mana masyarakat dan umat manusia berbagi kerentanan struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya.

› Reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pascapandemi

Sebagaimana ekonom Branco Milanoviov telah tunjukkan, sistem internasional dan masyarakat tertentu memperkenalkan perubahan penting dalam model pembangunan dan organisasi politik mereka mengikuti krisis global lainnya yang melampaui ekonomi dan termasuk di dalamnya tantangan bagi kesehatan masyarakat, atau perang besar, seperti krisis 1873 atau 1919. Oleh karena itu, tidak utopis untuk memper-

timbangkan bahwa dari pandemi ini juga, perubahan penting akan terjadi pada moda produksi, konsumsi, dan gaya hidup, menunjukkan sekali lagi kapasitas kapitalisme dan modernitas untuk beradaptasi dengan tantangan baru dan untuk memikirkan kembali diri mereka sendiri. Tentu saja, ini tidak dijamin, tetapi tergantung pada aktivasi, pertama refleksi, dan kemudian aksi politik untuk mempromosikan transformasi tersebut.

Untuk saat ini, reaksi pertama dan oleh karena itu merupakan salah satu skenario yang mungkin untuk pasca-pandemi adalah *retreat* partikularis. Seperti yang telah dialami oleh beberapa negara (Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump atau Brasil di bawah Bolsonaro), tidak ada gunanya memikirkannya terlalu lama. Hal ini menyangkut dilanjutkannya bisnis seperti biasa, dan mempromos-

sikan kembalinya normalitas dengan berlandung di negara-bangsa, mengabaikan—seperti halnya masalah lainnya—implikasi global dari pandemi dan saling ketergantungan radikal yang ada. Sebaliknya, lebih menarik untuk mengeksplorasi dua kemungkinan skenario transformatif yang bergantung pada agensi manusia dan pada reflektivitas masyarakat. Ada kemungkinan untuk membedakan antara dua tingkat atau derajat transformasi dari kapasitas ini: langkah pertama terkait dengan adaptasi (dipahami sebagai penyesuaian preferensi dan minat seseorang terhadap kompleksitas lingkungan yang baru), dan proses kedua, yang lebih menuntut, berupa pembelajaran kolektif (yang menyiratkan tinjauan terhadap validitas preferensi dan minat ini berdasarkan kewajiban moral untuk mengurangi kerusakan).

› **Adaptasi**

Lalu bagaimana skenario adaptif utama dapat dipahami, di mana tiga lingkungan sosial mendasar (negara, pasar, dan masyarakat sipil) mengembangkan penyesuaian komunikasi menjadi lingkungan yang lebih kompleks dan menantang tanpa memikirkan kembali atau sepenuhnya meninggalkan praktik mapan yang telah terbukti berbahaya? Di tingkat internasional ini akan melibatkan penguatan multilateralisme. Pada tingkat nasional, negara akan lebih nyata kehadirannya, meskipun pada saat yang sama ketika berinvestasi dalam kesehatan masyarakat akan lebih memperhatikan pengamanan dan pengawasan privasi. Dari pasar kita dapat mengharapkan proteksionisme komersial dan investasi publik yang lebih besar; pendalaman digitalisasi; promosi kerja sama ilmiah, tetapi tanpa mengubah perlindungan kekayaan intelektual. Dan, sampai batas tertentu, pemulihan ekonomi produk-

tif dan apa yang disebut barang dan jasa esensial akan terjadi dengan dalih finansialisasi murni. Dengan berfokus pada masyarakat sipil, konsumsi yang bertanggung jawab, subsidi, dan perawatan diri akan dipromosikan, dan perhatian akan diberikan pada pembangunan berkelanjutan, meskipun dalam kerangka demokrasi dengan intensitas rendah.

› **Pembelajaran kolektif**

Reaksi yang lebih menuntut dengan potensi transformatif yang lebih besar menyiratkan proses pembelajaran kolektif yang lebih mendalam, yang membutuhkan dilampauinya urutan negosiasi dan kerja sama internasional ke ruang tata pemerintahan global yang berfokus pada penyediaan dan konservasi barang publik, pengurangan risiko, dan pencegahan bencana. Hal ini tercermin di tingkat nasional di negara yang memusatkan kebijakan publiknya pada gagasan kepedulian dan pengurangan kesenjangan akses terhadap barang publik. Di bidang produksi dan konsumsi, logistik jarak pendek dan perdagangan dan produksi lokal akan dipromosikan, bersamaan dengan penguatan kota-kota kecil dan ekonomi berdasarkan revaluasi kegiatan “esensial”; hal lain yang tidak kalah penting, perselisihan Utara/Selatan saat ini perihal kekayaan intelektual dan paten akan membuka jalan menuju rezim yang lebih setara dan inklusif. Masyarakat sipil akan semakin terbentuk sebagai jaringan “produsen-konsumen” (“*prosumer*”, J. Rifkin), di mana tingkat global-lokal (*glocal*) muncul dan jaringan kepedulian yang peka terhadap perbedaan gender berkembang; ruang untuk transformasi akan terbuka, terinspirasi oleh ide-ide alternatif seperti pasca-pembangunan dan perlambatan pertumbuhan (*degrowth*) dalam proses politisasi yang berkontribusi pada demokratisasi mendasar

dalam hal pemerataan dan akses.

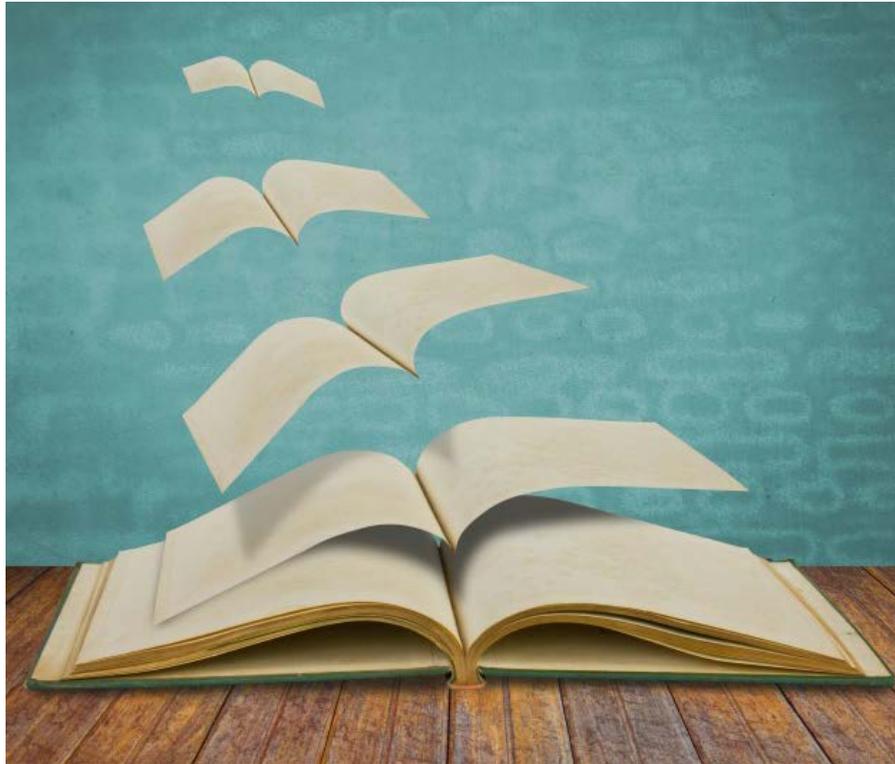
Manakah dari alternatif-alternatif ini yang memiliki lebih banyak kemungkinan untuk unggul dan bergantung pada apa? Kita sudah menyadari batas-batas reaksi non-transformatif pertama dan hanya sedikit yang bisa diharapkan darinya. Namun, selalu ada kemungkinan untuk dipertimbangkan, dan masih memiliki pengikutnya. Kapitalisme dan modernitas telah menunjukkan kapasitas mereka untuk beradaptasi dan melakukan pembaruan, bahkan memasukkan kritik paling radikal yang telah dibuat terhadap mereka (seperti yang ditunjukkan oleh Boltanski dan Chiapello dalam *The New Spirit of Capitalism*). Oleh karena itu, masuk akal untuk berpikir bahwa respons adaptif adalah pilihan yang paling mungkin dan itu akan terjadi hampir secara mekanis dari interaksi antara sistem pakar, perusahaan besar (terutama yang terkait dengan digitalisasi), dan aktor politik yang berpikir dalam jangka pendek. Sementara itu, pembelajaran kolektif yang paling menuntut bergantung pada radikalitas dan aktivasi gerakan sosial dan organisasi populer yang bergerak melampaui rencana besar bantuan dan pencegahan risiko kesehatan yang bertujuan untuk mencapai *Global Green New Deal*, atau lebih baik lagi, Pakta Ekososial dari Selatan—di mana keadilan sosial selalu dipikirkan bersama dengan keadilan lingkungan dalam dialog Utara-Selatan, dan di mana, untuk kali ini, sentralitas kerja produktif digantikan oleh keutamaan kehidupan. Tidak diragukan lagi, opsi ini adalah yang paling kecil kemungkinannya. Tetapi mengingat taruhannya, hal ini yang paling mendesak dan perlu. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Alejandro Pelfini <pelfini.alejandro@usal.edu.ar>

› Sosiolog

dalam Arena Politis-Kewargaan

oleh **Fredy Aldo Macedo Huamán**, Universidad Iberoamericana (IBERO), Mexico City, Meksiko



| Kredit: Creative Commons.

Sejak awal para sosiolog terlibat dalam urusan publik masyarakat mereka (misalnya Émile Durkheim, Max Weber, Marianne Schnitger and Jane Addams), baik untuk memperingatkan khalayak lebih luas mengenai kondisi ketimpangan, diskriminasi, dan penderitaan, maupun ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, pengingkaran hak, dan pengabaian pemerintah atas layanan publik yang dialami oleh sebagian besar masyarakat, ataupun untuk mendorong debat publik yang didukung informasi memadai. Para sosiolog terus melibatkan diri dalam isu-isu sosial yang relevan dengan menggunakan bahasa yang terjangkau dan menggugah tanpa meninggalkan semangat kritis dan gairah penjelajahan vokasi, dalam rangka membangunkan kesadaran dan mempertanyakan kekuasaan. Dewasa ini, profil sosiolog yang sangat cocok dengan refleksi yang disampaikan di sini adalah Helen Jefferson Lenskyj. Menggambarkan peran akademisi sebagai intelektual publik dalam kaitan dengan riset yang ia sendiri lakukan, Helen menyatakan bahwa peran akademisi adalah “mengatasi masalah-masalah sosial seperti dampak merusak dari *Olympics* berusaha mengungkap asal-usul dan sistem penindasan yang mendukungnya. Kami membuat rekomendasi atas perubahan sosial dan bekerja dengan komunitas untuk menghadapi mereka yang berkuasa, adakalanya berhasil dan adakalanya

tidak. Target kami sering kali adalah ‘sapi keramat’—misalnya, *Olympics* atau organisasi agama (terdapat banyak irisan di sini)—dan temuan kami sering kali menunjukkan bahwa ‘kaisar tidak mengenakan pakaian’.”

Saat ini terdapat generasi ilmuwan sosial yang kebingungan tetapi juga kreatif yang sangat gelisah menghadapi era yang penuh gejolak dan ketidakpastian ini. Sejalan dengan warisan disiplin yang mereka terima, mereka sangat peka terhadap kehidupan sehari-hari para warga dan komunitas mereka dalam rangka mewujudkan kerangka kerja yang inovatif dan reflektif yang memungkinkan kita semua dapat menghadapi jaman ini. Dalam pandangan saya, hal inilah yang menggerakkan David M. Farrell dan Jane Suiter dalam karya keduanya *Reimagining Democracy* (2019) untuk menceburkan diri dalam masyarakat Irlandia dan berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan demokrasi deliberatif di antara warganya. Karya mereka menunjukkan kepada perhatian publik berbagai forum rembug di Irlandia yang berfungsi sebagai sarana referendum yang akhirnya mengantarkan pada legalisasi aborsi dan pernikahan untuk semua. Dengan demikian, teori yang berkembang di dunia akademis memperoleh umpan balik sosial, sementara kaitan dengan para aktor dieksplorasi begitu rupa sehingga, selain merangsang berbagai pertanyaan

dan persoalan, juga memungkinkan dialog untuk merancang ulang institusi dan budaya publik.

Apabila pada ranah sehari-hari berbagai aktor berhimpun untuk terlibat dalam berbagai isu kritis pada komunitas politiknya—demi memperjuangkan kepentingan dan menyampaikannya tuntutan, memperkuat pembelajaran, kolaborasi dan model organisasi, menyalurkan berbagai inisiatif dan program aksi, membangun [ruang-ruang kekuasaan](#) yang berupaya menggabungkan saluran-saluran partisipasi dengan berbagai inovasi demokrasi—maka di pihak mereka ini juga terdapat berbagai kelompok dari kalangan sosiolog maupun profesi lain yang bersedia untuk mendukung dan memperjuangkan kepentingan mereka.

› Peran baru bagi para sosiolog

Dengan demikian, di antara arena akademis dan politik-kewargaan, para sosiolog yang memandang penting kontribusi pada agensi warga negara dapat menjalankan berbagai profil di tengah pluralitas ruang tindakan pada sistem demokrasi dewasa ini. Dengan menyadari hal ini, maka apakah kontribusi, keterlibatan, dan pemikiran ulang atas pendidikan dan kinerja para sosiolog yang bisa dipertimbangkan?

Secara umum, pembagian akademis-profesional secara tradisional telah dibuat terasing dari situasi saat ini yang ditandai dengan kompleksitas yang lebih besar, saling penetrasi dan diversifikasi dari ruang dan sistem para aktor. Ciri-ciri semacam ini terus berkembang dalam berbagai kondisi yang akan tetap penting untuk dipertimbangkan.

Bagi para sosiolog, respons terhadap kompleksitas semacam ini pada dasarnya akan menuntut mereka untuk membuat universitas dan pusat penelitian mereka lebih relevan bagi para aktor warga dan aktor politik, sembari memperhatikan kebutuhan, keterbatasan, potensi dan kerangka bersama. Kedua, pengalaman para sosiolog dalam arena yang berubah itu akan memungkinkan mereka menjangkau dan menyempurnakan apa yang direncanakan berdasarkan apa yang sudah ada, menarik pembelajaran dari sana dan kemudian mendorong inovasi dan kepakaran pendidikan yang sesuai yang ditujukan untuk warga.

Pada level politik demokratis dan praktik warga, sosok yang patut dipertimbangkan dalam disiplin ini adalah sosiolog yang berperan sebagai *konsultan-mediator* untuk warga.

Dengan melibatkan diri pada berbagai sektor warga, para sosiolog dituntut untuk mempromosikan suatu visi dan kinerja yang disasarkan pada kapasitas analitis-operasional yang signifikan, dan dipandu oleh berbagai ketrampilan kreatif, pedagogis, dialogis, proposisional dan emosional, di samping oleh berbagai cara merangsang definisi, mobilisasi dan resiliensi diri yang akan mendukung (atau melakukan secara bersama dengan) mereka yang memegang peranan sebagai aktor-aktor warga dan politik. Sejalan dengan ini, komitmen para sosiolog pada etika yang didasarkan pada nilai-nilai kunci dalam kehidupan demokrasi (seperti keadilan, kebebasan, pluralisme, toleransi, solidaritas, kritik dan perbedaan pendapat, kesediaan mendengar, dan kolaborasi) membentuk poros yang memandu keterlibatan mereka.

Dalam pengertian yang lebih spesifik, prasyarat bagi kebangkitan sektor-sektor sosial dan politik baru ini menuntut para sosiolog untuk menerima beberapa hal sebagai berikut:

- perolehan beberapa unsur, ketrampilan dan pengalaman yang lebih baik dalam proses internal (atau proses bersama) pada evolusi keorganisasian yang menyiratkan pentingnya penguatan diri secara demokratis pada skala yang berbeda-beda.
- peningkatan yang ditargetkan dan berkelanjutan dalam pencapaian tujuan-tujuan dan perwujudan cita-cita yang menjadi inti identitas mereka (yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia).
- tindakan yang mengasumsikan suatu platform *lobi para warga* yang bertujuan untuk membangun rencana rekonfigurasi kebijakan yang berada di bawah ataupun di luar pengaruh mereka; dan
- penjernihan atas kontribusi yang akan mereka berikan melalui praktik-praktik demokratis mereka (yang terhubung dengan agen dan pakar sosial lain) pada berbagai arena, mengarahkan ulang kerangka kelembagaan yang kaku menuju cara-cara yang inklusif dan inovatif untuk menghubungkan negara dengan warga.

Dalam kasus para sosiolog, peran yang relevan dan sentral untuk menjalankan tugas semacam ini sangat menonjol karena mereka diharapkan bertindak sebagai:

- *pengurai (decoders)* wacana, narasi, dan imajiner untuk mereka proses ulang dalam berbagai proyek komunikasi, kebudayaan dan politik dengan signifikansi yang lebih besar;
- *mediator konflik* dan ketegangan yang berakar kuat baik di dalam maupun di luar organisasi;
- *pendamping dan penerjemah* proses-proses politik, kewargaan, dan aksi publik melawan berbagai kekuasaan publik maupun privat; dan
- *artikulator* (atau *mitra pencipta*) proyek-proyek mengenai kebijakan kewargaan, demokrasi dan publik yang akan diadopsi oleh berbagai kelompok warga yang mereka turut bekerja bersamanya.

Ringkasnya, berada di antara dua ancaman serius yang ada saat ini—populisme sayap kanan yang ekstrem dan kekuasaan besar korporasi teknologi (yang terkait dengan sistem pengawasan pemerintah)—warga negara perlu untuk menanggapi dengan kejemihan dan orientasi pro-aktif, mengartikulasikan suara demokratis maupun kapasitas tata kelola mereka yang akan memperkuat dan membuatnya berkelanjutan. Dengan demikian, seiring kebutuhan mendesak untuk memperbarui proyek demokrasi, mereka dituntut untuk menemukan pemfokusan ulang atas pembelajaran politik, integrasi pengetahuan, persahabatan warga, dan orientasi keorganisasian mereka. Dan di samping ini semua, mereka perlu membangun jembatan-jembatan dengan aktor-aktor lain, termasuk para praktisi dari disiplin-disiplin seperti sosiologi, ilmu politik, dan antropologi yang perlu didorong untuk lebih terlibat dengan menggabungkan pendekatan argumentatif dan empati dengan gairah yang lebih energik dan asertif. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Fredy Aldo Macedo Huamán <fredy.macedo@gmail.com>

1. Lihat <https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/irish-referendums-deliberative-assemblies/>.

› Kebungkaman di sekitar Kekerasan Pasangan Intim di Trinidad dan Tobago

oleh **Amanda Chin Pang**, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad dan Tobago

Di Trinidad dan Tobago (T & T), ketika para perempuan, laki-laki dan anak-anak terbunuh dalam kekerasan pasangan intim (*intimate partner violence*, disingkat: IPV) atau perang antar-geng, kejadian ini segera menyita perhatian. Namun, secepatnya, tangisan para korban dan penyintas tersebut berubah menjadi sunyi dan para pelaku hanya mengajukan alibi-alibi basi tentang kekerasan yang mereka lakukan, meninggalkan gangguan malapetaka yang menyiksa selamanya.

Di Trinidad dan Tobago, kebungkaman (*silence*) telah berlangsung lama ketika perempuan, laki-laki dan anak-anak terbunuh dalam kekerasan pasangan intim (IPV) dan situasi-situasi kekerasan yang berbasis gender. Kematian seorang perempuan, Andrea Bharatt, diharapkan dapat menjadi katalis yang mendorong para korban dan penyintas kekerasan dan penganiayaan untuk bersuara.

› Budaya kekerasan

Sejak seruan untuk “tinggal di rumah” di masa Covid-19 diterapkan, telah terjadi peningkatan kasus kekerasan domestik—istilah kekerasan domestik kadang disamakan dengan IPV—dan banyak kasus yang digambarkan sebagai kekerasan domestik pada kenyataannya terjadi di antara pasangan-pasangan intim dewasa.

Kebungkaman para korban serta kecilnya kemungkinan untuk melepaskan diri dari kekerasan yang terus berlangsung mendorong saya untuk berpikir mengenai budaya kekerasan yang telah mengakar secara mendalam di kalangan warga Trinbago [warga Trinidad dan Tobago]. Mulut para teman dan kerabat yang mengetahui situasi ini pun diberangus. Saya menyerukan untuk memecah kebungkaman mengenai kekerasan yang memiliki akar kolonial yang mendalam tersebut. Bergner (1995) dalam tulisannya berjudul “Who Is That Masked Woman? Atau, Peran Gender dalam tulisan Fanon *Black Skin, White Masks*” menyoroti konteks historis ini, bukan hanya mengenai rasisme yang sistematis, tetapi juga posisi perempuan yang dirugikan karena ketertundukannya pada laki-laki. Kendatipun ada dampak serius bagi para pasangan intim dan para tanggungan mereka, kurang adanya kebijakan langsung dan penelitian mengenai IPV, mendorong saya

untuk berpikir bahwa beberapa orang Karibia tampaknya sudah terlalu nyaman dengan pola kekerasan ini. Saya menyebut hal ini sebagai “Budaya Kekerasan”, seperti yang digambarkan oleh Brereton (2010) dalam karyanya “The Historical Background to the Culture of Violence in Trinidad and Tobago”, karena budaya kekerasan telah dinormalisasikan di negara tersebut.

› Normalisasi kekerasan

Kita dapat merenungkan berbagai pertanyaan seputar isu ini. Kekerasan yang terjadi dalam hubungan di antara pasangan intim telah menjelma sebagai hal yang lumrah dalam interaksi orang Karibia. Apa yang menyebabkan kekerasan dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dalam republik kepulauan kembar seperti Trinidad dan Tobago? Mungkinkah itu karena ketidakmampuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hubungan, ataukah kekerasan itulah yang menjadi suatu hal yang dapat diterima bagi para pasangan intim, ataukah keduanya? Bagaimana dengan budaya T & T yang sepertinya memfasilitasi dan membenarkan kekerasan ini dengan kurangnya atau bahkan tidak adanya protes publik? Apakah IPV dianggap sebagai sebuah isu yang privat di dalam suatu hubungan? Apakah para laki-laki dan perempuan itu takut?

Dalam skala global, IPV terjadi pada banyak pasangan. Merujuk pada lembar-fakta Kekerasan Terhadap Perempuan WHO, satu dari tiga perempuan pernah mengalami IPV dalam relasi intimnya dan 38% dari kasus pembunuhan perempuan di dunia dilakukan oleh pasangan intim laki-lakinya (WHO, 2017). Sementara statistik ini merefleksikan kekerasan laki-laki terhadap pasangan intim perempuannya, ada juga kekerasan pasangan intim perempuan terhadap laki-laki, maupun IPV dalam hubungan sesama jenis. Koalisi Nasional Melawan Kekerasan Domestik AS (NCADV, 2020) menyatakan bahwa satu dari sembilan laki-laki mengalami beberapa bentuk IPV, kekerasan hubungan seksual dan penguntitan. Selain itu, menurut laporan ini, laki-laki korban perkosaan dan laki-laki korban dari hubungan seksual yang tidak diinginkan telah melaporkan para pelaku yang kebanyakan laki-laki. Hal ini merefleksikan situasi serupa di Trinidad dan Tobago. Le Franc et al. (2008) dalam “Interpersonal violence in three Caribbean countries: Barbados, Jamaica,

“Membuat agar berbicara bebas melawan kekerasan dan memahami kekerasan sebagai hal yang tidak dapat diterima serta anomali dalam ekspresi diri dalam suatu hubungan menjadi suatu norma akan memecah kebungkaman dan pada akhirnya mengubah hubungan pasangan intim menjadi lebih baik”

and Trinidad and Tobago” menyajikan bukti tentang kekerasan fisik dan seksual yang dilaporkan di Trinidad dan Tobago, yang menemukan bahwa 47,7% laki-laki mengalami kekerasan fisik dalam hubungan dan 52,5% laki-laki mengalami paksaan seksual dalam hubungan.

Menariknya, menurut Wiltshire (2012) dalam “Youth Masculinities and Violence in the Caribbean”, maskulinitas dipelajari melalui kuasa, diperkuat oleh sosialisasi keluarga antar generasi, agama, sekolah, media dan pertemanan. Bahkan, Wiltshire mencatat bahwa kejantanan diekspresikan melalui perbuatan-perbuatan yang mengandung kekerasan dan agresi, dan beberapa laki-laki menganggap bahwa perempuan terkadang perlu didisiplinkan oleh pasangan laki-laki mereka. Sementara baik laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku kekerasan pasangan intim, berita-berita yang dilaporkan di T & T dibanjiri oleh insiden dibunuhnya perempuan oleh pasangan intim mereka. Hal ini disebabkan karena proporsi laki-laki yang melakukan IPV terhadap perempuan lebih besar dibandingkan dengan proporsi perempuan yang melakukan perbuatan ini terhadap laki-laki.

Gagasan mengenai maskulinitas dan feminitas yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan mencerminkan tak terhindarkannya kekerasan laki-laki dalam hubungan-hubungan intim serta penerimaan dan kebungkaman mengenai isu tersebut. Selain itu, penyalahgunaan ini dilegitimasi dengan mencap perempuan sebagai “orang yang tidak terhormat” ketika mereka melanggar batas-batas kehormatan yang berlaku di masyarakat Karibia. Namun, pemikiran-pemikiran laki-laki tentang ekspresi perempuan mengenai seksualitas dan feminitas mereka tentunya bukan alasan untuk melakukan penindasan.

› **Kebungkaman sebagai rintangan untuk mengangkat isu IPV**

Penting untuk diperhatikan bahwa ada upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk memecah kebungkaman dan menyuarakan para korban. Kebijakan Kekerasan Domestik di Tempat Kerja Kamar Dagang dan Industri Trinidad dan Tobago (TTCIC) dan Unit Kekerasan Berbasis-Gender

Layanan Polisi Trinidad dan Tobago (TTPS) merupakan kebijakan-kebijakan yang mengangkat isu IPV. Spotlight Initiative PBB menyoroti adanya peningkatan kejadian kekerasan domestik yang disebabkan oleh [pandemi] Covid-19. Kendatipun adanya prakarsa-prakarsa kebijakan ini, budaya kekerasan dan gagasan-gagasan mengenai maskulinitas dan feminitas di T & T mencerminkan penerimaan yang umum terhadap budaya kekerasan di negara tersebut.

Memberdayakan dan mendorong penyintas IPV melalui mekanisme-mekanisme dukungan dan pengamanan, pilihan-pilihan terapi bagi para pasangan dan bagi para pelaku yang tidak menyangkal perbuatannya, dorongan kesehatan mental bagi laki dan perempuan, serta seruan kepada para laki-laki untuk mencari bantuan secara positif dapat mengubah budaya kebungkaman mengenai kekerasan menjadi suatu budaya yang menyuarakan perlawanan dan mengungkapkan kepada publik penolakan terhadap kekerasan.

Selain itu, sosialisasi ulang kepada laki dan perempuan mengenai cara ungkapan seksualitas mereka dan tentang peran-peran gender adalah hal yang perlu. Saya percaya bahwa rasa malu dan takut yang terkait IPV yang ada pada korban dan bahkan pada pelaku, serta rasa tanggung jawab yang semu dari penyintas, menghasilkan kebungkaman mengenai kekerasan. Karenanya, satu hambatan utama dalam pelaporan kekerasan domestik kepada polisi, bagi korban laki dan perempuan, adalah adanya rasa malu yang mereka alami, menurut Wallace (2019) dalam “Domestic Violence: Intimate Partner Violence Victimization Non-Reporting to the Police in Trinidad and Tobago.” Sekalipun alasan tersebut nyata, tanggapannya adalah kebungkaman, sehingga seringkali hal itu berakhir dengan pembunuhan.

Membuat agar berbicara bebas melawan kekerasan dan memahami kekerasan sebagai hal yang tidak dapat diterima serta anomali dalam ekspresi diri dalam suatu hubungan menjadi suatu norma akan memecah kebungkaman dan pada akhirnya mengubah hubungan pasangan intim menjadi lebih baik. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Amanda Chin Pang <amandalall91@gmail.com>

› Tentang Kemampuan Memedulikan Dunia

oleh **Francesco Laruffa**, University of Geneva, Swiss

Individu harus diperlakukan sebagai “agen” yang ikut memutuskan arah perubahan sosial. Gambar oleh Matteo Laruffa yang berusia tujuh tahun.



Pandemi COVID-19 telah menyuburkan berbagai diskusi tentang “dunia setelah Korona” dan “masa depan yang kita inginkan”. Idenya adalah bahwa pandemi bukan hanya konsekuensi tragis dari kapitalisme neoliberal dan eksploitasi alam yang berlebihan (misalnya, penggundulan hutan): pandemi juga menawarkan kesempatan untuk memikirkan kembali masyarakat kita dan cara-cara di mana ia diatur. Namun, tidak ada kesepakatan tentang masa depan yang dibayangkan. Beberapa mendorong bagi “pertumbuhan hijau inklusif” dan Kesepakatan Hijau yang mempromosikan “pekerjaan hijau.” Fokusnya adalah pada inovasi teknologi untuk mencapai kelestarian lingkungan tanpa mengubah gaya hidup masyarakat (misalnya, konsumerisme) atau struktur kapitalis (misalnya, asimetri kekuasaan antara pengusaha dan pekerja). Yang lain malah bercita-cita untuk “transformasi sosial-ekologis” yang lebih mendalam, di mana ekonomi ditempatkan di bawah terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekologi daripada keuntungan.

Berikut ini, saya mengusulkan interpretasi radikal dari “pendekatan kapabilitas”nya Amartya Sen dan Martha Nussbaum, yaitu mengeksplorasi bagaimana interpretasi tersebut dapat membantu kita untuk membayangkan masa depan yang lebih emansipatoris dan berkelanjutan. Jelas, menggambarkan masa depan yang berharga tidak hanya menjadi tugas eksklusif sosiologi (atau filsafat): masa depan perlu dibangun bersama secara demokratis, yang melibatkan partisipasi warga negara. Saya berpendapat bahwa pendekatan kapabilitas memungkinkan perspektif demokratis semacam itu mengenai “masa depan yang kita inginkan”.

› Untuk interpretasi radikal dari kapabilitas

Pendekatan kapabilitas menyarankan bahwa aksi publik harus fokus pada mempromosikan kemampuan orang, yaitu, kebebasan nyata mereka untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai. Dalam perspektif ini, kemajuan masyarakat tidak disamakan dengan pertumbuhan

ekonomi tetapi dengan menghilangkan hambatan bagi perkembangan manusia: kebijakan publik harus memperluas kebebasan individu untuk menjadi “makhluk” dan “perbuatan” yang berharga, yaitu, untuk mengejar konsepsi rasional mereka tentang “hidup yang baik.” Fokus ini memaksa kita untuk merenungkan tujuan akhir, memperdebatkan apa yang secara intrinsik penting. Pendekatan kapabilitas juga memberikan peran kunci bagi demokrasi. Partisipasi demokratis tidak hanya memiliki fungsi instrumental (memungkinkan supaya suara warga negara didengar sehingga aksi publik lebih mencerminkan kepentingan mereka) tetapi juga peran konstruktif, membentuk prioritas masyarakat dan—karena konsepsi tentang kehidupan yang baik berubah selama proses deliberatif—bahkan nilai-nilai individu.

Atas dasar ini, saya berpendapat bahwa pendekatan kapabilitas dapat dibingkai dengan cara yang lebih radikal daripada pendekatan yang mendominasi lingkaran kebijakan. Memang, kaitan antara kemampuan dan pertumbuhan ekonomi bisa dipertanyakan lebih dalam. Interpretasi dominan dari pendekatan kapabilitas menyoroti bahwa pertumbuhan bukanlah tujuan itu sendiri tetapi hanya sarana untuk mencapai tujuan yang berharga. Namun, mengingat konsekuensinya yang merusak lingkungan dan dampak buruknya terhadap kesejahteraan manusia, pertumbuhan ekonomi bahkan tidak merepresentasikan cara yang tepat dan aksi publik harus mengabaikan tujuan ini sama sekali. Dalam banyak kasus, ekonomi tumbuh melalui penderitaan manusia dan bencana lingkungan: dari gempa bumi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di industri konstruksi hingga polusi yang dihasilkan produksi memicu berbagai penyakit. Bahkan apa yang semula (*prima facie*) tampak positif sebenarnya mengecewakan. Kemewahan, misalnya, mendorong visi kehidupan baik yang serakah-materialistik dan kompetitif-individualistis, yang pada akhirnya merusak kesejahteraan. Dengan demikian, gaya hidup Barat tidak hanya tidak berkelanjutan: dari perspektif kesejahteraan, keinginan terhadap model “pembangunan” berbasis pertumbuhan itu sendiri patut dipertanyakan.

Demikian pula, gagasan—yang sentral dalam pendekatan kapabilitas—bahwa individu harus diperlakukan sebagai “agen” menjadi sangat berpengaruh dalam dunia kebijakan. Namun, masyarakat dipahami sebagai agen dalam arti sempit, yaitu sebagai pelaku ekonomi yang berpartisipasi dalam pasar. Sebaliknya, sosok warga negara demokratis yang ikut menentukan arah perubahan sosial terpinggirkan. Dalam konteks ini, pendekatan kapabilitas dikooptasi ke dalam interpretasi neoliberal-individualistis tentang “pemberdayaan” yang mereduksi kebebasan manusia menjadi kebebasan untuk berpartisipasi dalam perekonomian, khususnya pasar tenaga kerja. Kapabilitas telah menjadi sinonim dari modal manusia: seperangkat keterampilan yang dibutuhkan individu untuk menjadi pelaku ekonomi yang sukses.

Menolak pertumbuhan ekonomi dan inklusi masyarakat dalam ekonomi kapitalis merupakan tujuan yang diinginkan untuk aksi publik, interpretasi yang lebih radikal dari pendekatan kapabilitas akan memberikan warga kekuatan

untuk bersama-sama menentukan arah perubahan sosial, memperdebatkan arti pembangunan, kemajuan, dan kualitas hidup dalam artian tujuan akhir. Pemahaman ini mencakup pengurangan pengaruh pasar dalam membentuk nasib kolektif kita, (untuk sebagian) menggantikannya dengan demokrasi partisipatif-deliberatif.

› Memusatkan aksi publik pada “kemampuan untuk memedulikan dunia”

Pada titik ini, pendekatan kapabilitas dapat dikombinasikan dengan “etika kepedulian” yang dikembangkan oleh para ahli teori feminis. Seperti yang disarankan oleh Joan Tronto, perspektif kepedulian menyoroti apa yang kita, sebagai masyarakat pedulian. Kapitalisme adalah sistem yang didasarkan pada kepedulian terhadap keuntungan, dan individu dihargai sesuai dengan kontribusi mereka terhadap keuntungan. Tapi kita bisa membangun masyarakat di mana kepedulian terhadap orang lain (misalnya, anak-anak, orang tua, dan orang sakit), untuk lingkungan (baik dalam bentuk perlindungan/pemeliharaan lingkungan dan perbaikan lingkungan), untuk lembaga demokrasi, dan untuk diri sendiri (olahraga, seni, pendidikan, dll.) lebih diprioritaskan daripada keuntungan.

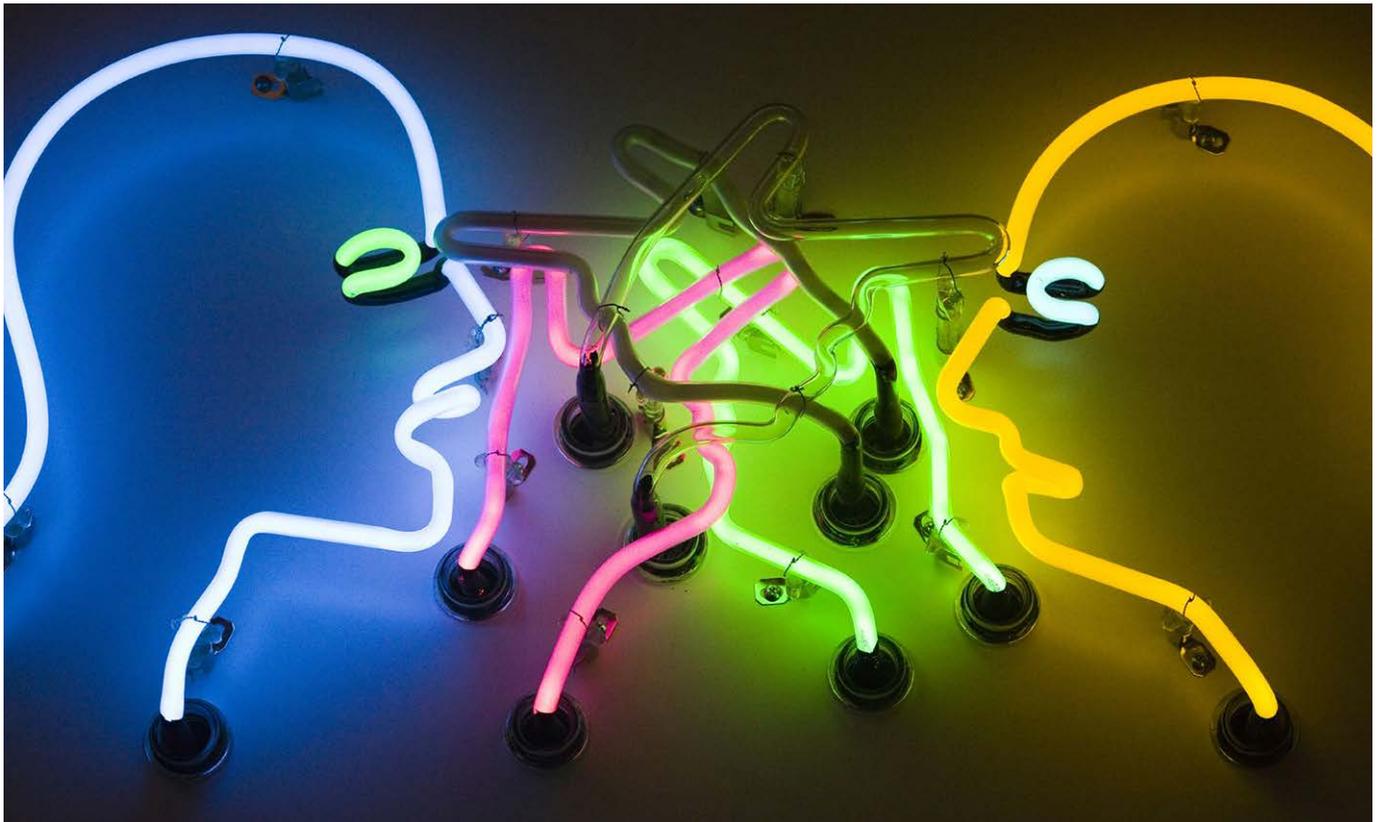
Dari perspektif ini, penghargaan dapat bergeser dari produksi ke reproduksi sosial dan kerja dapat dikonseptualisasikan kembali sebagai aktivitas *memedulikan dunia*. Makna yang terakhir tersebut harus didefinisikan melalui deliberasi demokratis. Dengan demikian, demokrasi akan (untuk sebagian) menggantikan pasar dalam membangun apa yang disebut sebagai kontribusi yang berharga bagi masyarakat. Pemahaman tentang kerja ini, yang didasarkan pada “kegunaan sosial” daripada nilai pasar, menjadi terkenal selama pandemi dengan diskusi mengenai pekerja “esensial”. Agenda yang mengikuti kerangka ini akan menentang proliferasi “pekerjaan omong kosong” (David Graeber)—hijau atau sebaliknya—dalam masyarakat kapitalis, [dan] mempromosikan kemampuan individu untuk melakukan *pekerjaan yang bermakna*. Yang terakhir ini melibatkan kegiatan yang dilakukan di dalam atau di luar pasar tenaga kerja yang menawarkan peluang berkembangnya manusia bagi individu yang melakukannya dan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan cara yang bernilai “obyektif”—dan semua warga negara sama-sama berhak untuk berpartisipasi dalam debat demokratis mengenai apa yang berharga (Ruth Yeoman).

Kesimpulannya, setelah visi kritis kapitalisme dibuat lebih eksplisit, pendekatan kapabilitas dapat menginspirasi kaum progresif, menyarankan untuk fokus pada aksi publik bukan pada pertumbuhan ekonomi atau sekedar memasukkan orang-orang di pasar tenaga kerja, tetapi mempromosikan “kemampuan untuk memedulikan dunia” — yang juga memerlukan hak untuk berpartisipasi dalam perdebatan mengenai apa yang layak dipedulikan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Francesco Laruffa
<Francesco.Laruffa@unige.ch>

› Manusia sebagai Homo Culturus

oleh **Mahmoud Dhaouadi**, Universitas Tunis, Tunisia dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Sejarah Sosiologi (RC08), Sosiologi Agama (RC22) dan Bahasa dan Masyarakat (RC25)



Manusia bukan hanya hewan yang berbicara tetapi pengguna Simbol-simbol Budaya. Bahasa perlu difahami sebagai bagian dari Simbol-simbol Budaya ini. Kredit: [Flickr/ Thomas Hawk](#).

Konsep *Homo Culturus* tidak dijumpai dalam ilmu-ilmu sosial. Para ekonom dan mereka yang berpandangan materialis telah menggambarkan Manusia sebagai *Homo Oeconomicus*, ilmuwan politik telah melabelinya sebagai *Homo Politicus* dan sosiolog melihat manusia sebagai makhluk sosial atau *Homo Sociologicus*. Karena meningkatnya penggunaan angka saat ini, sebagian orang berbicara tentang *Homo Numericus*. Meskipun minat mereka besar terhadap studi budaya, namun para antropolog kontemporer tidak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan budaya untuk menggambarkan Manusia sebagai *Homo Culturus*. Epistemologi positivis telah berlaku dalam ilmu-ilmu sosial yang mengklaim bahwa pengalaman indrawi adalah landasan pengetahuan. Para antropolog terkemuka menjadi saksi dampak epistemologi tersebut. Dalam buku *The Concept of Culture* (1973) Leslie White menyebutkan bahwa Ralph Linton, Radcliffe-Brown dan

pemikir lainnya, menganggap budaya sebagai abstraksi atau sesuatu yang tidak ada atau yang menggambarkan realitas yang tidak konkret. Ilmuwan-ilmuwan sosial positivis akan sulit untuk menunjukkan minat yang besar pada budaya sebagai fenomena non-indrawi dan yang ambigu.

› Dampak berkelanjutan dari positivisme

Reservasi tentang budaya juga ditemukan di antara “para pendiri” sosiologi Barat. Para ahli teori budaya sebelum 1960 seperti Weber, Durkheim, Marx, Parsons, Mills dan lain-lain diketahui memiliki “program yang lemah” (*weak program*) tentang budaya dalam karya-karya yang mereka diterbitkan. Artinya, mereka menganggap budaya tidak terlalu penting. Lebih jauh lagi, Sekolah Birmingham, Bourdieu dan Foucault tidak melakukan yang lebih baik: mereka juga telah mengadopsi “program yang lemah” untuk studi budaya. Tren “pro-

gram lemah” masih mendominasi studi sosiologi budaya saat ini meskipun “program kuat” sosiologi budaya (yang menekankan penekanan pada pentingnya budaya) semakin mendapat perhatian sejak lahirnya “pergeseran ke budaya” (*cultural turn*) di akhir 1990-an.

› Pencarian *Homo Culturus*

Penelitian saya secara kebetulan telah membuat saya memiliki kebersentuhan yang lama dengan studi budaya. Keingintahuan intelektual saya pada 1990-an memotivasi saya untuk mencoba menyusun kerangka teoretis yang dapat membantu untuk memahami dan menjelaskan perilaku orang dan dinamika dari masyarakat manusia. Dalam bukunya *The Art of Social Theory* (2014), sosiolog Richard Swedberg berpendapat bahwa teori sosiologi tidak berada dalam posisi yang baik. Saya merasa saya harus mengambil risiko dalam petualangan ber teori. Saya memulai dengan mengajukan pertanyaan metodologis ini: mana yang harus menjadi titik awal untuk mengeksplorasi teka-teki dari kekuatan yang ada di balik perilaku manusia dan dinamika masyarakat? Saya pikir saya harus mengawalinya terlebih dahulu dengan mengidentifikasi *sifat-sifat khusus* (*special traits*) yang membedakan spesies manusia dengan spesies lain. Saya merasa bahwa dalam upaya mengidentifikasi sifat-sifat itu, saya harus memulai penelitian saya dari titik awal. Dalam mengejar potensi pembeda sifat-sifat khas manusia itu, saya tidak melewatkan apa pun untuk akhirnya menemukan apa yang saya cari: Simbol-simbol budaya (CS: *Cultural Symbols*), yaitu, bahasa, pemikiran, pengetahuan, agama, hukum, mitos, nilai dan norma budaya. Studi tentang CS tampaknya menjadi dasar untuk pemahaman dan penjelasan tentang perilaku manusia dan fenomena sosial. Penelitian teoretis saya telah membuat saya melihat bahasa sebagai kekuatan pendorong di balik kelahiran CS: bahasa adalah “ibu” (*“the mother”*) dari CS. Artinya, manusia bukan hanya hewan yang berbicara seperti yang dijelaskan oleh para filsuf dan pemikir sosial kuno, tetapi manusia juga merupakan pengguna CS yang hebat. Dengan demikian, *cogito ergo sum* versi saya akan menyatakan: Saya menggunakan bahasa, oleh karena itu, saya adalah manusia.

Asumsi teoretis ini telah menghasilkan pengamatan lapangan yang memperkuat konsep *Homo Culturus*. Saya telah menemukan empat ciri manusia yang berbeda yang dapat menjelaskan mengapa manusia adalah individu-individu *Homo Culturus*.

› Pengamatan dasar tentang kekhasan manusia

Sentralitas CS dalam identitas manusia dapat dianggap sebagai sesuatu yang baru dalam ilmu-ilmu sosial kontemporer, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Konseptualisasi saya tentang CS pada inti dari identitas manusia (*Homo Culturus*) tercapai sebagai berikut:

1) Proses pertumbuhan dan pematangan tubuh manusia lambat dibandingkan dengan kebanyakan makhluk hidup lainnya. Misalnya, rata-rata bayi manusia mulai berjalan pada usia satu tahun, dibandingkan bayi hewan yang dapat langsung berjalan atau dalam beberapa jam atau setelah ke-

lahirannya.

2) Manusia memiliki rentang hidup yang lebih panjang daripada kebanyakan hewan.

3) Ras manusia memiliki peran dominan yang tak terbantahkan di planet ini.

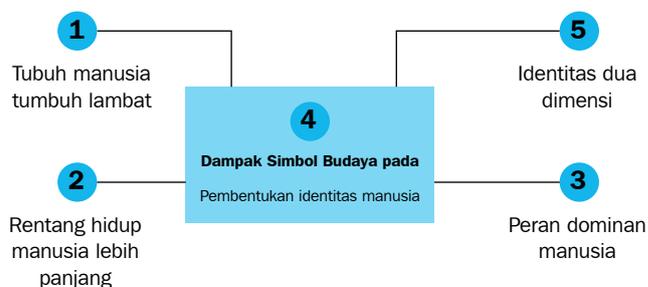
4) Manusia *diistimewakan* oleh CS.

5) Identitas manusia terdiri dari dua bagian: *tubuh* dan CS. Ini adalah identitas dua dimensi yang sering disebut dalam agama dan filsafat sebagai identitas ganda yang terdiri dari tubuh dan jiwa.

› Wawasan yang ditawarkan CS

Manusia tumbuh dan matang secara perlahan baik pada ranah tubuh maupun pada CS. Jadi, manusia adalah *bi-dimensional* dalam perkembangan mereka secara keseluruhan. Sebaliknya, pertumbuhan dan pematangan spesies non-manusia sebagian besar bersifat *uni-dimensional* (hanya tubuh) karena kurangnya CS dalam pengertian akal budi manusia yang luas yang canggih. Kebutuhan untuk kemajuan pada dua level terlihat berada di balik lambatnya pertumbuhan tubuh dan pematangan manusia. Artinya, proses pertumbuhan tubuh dan pematangan manusia melambat, boleh dikatakan disebabkan karena manusia terlibat dalam *proses kedua* dari pertumbuhan dan pematangan yang direpresentasikan oleh CS.

CS harus berkontribusi untuk menjawab teka-teki yang tertulis di sampul Edisi Khusus *Scientific American* (September 2018): “Manusia: Mengapa kita tidak seperti spesies lain di planet ini.” Seperti yang ditunjukkan di atas, manusia berbeda dari spesies lain berdasarkan CS. Jadi, CS-lah yang membuat mereka tidak sama dengan spesies lain. Gambar berikut mengilustrasikan mengapa manusia adalah *Homo Culturus*.



› *Homo Culturus* dan prinsip Hemat

Baru saja diilustrasikan bahwa CS dapat menjelaskan empat karakteristik khas manusia. CS dapat menjelaskan lebih lanjut perilaku spesifik yang tak terhitung jumlahnya dari individu dan kelompok manusia serta keanekaragaman dinamika masyarakat dan peradaban. Dengan demikian, CS kompatibel dengan Prinsip Parsimoni (*The Principle of Parsimony*): penggunaan sesedikit mungkin variabel untuk menjelaskan sebanyak mungkin fenomena. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Mahmoud Dhaouadi <m.thawad43@gmail.com>

› Serangan Teror Norwegia

22 Juli 2011

oleh **Pål Halvorsen**, editor jurnal di Scandinavian University Press, Norwegia



Gedung utama di pulau Utøya, lahan di mana 69 orang dibunuh.
Kredit: Pål Halvorsen.

“Banyak hal terjadi, namun representasi mereka belum terselesaikan.”

Alexander, J. C. & Gao, R. (2012)

Fjotolf Hansen, lebih dikenal dengan nama lamanya, Anders Behring Breivik, melakukan dua serangan teroris di Norwegia pada 22 Juli 2011, satu di kawasan eksekutif pemerintah Norwegia, dan yang kedua di Utøya, tempat Liga Pemuda Pekerja mengadakan perkemahan musim panas mereka. Sekarang, sepuluh tahun kemudian, masyarakat Norwegia

masih bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelahnya. Serangan itu menewaskan 77 orang dan melukai lebih banyak lagi. Serangan-serangan tersebut tidak hanya meresahkan Norwegia sebagai sebuah bangsa, namun juga dunia. Pengunjung internasional menghadiri kamp musim panas, dan media internasional meliput serangan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mempertimbangkan, misalnya, inspirasi internasional dari serangan tersebut. Namun masyarakat Norwegia sudah jenuh menghadapi keputusan praktis setelah terjadinya peristiwa tersebut. Dalam uraian mereka, banyak yang menggarisbawahi waktu serangan, yaitu pertengahan

musim panas ketika Oslo cukup kosong dan kebanyakan orang sedang berlibur. Hal tersebut membuat masyarakat semakin tidak siap untuk sesuatu yang mengerikan seperti ini, dan responsnya tidak secepat yang diharapkan atau diinginkan. Dengan seorang teroris yang telah menyerahkan diri dengan menyebutkan nama lengkapnya dan telah menyebarkan “manifesto” secara luas tepat sebelum serangan, pencarian jawaban dapat dimulai dengan materi yang tersedia. Pertanyaan psikologis apakah Breivik waras atau tidak ditangani oleh dua komite ahli psikologi forensik dengan cara yang sama, meskipun dengan dua kesimpulan yang kontras. Komite pertama menemukan dia penderita skizofrenia paranoid, sedangkan komite kedua menemukan bahwa dia memiliki gangguan kepribadian narsistik tetapi masih waras selama serangan. Persidangan di Pengadilan Distrik Oslo berakhir dengan dinyatakan Breivik waras dan bersalah. Vonisnya adalah hukuman maksimum di Norwegia: 21 tahun penjara, dengan kemungkinan perpanjangan. Selama berada di penjara, dia telah mengubah namanya. Pada 15 Maret 2019 Brenton Tarrant melakukan serangan teroris terhadap umat Islam di Christchurch, Selandia Baru. Ia secara eksplisit menyebut Breivik sebagai sumber inspirasi, dan “22 Juli” kembali muncul ke permukaan sebagai berita internasional.

“22 Juli” telah menjadi metonim untuk trauma budaya yang muncul setelah peristiwa tersebut. Hal ini tidak hanya mencerminkan suatu peristiwa sejarah, tetapi juga proses sesudahnya, seperti “9/11.” Peristiwa tersebut menjadikan pertanyaan tentang identitas kolektif hal yang mendesak, dan menantang konsepsi sebelumnya mengenai watak Norwegia (*Norwegianness*). Seperti yang ditanyakan oleh konfederasi Serikat Pekerja Norwegia: “Bagaimana ‘salah seorang di antara kita’ bisa berakhir sebagai pembunuh massal?” Cara membuka landasan kolektif untuk diskusi ini merupakan salah satu indikator trauma budaya.

Banyak literatur internasional tentang “22 Juli” berkembang luas, tidak terbatas hanya di Norwegia. Mungkin yang paling terkenal adalah buku non-fiksi tulisan Åsne Seierstad dengan judulnya yang jitu, *One of us*. Dalam literatur akademis, antropolog Sindre Bangstad menulis sebuah buku berjudul *Anders Breivik and the Rise of Islamophobia* (2014) yang secara eksplisit menggali pertanyaan tentang motivasi ideologis terorisme. Sementara Bangstad secara eksplisit mempelajari bahaya Islam fobia sebagai faktor kontekstual yang penting, Sveinung Sandberg mempelajari narasi-diri yang disajikan dalam “manifesto” Breivik, dan menemukan empat cara berbeda untuk menganalisisnya, “baik secara strategis, atau ditentukan, atau terpadu, atau terfragmentasi.” Dia juga menunjukkan bagaimana berbagai cara berbeda dalam mendeskripsikan Breivik mencerminkan pertentangan antara para anti-Islamis yang mencoba untuk fokus pada agensi Breivik dan para aktor kiri yang menggarisbawahi pendekatan struktural. Pendekatan penelitian lain yang seharusnya bisa disebutkan adalah, antara lain, studi tentang media, perdebatan tentang multikulturalisme, kepercayaan dan keterlibatan warga, dan kebijakan kontra terorisme. Semua

contoh ini biasanya mencoba mempelajari dampak 22 Juli. Salah satu konsekuensi penting untuk disebutkan adalah bahwa setelah serangan teroris, pemerintah Norwegia memberikan dukungan keuangan untuk pembentukan Pusat Penelitian Ekstremisme (C-REX) di Universitas Oslo yang menurut Cynthia Miller-Idriss “saat ini diakui secara luas sebagai pusat paling komprehensif untuk studi ilmiah dan kebijakan publik tentang ekstremisme sayap kanan secara global.”

Diskusi ini bukan ruang untuk memberikan penjelasan lengkap tentang keilmuan mengenai, atau yang berkaitan dengan, 22 Juli, tetapi artikel-artikel berikut dikemukakan sebagai contoh lanskap di mana saya dan Tore Rafoss telah mengerjakan isu tematik terkait “22 Juli” dalam *Norwegian Journal of Sociology*. Artikel-artikel tersebut mencakup berbagai aspek berbeda. Artikel pertama, “Trust in the aftermath of terrorism in Norway, France and Spain” (Kepercayaan setelah serangan terorisme di Norwegia, Prancis, dan Spanyol), mempelajari pentingnya narasi sebagai bagian dari kepercayaan warga negara terhadap politisi dan masyarakat setelah serangan teroris. Kasus pembandingnya adalah serangan teroris di Nice pada tahun 2016 dan di Barcelona pada tahun 2017.

Artikel kedua adalah tentang kinerja memori dan berjudul “National memorials as a response to terrorism” (Peringatan nasional sebagai respons terhadap terorisme). Tulisan ini menelaah proses formasi peringatan nasional di Oslo dan Utøya dengan membandingkan dengan Peringatan Nasional Kota Oklahoma dan Peringatan Nasional 9/11 New York. Artikel ini diakhiri dengan diskusi tentang bagaimana, secara paradoks, peringatan nasional sering menutupi dimensi politik dari peristiwa sejarah dan tindakan mengingat.

Artikel ketiga, “The role of the court after 22nd of July” (Peran pengadilan setelah 22 Juli) menguraikan agenda penelitian dalam sosiologi hukum dengan mendokumentasikan hubungan antara pengadilan dan penyintas, serta kinerja memori dan rekonstruksi. Tulisan ini berambisi untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana pengadilan menanggapi peristiwa luar biasa.

Beberapa buku yang akan turut dikaji adalah *Hate in Homeland* karya Cynthia Miller-Idriss, antologi *Bearbeidelser* (Cara-cara Menghadapi) suntingan Anne Gjelsvik, *Frykt og avsky i demokratiet* (Rasa Takut dan Kebencian dalam Demokrasi) tulisan Eirik Høyer, dan *Arbeiderpartiet og 22. Juli* (Partai Buruh dan 22 Juli) tulisan Hallvard Notaker.

Seperti yang diilustrasikan oleh artikel dan ulasan buku ini, kekuatan sosiologi bergantung pada keelusaannya dalam mengkaji peristiwa “22 Juli.” ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Pål Halvorsen
<pai.halvorsen@universitetsforlaget.no>